Laporan Mineria Pelaksanaan Pinjaman/Libah Luar Negeri

Edisi Triwulan II Tahun 2013



















KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan ini terdiri dari 2 Buku yaitu Buku 1: Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri, berisi informasi umum pelaksanaan pinjaman luar negeri, kinerja pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri dan dalam rangka untuk mendapatkan pengalaman pelaksanaan proyek disampaikan pula laporan dari proyek-proyek yang telah selesai pelaksanaannya yang informasinya diperoleh dari laporan akhir proyek (*Project Completion Report*). Sementara Buku 2 merupakan Lampiran Laporan yang berisi data, status pelaksanaan, permasalahan, tindak lanjut seluruh proyek yang sedang berjalan (*on-going*).

Laporan edisi Triwulan II, tahun 2013 disusun berdasarkan (i) laporan hasil pemantauan dari instansi pelaksana posisi sampai dengan 30 Juni 2013 yang disampaikan kepada Bappenas, (ii) hasil rapat pemantauan Triwulan II tahun 2013 yang diselenggarakan di Bappenas pada bulan Juli 2013 lalu yang melibatkan instansi pelaksana pinjaman dan hibah luar negeri, perwakilan mitra pembangunan asing dan instansi terkait serta (iii) dari hasil kunjungan lapangan.

Sebagaimana edisi triwulan sebelumnya dalam laporan ini disampaikan kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan sumber dana pinjaman dan berdasarkan instansi pelaksana ditinjau dari sisi penyerapan dana dan pencapaian indikator output atau kemajuan pelaksanaan fisik. Sedangkan untuk pemantauan hibah luar negeri, pada saat ini masih dilakukan secara deskriptif dengan sumber pembiayaan dari Pemerintah Amerika Serikat, hibah Jepang, hibah Jerman, dan lembaga-lembaga di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*).

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri termasuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap proyek dan kami harapkan jika diperlukan dapat dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

Daftar Isi

Kata Per	ngantar	i
Daftar T	abel	v
Daftar G	Gambar	vii
BAB I	GAMBARAN UMUM	1
	Pelaksanaan Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman	1
	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	4
	Pinjaman Proyek Yang akan Berakhir Masa Berlakunya dan Efektif pada Triwulan II Tahun Anggaran 2013	
BAB II	KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI	9
	Kreditor Multilateral	9
	Bank Dunia	10
	ADB	
	IDB	-
	Multilateral Lain	
	Kreditor Bilateral JICA	
	Australia	
	AUSTRIA	
	Belanda	45
	China	46
	Denmark	
	Jerman	
	KoreaPerancis dan Perancis AFD	
	Spanyol	
	Proyek Fasilitas Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing	
BAB III	KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI	67
	Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact Program	
	Hibah Jepang	
	Hibah Jerman	
	Hibah Lembaga-Lembaga PBB	
	United Nations Development Programme (UNDP)	
	International Labour Organization (ILO)	
	United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)	
	United Nations Children's Fund (UNICEF)	
	United Nations Population Fund (UNFPA)	
	Food and Agriculture Organization (FAO)	
	Kunjungan Lapangan UN Joint Program – Merani Volcanic Eruntion Livelihood Recovery	78

BAB IV	LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI	79
	Urban Sector Development and Reform Project 4886-IND (Bank Dunia)	79
	Vocational Education Strenghtening Project (INVEST), 2416-INO(ADB)	80
	Madrasah Education Development Project, 2294-INO (SF) (ADB)	82
	Integrated Diponegoro University Development Project, IND-0109/0110 (IDB)	83
	Rehabilitation for Muara Karang Power Plan Project, IP-512 (JICA)	84
	Muara Tawas Gas Power Plant Project IP-513 (JICA)	86
BAB V	PENUTUP	89
	Kesimpulan	89
	Tindak Lanjut	89

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Kelompok Sumber Pinjaman
Tabel 2.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar NegeriBerdasarkan Sumber Pinjaman
	Posisi 30 Juni 2013
Tabel 3.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri MenurutInstansi Penanggung Jawab4
Tabel 4.	Pinjaman Proyek Yang akan Berakhir Masa Berlakunya dan Efektif pada Triwulan II TA 20137
Tabel 5.	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral9
Tabel 6.	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab
Tabel 7.	Realisasi Penyerapan Proyek Pinjaman Bank Dunia yang Berakhir pada Triwulan II TA 201311
Tabel 8.	Realisasi Penyerapan Pinjaman Bank Dunia yang Akan Berakhir Masa Berlakunya pada Tahun 2013 (31 Desember 2013)12
Tabel 9.	Realisasi Penyerapan Pinjaman Bank Dunia dengan Status Capaian Baik dan/atau <i>Serious Delay</i>
Tabel 10.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman ADB Posisi Bulan Juni 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab
Tabel 11.	Pinjaman Pinjaman ADB dengan PV ≤ -30 (Triwulan I, 2013 dan Triwulan II, 2013)23
Tabel 12.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman IDB Posisi Bulan Maret 2013 Menurut
	Instansi Penanggung Jawab
Tabel 13.	Pinjaman Pinjaman IDB Dengan Nilai PV ≤-30 (Triwulan I TA 2013 dan Triwulan II TA 2013)
Tabel 14.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Multilateral Lain Posisi Bulan Juni 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab
Tabel 15.	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral31
Tabel 16.	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 31
Tabel 17.	Perbandingan Penarikan Pinjaman Tahun 2012 dan 2013
Tabel 18.	Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan II TA 201334
Tabel 19.	Progres Varian Proyek Pinjaman JICA34
Tabel 20.	Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-531Tanjung Priok Access Road Construction Project (II)
Tabel 21.	Daftar Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013 dan Status Dana
Tabel 22.	Pencapaian Indikator Kinerja Output EINRIP (Eastern Indonesia National Road Improvement Project)
Tabel 23.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Austria Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab
Tabel 24.	Pencapaian Indikator Kinerja Output Proc of 30 units Airport Rescue and Firefighting Vehicles
Tabel 25.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman China menurut Instansi Penanggung jawab46
Tabel 26.	Daftar Pinjaman Proyek China Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

Tabel 27.	Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-531Tanjung Priok Access Construction Project (II)	Road
Tabel 28.	Pencapaian Indikator Kinerja Output Indonesia Ship Reporting System	
Tabel 29.	Perbandingan Penarikan Pinjaman Jerman Tahun 2012 dan 2013	
Tabel 30.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Pada Triwulan II TA 2013 Menurut Ins	
ruber 50.	Penanggung Jawab	52
Tabel 31.	Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (status pada Triwulan IV, 2012 dan Triwulan I, 2013	3) 53
Tabel 32.	Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek Jerman Triwulan I TA 2013	54
Tabel 33.	Perbandingan Penarikan Pinjaman Korea Tahun 2012 dan 2013	55
Tabel 34.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab	55
Tabel 35.	Progress Varian Proyek Pinjaman Korea	56
Tabel 36.	Daftar Pinjaman Proyek Korea Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013	56
Tabel 37.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Pada Triwulan II TA 2013 Menurut Ins	stansi
	Penanggung Jawab	58
Tabel 38.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Pada Triwulan II TA 2013 Menurut Ins	stansi
	Penanggung Jawab	59
Tabel 39.	Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek Perancis Triwulan II TA 2013	60
Tabel 40.	Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek AFD Triwulan II TA 2013	61
Tabel 41.	Pinjaman Proyek Perancis Yang Akan Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013	61
Tabel 42.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Ins Penanggung Jawab	
Tabel 43.	Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek Spanyol Triwulan II TA 2013	62
Tabel 44.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman KSA/LPKE Pada Triwulan II TA 2013 Men	nurut
	Instansi Penanggung Jawab	63
Tabel 45.	Total Komitmen dan Penyerapan Kumulatif Proyek KSA/LPKE on going	63
Tabel 46.	Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia	64
Tabel 47.	Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN	64
Tabel 48.	Gambaran umum Hibah Amerika Serikat	67
Tabel 49.	Komponen Pembiayaan MCC	67
Tabel 50.	Rencana Pelaksanaan Hibah Amerika Serikat TA 2013	68
Tabel 51.	Gambaran Umum Hibah Forest Programme	69
Tabel 52.	Daftar Proyek UNDP yang Dpantau Pelaksanaannya pada Triwulan II TA 2013	70
Tabel 53.	Daftar Proyek FAO yang Dipantau Pelaksanaannya pada Triwulan II TA 2013	77
Tabel 54.	Gambaran Umum Vocational Education Strenghtening Project (INVEST), 2416-INO Pinja	aman
	ADB	80
Tabel 55.	Gambaran Umum Madrasah Education Development Project, 2294-INO (SF)	82
Tabel 56.	Gambaran Umum Integrated Diponegoro University Development Project, IND-0109/0110	83
Tabel 57.	Gambaran Umum Rehabilitation for Muara Karang Power Plan Project, IP-512 Pinja	aman
	JICA	84
Tabel 58.	Pencapaian Output Pembangunan Power Plant	84
Tabel 59.	Pembiayaan Proyek	85
Tabel 60.	Gambaran Umum IP-513 Muara Tawar Gas Power Plant Project	86
Tabel 61.	Pencapaian Output Pembangunan Power Plant	86
Tabel 62.	Pembiayaan Proyek	87

Daftar Gambar

Gambar 1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 30 Juni 20	13 4
Gambar 2. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Menurut Instansi Penanggung Jawa	b Posisi
30 Juni 2013	6
Gambar 3. Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Pelaksana	10
Gambar 4. Jumlah Pinjaman Proyek ADB Berdasarkan Instansi Pelaksana	19
Gambar 5. Jumlah Pinjaman Proyek IDB Berdasarkan Instansi Pelaksana	26
Gambar 6. Proses Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol	49
Gambar 7. Refocusing pengembangan manajemen SMK berbasis teknologi	81
Gambar 8. Refocusing pengembangan manajemen SMK berbasis kesenjan	81

BAB I GAMBARAN UMUM

Pada Triwulan II TA 2013, total nilai pinjaman luar negeri yang dipantau dan masih efektif sampai dengan bulan Juni 2013 sebesar ekuivalen USD 16.981,29 juta dengan jumlah proyek sebanyak 163 yang keseluruhannya merupakan pinjaman proyek (*project loan*). Dari 163 pinjaman proyek sebanyak 73 proyek berasal dari kelompok Kreditor Multilateral dengan total nilai pinjaman sebesar USD 6.147,44 juta, 61 proyek Kreditor Bilateral dengan total nilai pinjaman sebesar USD 7.484,48 juta, dan 29 alokasi Kreditor KSA/LPKE dengan jumlah proyek efektif sebanyak 68 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 3.349,37 juta.

Dibandingkan dengan Triwulan I TA 2013 dengan jumlah pinjaman proyek sebanyak 159 dan total nilai pinjaman proyek sebesar USD 17.568,52 juta, maka pada Triwulan II, tahun 2013 terdapat penambahan jumlah proyek yang dipantau yaitu sebanyak 5 proyek antara lain berasal dari *Islamic Development Bank* (IDB) 1 proyek, pinjaman Pemerintah China 3 proyek dan dari JBIC 1 proyek dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 386,58 juta, terdapat 1 proyek bersumber dari JICA yang telah berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2013 dengan nilai sebesar ekuivalen USD 496,14 juta, dengan demikian total nilai pinjaman pada Triwulan II, tahun 2013 menjadi sebesar ekuivalen USD 16.981,29 juta atau lebih rendah dari total nilai pinjaman pada Triwulan I, tahun 2013.

Realisasi penyerapan kumulatif sampai dengan akhir bulan Juni 2013 sebesar ekuivalen USD 6.389,92 juta atau 37,63% dari total nilai pinjaman proyek, sementara realisasi penyerapan pada tahun anggaran 2013 periode Januari-Juni 2013 sebesar ekuivalen USD 852,42 juta atau 20,09% dari target penyerapan tahun 2013 sebesar ekuivalen USD 4.243,95 juta.

Penyerapan kumulatif maupun penyerapan Tahun Anggaran 2013 periode Januari-Juni 2013 berdasarkan sumber pinjaman dan instansi pelaksana dapat dilihat pada bab dan sub bab selanjutnya, namun secara ringkas dari hasil pemantauan Triwulan II TA 2013 ini dapat diidentifikasi beberapa hal terkait belum tercapainya target penyerapan pada triwulan II tahun 2013 yaitu (1) adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan baik adminsitratif dan teknis serta faktor lain sehingga pelaksanaan pekerjaan terlambat dan pencairan tertunda, bahkan beberapa proyek belum melakukan pencairan sama sekali karena tahap persiapan belum tuntas (2) adanya penambahan pagu DIPA 2013 dalam rangka percepatan penarikan pinjaman sehingga target penyerapan lebih tinggi dari Triwulan I TA 2013 seperti pada beberapa proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pelaksanaan Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman

Sumber pinjaman luar negeri berasal dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, antara lain World Bank (Bank Dunia), Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Saudi Fund. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, antara lain Japan International Cooperation Agency (JICA), Australia, Austria, Belanda, China, Denmark, Jerman, Korea, Perancis dan Spanyol.

Kreditor Swasta Asing (KSA) adalah lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, antara lain PT.

BNI cabang Singapura, Tokyo, Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, antara lain BNP Paribas, Exim Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Fortis Bank Belanda. Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan kelompok sumber pinjaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Kelompok Sumber Pinjaman

(ekuivalen juta USD)

Sumber Pinjaman	Jumlah	Nilai	Penyerapan	Belum	TA 2013			
Sumber i mjaman	Proyek	Pinjaman	Kumulatif	Ditarik	Target Realisasi		%	
Kreditor Multilateral	73	6.147,44	2.687,29	3.460,14	773,59	187,82	24,28	
Kreditor Bilateral	61	7.484,48	2.990,98	4.493,50	1.363,55	221,99	16,28	
Kreditor KSA/LPKE	29	3.349,37	711,65	2.637,72	2.106,80	442,61	21,01	
Total	163	16.981,29	6.389,92	10.591,89	4.243,95	852,42	20,09	

Berdasarkan sumber pinjamannya, 163 pinjaman luar negeri yang dipantau pelaksanaannya pada Triwulan II TA 2013 tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Bank Dunia sebanyak 27 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 4.093,20 juta (24,09%), ADB sebanyak 17 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 1.247,45 juta (7,34%), JICA sebanyak 37 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 5.984,19 juta (35,21%), IDB sebanyak 24 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 608,58 juta (3,57%), dan sumber Multilateral lain sebanyak 5 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 198,21 juta (1,17%), Bilateral lain sebanyak 24 pinjaman proyek dengan nilai sebesar ekuivalen USD 1.524,84 juta (8,83%) dan KSA/LPKE sebanyak 68 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 3.349,37 juta (19,72%).

Tabel 2. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 30 Juni 2013

(ekuivalen juta USD)

	7 11 277		%			TA 2013			
Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Terhadap Total Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Belum Ditarik	Target	Realisasi	%	
Multilateral	73	6.147,44	36,20	2.687,29	3.460,14	773,59	187,82	24,28	
1. Bank Dunia	27	4.093,20	24,10	1.784,66	2.308,54	424,76	73,37	17,27	
2. ADB	17	1.247,45	7,35	658,77	588,67	234,57	69,74	29,73	
3. IDB	24	608,58	3,58	172,49	436,09	97,27	40,59	41,73	
4. Multilateral Lain	5	198,21	1,17	71,37	126,84	16,99	4,12	24,25	
- IFAD	4	162,21	0,96	71,37	90,84	16,99	4,12	24,25	
- Saudi Fund	1	36,00	0,21	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
Bilateral	61	7.484,48	44,07	2.990,98	4.493,50	1.363,55	221,99	16,28	
1. JICA	37	5.984,19	35,24	2.284,62	3.699,57	1.013,52	150,03	14,80	
2. Bilateral Lain	24	1.500,28	8,83	706,36	793,92	350,03	71,96	20,56	
- Australia	1	277,49	1,63	188,62	88,87	26,75	10,54	39,42	
- Austria	2	20,91	0,12	10,31	10,60	19,34	8,74	45,18	
- Belanda	1	29,29	0,17	27,98	1,31	5,84	5,84	100,00	
- China	5	587,26	3,46	279,87	307,39	138,90	17,04	12,27	
- Denmark	1	1 7, 50	0,10	17,50	0,00	4,90	4,90	100,00	

			%	Damyamamam		TA 2013			
Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Terhadap Total Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Belum Ditarik	Target	Realisasi	%	
- Jerman	4	150,02	0,88	80,28	69,74	39,14	7,61	19,43	
- Korea	5	230,90	1,36	30,13	200,78	45,77	7,07	15,45	
- Perancis	2	87,70	0,52	50,80	36,90	19,98	0,55	2,75	
- Prancis-AFD	2	80,00	0,47	9,20	70,80	42,03	9,20	21,89	
- Spanyol	1	19,21	0,11	11,67	7,54	7,37	0,46	6,21	
KSA/LPKE*)	29	3.349,37	19,72	711,65	2.637,72	2.106,80	442,61	21,01	
Total	163	16.981,29	100,00	6.389,92	10.591,89	4.243,95	852,42	20,09	

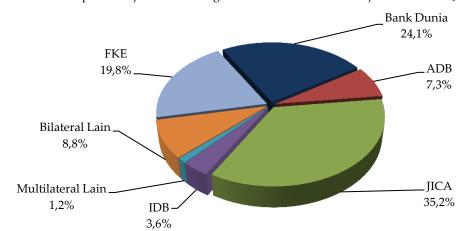
^{*)} merupakan jumlah alokasi KE dengan jumlah proyek efektif sebanyak 68 proyek

Disbursement atau penyerapan dana merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja pinjaman luar negeri. Penyerapan kumulatif pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan II TA 2013 mencapai ekuivalen USD 6.389,92 juta atau 37,63% dari total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 16.981,29 juta, dengan demikian nilai pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar ekuivalen USD 10.591,89 juta. Sementara itu, realisasi penyerapan dana pada Tahun Anggaran berjalan periode Januari - Juni 2013 mencapai ekuivalen USD 852,42 juta atau 20,09% dari target penyerapan Tahun Anggaran 2013 sebesar ekuivalen USD 4.243,95 juta, Tabel 2 di atas memperlihatkan capaian penyerapan berdasarkan sumber pinjaman baik secara kumulatif dan pada Tahun Anggaran 2013.

Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat persentase penyerapan Tahun Anggaran 2013 untuk beberapa sumber pinjaman lebih rendah dari persentase total penyerapan Tahun Anggaran 2013 (20,09%). Bank Dunia pada periode Januari-Juni Tahun Anggaran 2013 baru mencapai 17,27%, JICA 14,80%, China 12,27%, Korea 15,45%, Perancis 2,75% dan dari Saudi Fund masih 0%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan, pada Bank Dunia (1) banyaknya paket-paket kontrak yang nilainya sedikit yang menyebabkan konsultan memilih untuk melakukan penarikan dana sekaligus di akhir tahun 2013 (2) adanya keterlambatan pembayaran (reimbusement) (3) adanya revisi Annual Work Plan (AWP) oleh beberapa daerah target penerima sehingga dana APBD yang harus disediakan sebagai dana sharing pinjaman baru akan dapat tersedia akhir tahun, sehingga porsi pinjaman baru akan dapat ditarik pada akhir tahun 2013 (4) adanya 1 proyek yang sedang dalam proses pembatalan dan 1 proyek dalam proses restrukturisasi sehingga dana yang dialokasi anggaran DIPA 2013 kemungkinan besar tidak akan dicairkan (5) adanya revisi disbursement plan maupun reshedule pelaksanaan sehingga penyerapan tertunda. Untuk sumber pinjaman JICA (1) kurang tepat dalam perencanaan , tahap persiapan proyek lama, mencantumkan target penyerapan tahun 2013 relatif tinggi (2) penyediaan lahan belum tuntas karena dana APBD yang dialokasikan tidak cukup, selain itu proses penentuan batas lahan dan pemenuhan administratif pembebasan lahan membutuhkan waktu yang lama, (3) adanya rencana percepatan penarikan sehingga target penyerapan pada Triwulan II lebih tinggi dari Triwulan I. Sementara itu terdapat sumber pinjaman bilateral dan multilateral lain yang masih rendah penyerapannya yaitu dari China, Korea, Perancis dan Saudi Fund. Dari 5 proyek bersumber dari pinjaman Pemerintah China terdapat 3 proyek yang baru efektif dan mulai dipantau pelaksanaannya pada Triwulan II, tahun 2013 dan ketiga proyek tersebut masih tahap persiapan dan belum melakukan pencairan dana. Dari sumber pinjaman Korea, saat ini masih memproses pengadaan lahan untuk proyek Padang by pass Capacity Expansion Project sehingga penyerapan posisi triwulan II, tahun 2013 masih rendah dan 1 proyek Perancis yang masih memerlukan revisi DIPA untuk menampung pencairan dana berasal tagihan tahun 2012 yang akan dicairkan pada tahun 2013. Terdapat 1 proyek yang bersumber dari Saudi Fund yang merupakan pendanaan bersama dengan sumber *Islamic Development Bank* (IDB) untuk 1 proyek yang saat ini masih tahap persiapan untuk pengadaan konsultan.

Gambar 1 terkait komposisi dan besaran (*share*) masing sumber pinjaman terhadap total nilai pinjaman proyek. Dapat dilihat persentase share terbesar berasal dari sumber pinjaman JICA, kemudian dari Bank Dunia, selanjutnya dari FKE masing-masing sebesar 35,2%, 24,1%, dan 19,8%.



Gambar 1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 30 Juni 2013

Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2013 terdapat 22 Kementerian/lembaga/BUMN yang menjadi instansi penanggung jawab (executing agency) atas 163 pinjaman proyek yang sedang berjalan. Dari 163 pinjaman proyek yang sedang berjalan pada Triwulan II, tahun 2013, 136 pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan 27 pinjaman diteruspinjamkan (SLA). Dari 136 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, sebanyak 44 pinjaman proyek dari jumlah pinjaman proyek dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai pinjaman proyek sebesar ekuivalen USD 5.002,60 juta atau 29,4%, Kementerian Pertahanan 18,3%, Kementerian Perhubungan dengan nilai pinjaman proyek sebesar ekuivalen USD 1.575,89 juta atau 9,3% dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai pinjaman proyek sebesar ekuivalen USD 933,22 juta atau 5,5%.

Tabel 3. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri Menurut Instansi Penanggung Jawab

(ekuivalen juta USD)

Instansi	Jumlah	Nilai	% Penyerapan TA 20		TA 2013		TA 201		TA 2013		
Penanggung Jawab	Proyek	Pinjaman	Total Pinjaman	Jumlah	%	Ditarik	Target	Realisasi	%		
Dilaksanakan oleh K/L	136	12.601,13	74,2	4.818,88	38,24	7.782,25	3.644,95	732,14	20,09		
Kemendagri	2	594,39	3,5	470,21	79,11	124,19	24,90	0,00	0,00		
Kemhan *)	23	3.107,11	18,3	560,99	18,06	2.546,12	2.022,61	414,98	20,52		
Kemenkeu	2	169,97	1,0	26,47	15,57	143,50	27,40	0,00	0,00		
Kemtan	4	241,21	1,4	112,12	46,48	129,09	24,37	5,30	21,75		
Kemenhub	12	1.575,89	9,3	271,72	17,24	1.304,17	463,92	31,28	6,74		
Kemendikbud	22	933,22	5,5	369,78	39,62	563,44	180,13	44,32	24,60		
Kemenkes	5	161,71	1,0	121,57	75,18	40,13	24,28	9,40	38,71		

Instansi	Jumlah	Nilai	% Terhadap	Penyera Kumul	•	Belum	TA 2013		
Penanggung Jawab	Proyek	Pinjaman	Total Pinjaman	Jumlah	%	Ditarik	Target	Realisasi	%
Kemenag	6	95,21	0,6	32,85	34,50	62,36	3,37	2,01	59,56
Kemen KP	4	128,26	0,8	44,11	34,39	84,15	30,24	9,55	31,58
Kemen PU	44	5.002,60	29,4	2.600,41	51,98	2.402,19	717,74	189,60	26,42
BPS	1	65,00	0,4	0,00	0,00	65,00	4,80	0,00	0,00
Bappenas	3	238,46	1,4	93,89	39,37	144,57	24,36	11,53	47,30
Kemkominfo	1	29,42	0,2	10,95	37,21	18,47	4,48	0,00	0,00
Kepolisian RI **)	3	77,70	0,5	39,78	51,20	37,92	47,83	9,91	20,72
BPKP	1	57,75	0,3	1,46	2,53	56,29	2,90	1,46	50,34
BMKG	1	39,60	0,2	8,05	20,33	31,55	14,64	0,55	3,75
LIPI	1	19,21	0,1	11,67	60,75	7,54	7,37	0,46	6,21
Bakosurtanal	1	64,41	0,4	42,85	66,52	21,56	19,60	1,81	9,21
Diteruspinjamkan (SLA)	27	4.380,16	25,8	1.571,04	35,87	2.809,12	599,00	120,28	20,08
PT. PLN	22	3.663,24	21,6	1.425,33	38,91	2.237,91	541,05	119,51	22,09
PT. PGN	1	69,38	0,4	61,79	89,06	<i>7,</i> 59	0,00	0,00	0,00
PT. PERTAMINA	2	447,54	2,6	2,79	0,62	444,75	28,05	0,77	2,73
PT. SMI	2	200,00	1,2	81,13	40,57	118,87	29,90	0,00	0,00
Total	163	16.981,29	100,0	6.389,92	37,63	10.591,37	4.243,95	852,42	20,09

^{*)} Jumlah proyek pada Kementerian Pertahanan menggambarkan 21 alokasi KE (53 proyek) dan 2 proyek dari pinjaman Austria

Secara rinci dari Tabel 3 dapat dilihat nilai pinjaman proyek yang dikelola oleh masing-masing instansi penanggung jawab serta realisasi penyerapan baik secara kumulatif maupun realisasi penyerapan pada TA berjalan termasuk pinjaman proyek yang diteruspinjamkan atau di-*SLA*-kan. Untuk pinjaman yang diteruspinjamkan berjumlah 27 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 4.380,16 juta yang sebagian besar dikelola oleh PT. PLN sebanyak 22 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 3.663,24 juta.

Pada Triwulan II, tahun 2013, penyerapan kumulatif untuk pinjaman luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga mencapai ekuivalen USD 4.818,88 juta atau sebesar 38,24% dari total pinjaman dan realisasi penyerapan pinjaman pada periode Januari-Juni tahun 2013 mencapai ekuivalen USD 732,14 juta atau sebesar 20,09% dari total target Tahun Anggaran 2013 yaitu sebesar ekuivalen USD 3.644,95 juta. Untuk pinjaman yang diteruspinjamkan penyerapan kumulatifnya mencapai ekuivalen USD 1.571,04 juta atau 35,87% dari total pinjaman yang diteruspinjamkan, sedangkan realisasi penyerapan dari pinjaman pada periode Januari-Juni 2013 mencapai ekuivalen USD 120,28 juta atau 20,08% dari total target Tahun Anggaran 2013.

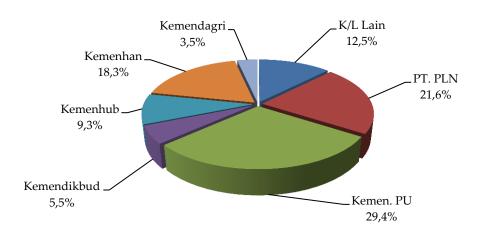
Pada Tabel 3 menunjukan bahwa pada periode Januari-Juni 2013 proyek-proyek di beberapa Kementerian/Lembaga belum melakukan penarikan antara lain (i) Kementerian Dalam Negeri mengelola 2 proyek yang pada TA 2013 (Januari-Juni) belum melakukan penarikan karena masih memproses realokasi antar kegiatan dan *replenishment*. Secara umum pelaksanaan kedua proyek tersebut lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Proyek tersebut bersumber dari Bank Dunia dan IFAD untuk mendukung program PNPM, (ii) di Kementerian Keuangan, dari hasil pemantauan 1 proyek masih dalam proses untuk dibatalkan sehingga alokasi anggaran DIPA 2013 kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan dan 1 proyek lainnya masih dalam proses realokasi antar kategori dan diperkirakan akan diperpanjang sampai tahun 2015, (iii) Badan Pusat Statistik mengelola 1 proyek, saat ini dalam proses restrukturisasi, (iv) Kementerian Kominfo mengelola 1

^{**)} Jumlah proyek pada Kepolisian Republik Indonesia menggambarkan 3 alokasi KE yang terdiri dari 10 proyek

proyek, saat ini masih memproses adendum kontrak dan revisi DIPA (v) PT. PGN mengelola 1 proyek dengan status pelaksanaan telah selesai dan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan sehingga pada tahun 2013 tidak ada kegiatan lagi dan sisa dana akan dikembalikan, (vi) PT. SMI mengelola 2 proyek bersumber dari Bank Dunia dan ADB, saat ini proses perpanjangan *loan* sampai tahun 2015.

Kementerian Perhubungan yang merupakan Kementerian/Lembaga yang mengelola pinjaman luar negeri relatif besar setelah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan tetapi penyerapan pada periode Januari-Juni 2013 masih rendah yaitu 6,74%. Dari 12 proyek, sebanyak 2 proyek hampir selesai sementara 10 proyek masih dalam pelaksanaannya. Kesepuluh proyek tersebut sebagian besar dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (sebanyak 8 proyek)antara lain 5 proyek bersumber dari JICA, termasuk proyek *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit* (IP-554) yang masih dalam persiapan, 1 proyek dari Pemerintah China saat ini masih proses revisi DIPA, dan bersumber dari Jerman sebanyak 2 proyek, saat ini dalam proses adendum kontrak dan pencantuman pagu pinjaman dalam DIPA 2013. Sementara Ditjen Perhubungan Laut mengelola 1 proyek bersumber dari IDB, saat ini masih proses reviu desain dan beberapa kali penggantian *project manager*.

Gambar 2 terkait komposisi dan besaran pinjaman luar negeri yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan BUMN. Dapat dilihat persentase pinjaman luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terbesar dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (29,4%), kemudian Kementerian Pertahanan (18,3%), Kementerian Perhubungan (9,3%) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (5,5%) dan BUMN dikelola oleh PT. PLN (21,6%).



Gambar 2. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Menurut Instansi Penanggung Jawab Posisi 30 Juni 2013

Pinjaman Proyek Yang akan Berakhir Masa Berlakunya dan Efektif pada Triwulan II Tahun Anggaran 2013

Terdapat 7 pinjaman proyek yang akan berakhir masa berlakunya namun masih dipantau pada Triwulan II Tahun Anggaran 2013, proyek-proyek tersebut terdiri dari 1 proyek Bank Dunia, 1 proyek JICA, 3 proyek IDB, 1 proyek Belanda dan 1 proyek Perancis. Sementara itu terdapat 5 proyek yang efektif dan mulai dipantau pada Triwulan II tahun 2013 yaitu 1 pinjaman proyek IDB, 3 pinjaman proyek China dan 1 pinjaman proyek JBIC. Terdapat 1 pinjaman proyek JICA

yang sudah berakhir masa berlakunya pada Triwulan I TA 2013, pada Triwulan II TA 2013 ini sudah tidak dipantau lagi.

Tabel 4. Pinjaman Proyek Yang akan Berakhir Masa Berlakunya dan Efektif pada Triwulan II TA 2013

(dalam juta USD)

				(mn	um juiu USD)
Kode Loan	Sumber Pinjaman	Nama Proyek	Masa Laku Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Jumlah Sisa Pinjaman
Pinjaman P	royek Yang al	kan Berakhir Masa Berlakunya Pada Triwular	n II TA 2013		
4260-IND	Bank Dunia	FEATI	28/06/2007-30/06/2013	94,14	6,35
IP-531	JICA	Tjg. Priok Access Road Construction Project II	01/04/2006-30/06/2013	269,04	190,15
IND-115	IDB	North Sumatera University Hospital	23/12/2006-31/03/2013	11,02	11,02
IND-130	IDB	Dev't and Upgrading of The State University of Jakarta	12/04/2009-31/05/2013	2,12	0,99
IND-113	IDB	The Reconstruction of IAIN Ar Raniry	12/12/2006-10/06/2013	8,06	7,99
ID 00264	Belanda	Procurement and Delivery of 30 Unit Airport Rescue and Fire Fighting Vehicle	22/12/2013-10/06/2013	29,29	1,18
CID 3004 01 B	Perancis	Rehabilitation Drainage System of Banda Aceh	09/09/2009-30/04/2013	48,10	5,35
Pinjaman P	royek Yang B	erakhir Pada Triwulan I dan Tidak Dipantau	pada Triwulan II TA 2013		
IP-511	JICA	South Sumatera-West Java Gas Transmission	27/03/2003-27/03/2013	496,14	5.58
Pinjaman P	royek Yang E	fektif Pada Triwulan II TA 2013			
IND-161	IDB	Regional Road Development Project	29/04/2013-29/04/2017	65,00	65,00
21660201	China	Tayan Bridge Construction	04/09/2012-20/09/2015	67,28	64,07
21662601	China	Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Phase I	12/11/2012-12/11/2015	93,00	82,77
21663301	China	Toll Road Development of Medan-Kuala Namu	11/03/2013-12/06/2014	122,43	122,43
	JBIC	Scattered Transmission and Substantions Package 8			

BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Kreditor Multilateral

Pada Triwulan II TA 2013 terdapat 73 pinjaman proyek yang berasal dari Kreditor Multilateral, terdiri dari 27 pinjaman proyek Bank Dunia, 17 pinjaman proyek ADB, 24 pinjaman proyek IDB, 4 pinjaman proyek IFAD dan 1 pinjaman proyek Saudi Fund. Nilai total pinjaman proyek dari kreditor multilateral tersebut adalah USD 6.147,44 juta. Realisasi penyerapan kumulatif pada triwulan II TA 2013 mencapai USD 2.687,29 juta atau setara dengan 43,71% dari total nilai pinjaman. Nilai realisasi kumulatif pada triwulan ini hanya meningkat sebanyak USD 112,40 juta dari penyerapan kumulatif pada triwulan sebelumnya.

Tabel 5. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral

(ekuivalen juta USD)

No	Pemberi	Jumlah	Nilai	Penyer kumu	•	Pinjaman belum	Penyerapan TA 2		apan TA 2013	
	Pinjaman	Proyek	pinjaman	Nilai	%	ditarik	Target	Realisasi	%	
1	Bank Dunia	27	4.093,20	1.784,66	43,60	2.308,54	424,76	73,37	17,27	
2	ADB	17	1.247,45	658,77	52,81	588,67	234,57	69,74	29,73	
3	IDB	24	608,58	172,49	28,34	436,09	97,27	40,59	41,73	
4	IFAD	4	162,21	71,37	43,99	90,84	16,99	4,12	24,25	
5	Saudi Fund	1	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	73	6.147,44	2.687,29	43,71	3.460,14	773,59	187,82	24,28	

Berdasarkan instansi penanggungjawabnya sebanyak 62 proyek dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan nilai total pinjaman mencapai USD 4.335,63 juta, dengan realisasi kumulatif hingga triwulan ini mencapai 49,40% atau senilai USD 2.141,58 juta. Sebanyak 11 proyek lainnya diteruspinjamkan (SLA) dengan nilai total USD 1.811,81 juta dan penyerapan kumulatifnya mencapai 30,12 % atau senilai USD 545,71 juta.

Tabel 6. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

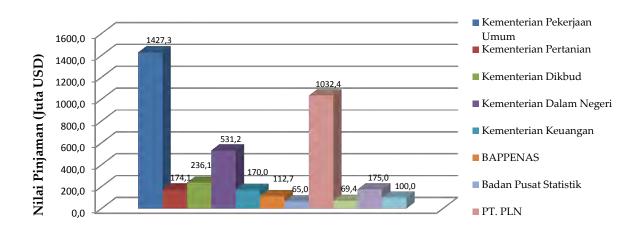
(ekuivalen juta USD)

No.	Instansi	Jumlah	Nilai	Penyer Kumu	•	Pinjaman Belum	Penyerapan TA		013
	Penanggung Jawab	Proyek	Pinjaman	Nilai	%	Ditarik	Target	Realisasi	%
Dilak	sanakan oleh K/L	62	4.335,63	2.141,58	49,40	2.194,05	511,04	139,62	27,32
1	Kemendagri	2	594,39	470,21	79,11	124,19	24,90	0,00	0,00
2	Kemenkeu	2	169,97	26,47	15,57	143,50	27,40	0,00	0,00
3	Kemtan	4	241,21	112,12	46,48	129,09	24,37	5,30	21,75
4	Kemenhub	1	87,55	0,09	0,10	87,46	11,06	0,02	0,18
5	Kemendikbud	18	624,39	291,77	40,33	431,62	95,90	40,31	42,03
6	KKP	3	98,26	39,74	40,44	58,52	21,42	5,18	24,18
7	Kemen PU	21	2.102,10	1.081,26	51,44	1.020,84	276,91	72,26	26,10
8	Kemenkes	2	89,70	80,85	90,14	8,85	5,17	3,32	64,27
9	Kemenag	5	65,06	5,41	8,32	59,65	1,31	1,82	139,17

No.	Instansi	Jumlah Proyek	Nilai	Penyer Kumu	•	Pinjaman Belum	Penyerapan TA 2013		013
	Penanggung Jawab	rroyek	Pinjaman	Nilai	%	Ditarik	Target	Realisasi	%
10	Bappenas	2	140,25	32,20	22,96	108,05	14,90	9,95	66,78
11	BPKP	1	57,75	1,46	2,52	56,29	2,90	1,46	50,17
12	BPS	1	65,00	0,00	0,00	65,00	4,80	0,00	0,00
Diteru	ıspinjamkan (SLA)	11	1.811,81	545,71	30,12	1.266,1	262,55	48,2	18,36
13	PT. PLN	7	1.367,43	402,79	29,46	964,64	231,85	48,20	20,79
14	PT. PGN	1	69,38	61,79	89,06	7,59	0,00	0,00	0,00
15	PT. PERTAMINA	1	175,00	0,00	0,00	175,00	0,80	0,00	0,00
16	PT. SMI	2	200,00	81,13	40,57	118,87	29,90	0,00	0,00
	Total	73	6.147,44	2.687,29	43,71	3.460,14	773,59	187,82	24,28

Bank Dunia

Pinjaman proyek bersumber dari Bank Dunia yang dipantau pelaksanaannya pada Triwulan II TA 2013 terdiri dari 27 pinjaman proyek dengan nilai pinjaman mencapai USD 4.093,20 juta. Pada triwulan ini terdapat 2 proyek yang berakhir masa berlakunya. Nilai pinjaman pada Triwulan I lebih besar dibandingkan dengan Triwulan II, hal tersebut disebabkan adanya perubahan nilai pinjaman pada proyek *Strategic Road Infrastructure Project* dari USD 206,46 juta menjadi USD 191,46 juta. Menurut instansi pelaksananya 27 pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh 7 Kementerian/Lembaga dan 4 BUMN seperti yang ditunjukkan oleh diagram berikut ini:



Gambar 3. Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Pelaksana

Jumlah pinjaman terbesar dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total nilai mencapai USD 1.427,32 juta untuk 10 proyek, sedangkan Badan Pusat Statistik mengelola 1 proyek dengan nilai USD 65 juta.

1. Kinerja Pelaksanaan

Kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman Bank Dunia pada triwulan II TA 2013 diuraikan dalam 2 bagian yaitu dari sisi penyerapan (termasuk analisis mengenai progress varian) dan dari pencapaian output atau pelaksaan fisik, kedua bagian tersebut akan saling berkaitan. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan secara purposif, yaitu untuk proyek-proyek dalam kondisi khusus misalnya proyek yang tutup pada triwulan ini, proyek yang akan segera tutup pada tahun ini, dan proyek dengan status kinerja penyerapan baik dan/atau *serious delay*. Dengan demikian pembahasan akan lebih mengerucut dan diharapkan dapat menjadi dasar untuk membangun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja proyek pada triwulan berikutnya.

1.1. Realisasi Penyerapan

Sampai dengan triwulan II TA 2013 penyerapan kumulatif untuk proyek-proyek pinjaman Bank Dunia mencapai USD 1.784,66 juta atau setara dengan 43,60% dari total nilai pinjaman. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai realisasi penyerapan proyek-proyek pinjaman Bank Dunia akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:

a. Realisasi Penyerapan Proyek yang Berakhir Masa Berlakunya pada Triwulan II TA 2013 Pembahasan ini bertujuan untuk melihat lebih jauh kondisi penyerapan kumulatif proyek-proyek tepat setelah masa berlakunya habis dan sisa dana yang belum terserap. Pada triwulan ini terdapat 2 proyek yang berakhir masa berlakunya, informasi rinci mengenai proyek-proyek tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Realisasi Penyerapan Proyek Pinjaman Bank Dunia yang Berakhir pada Triwulan II TA 2013

(ekuivalen USD Juta)

No. Loan	NamaProyek			MasaLaku	Nilai Pinjaman-	Penyer Kumula Juni 2	tif s.d	Pinjaman belum	PV
Loun					1 mjumum	Jumlah	%	ditarik	
Kementeri	nn Pekerjaan Umum (Ditjen. CiptaKarya)								
4786- IND	Urban Sector Development Reform Project			20/10/2005- 31/05/2013	38,44	36,46	94,85	1,98	-5,15
Kementeri	an Pertania	n (Badan Penyuluh	an dan Penş	gembangan SDM)					
4260- IND	Farmer Agricultur	Empowerment e Technology	Through	28/06/2007- 30/06/2013	94,14	87,79	93,25	6,35	-6,75
	Total				132,58	124,25	93,72	8,33	

Total nilai pinjaman proyek yang berakhir masa berlakunya pada triwulan II TA 2013 tersebut adalah USD 132,58 juta sedangkan penyerapan kumulatifnya baru mencapai USD 124,25 Juta (93,72%), dengan demikian masih terdapat dana yang belum terserap yaitu sebesar USD 8,33 Juta (6,28%). Meskipun dilihat dari persentase pinjaman yang belum terserap nilainya cukup rendah, namun masih perlu dilakukan pemantauan yang komprehensif pada *Project Completion Report* (PCR) karena masih terdapat kemungkinan penyerapan dana hingga *closing account*, sehingga dapat diketahui sisa dana pinjaman yang benar-benar tidak terserap, resiko beserta tindak lanjut yang dilakukan sebagai pembelajaran untuk proyek-proyek lainnya yang masih *on-going*.

b. Realisasi Penyerapan Proyek yang Akan Berakhir Masa Berlakunya pada Tahun 2013

Sebanyak 10 proyek pinjaman Bank Dunia akan berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2013. Pemantauan yang komprehensif diperlukan untuk proyek-proyek tersebut agar dapat dirumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja penyerapan yang masih rendah dan menghindari terjadinya perpanjangan, sedangkan untuk proyek-proyek yang realisasi penyerapannya sudah baik dan melampaui target dapat terus dijaga agar kinerja penyerapannya tetap baik hingga akhir masa berlaku proyek. Untuk mengetahui kondisi realisasi penyerapan masing-masing proyek tersebut sampai dengan triwulan II TA 2013 ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi Penyerapan Pinjaman Bank Dunia yang Akan Berakhir Masa Berlakunya pada Tahun 2013 (31 Desember 2013)

(ekuivalen USD Juta)

						(екининен а	02 / 111111/
No. Loan	NamaProyek	Closing Date	Nilai Pinjaman	Penyera Kumula Juni 2	tif s.d	Pinjaman belum ditarik	PV
				Jumlah %		aitarik	
Kementeria	n Pekerjaan Umum						
Ditjen. Su	mber Daya Air						
7669-ID *)	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	31/12/2013	50,00	18,68	37,36	31,32	-51,60
Ditjen. Ci	pta Karya						
7866-ID	Third National Prog. For Community Empowerment (PNPM III)	09/12/2013	149,98	149,98	100,00	-	14,14
4384-IND	National Program for Comm. Empowerment	31/12/2013					
& 7664 IND	Add. Financing for the National Program for Comm. Empowerment Urban Area	31/12/2013	287,89	264,07	91,73	23,82	1,02
Ditjen. Bi	na Marga						
4834-IND	Strategic Road Infrastructure Project (SRIP)	31/12/2013	191,46	157,46	82,24	34,00	-9,59
Kementeria	n Pendidikan dan Kebudayaan						
Ditjen. PA	AUD, Nonformal & Informal						
4205-IND	Early Chilhood Education & Dev.	31/12/2013	71,19	70,22	98,64	0,97	5,78
Ditjen. Pe	ndidikan Dasar				•		
4349-IND	BERMUTU	31/12/2013	87,13	79,58	91,33	7,55	-0,92
Kementeria	n Keuangan						
Ditjen. Pe	rbendaharaan						
4762-IND	Government Financial Management Reform (GFMRAP)	30/12/2013	59,97	26,19	43,67	33,78	-50,20
PT. PLN							
7905-ID	ERP Sumatera and Sulawesi	31/12/2013	30,00	15,07	50,23	14,93	-34,65
7758-ID	Java Bali Power Restr. & Strengthening	31/12/2013	137,43	126,62	92,13	10,81	-2,39
PT. SMI							
7731-ID*)	Indonesia Infrastructure Finance Facility Comp. (IIFF)	25/12/2013	100,00	10,00	10,00	90,00	-71,74
	Total		1165,05	917,87	78,78	247,18	

 $Keterangan: *)\ proyek\ sedang\ dalam\ proses\ pengajuan\ perpanjangan$

Kondisi realisasi penyerapan proyek-proyek yang akan segera tutup dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan lagi tersebut cukup bervariasi. PNPM III merupakan proyek yang

paling baik kinerja penyerapannya, karena dana pinjaman sudah terserap secara keseluruhan (100 %). Beberapa proyek lainnya juga sudah menunjukkan kecenderungan progres realisasi penyerapan yang cukup baik yaitu proyek-proyek yang penyerapan kumulatifnya telah lebih dari 90 % seperti proyek BERMUTU dan *Java Bali Power Restructuring & Strengthening*.

Selain itu juga masih terdapat 4 proyek yang realisasi penyerapannya di bawah angka 50 % dari nilai total pinjaman (progres varian <-30) yaitu DOISP, GFMRAP, ERP Sumatera & Sulawesi dan IIFF. Proyek-proyek dengan *serious delay* ini membutuhkan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kinerjanya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah masing-masing EA dan PMU melakukan review untuk mengidentifikasi komponen proyek yang belum terlaksana tetapi masih mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu yang tersisa, untuk kemudian dipercepat pelaksanaannya. Selain itu juga mengidentifikasi komponen yang belum terlaksana tetapi sudah tidak mungkin dapat dilaksanakan untuk segera diajukan pembatalan (partial cancellation). Dengan demikian pada saat masa berlakunya berakhir, kinerja proyek sudah membaik dan tidak membebani keuangan negara. Untuk proyek DOISP dan IIFF saat ini sedang dalam proses pengajuan perpanjangan.

Proyek SRIP dan PNPM II seharusnya juga berakhir masa berlakunya pada triwulan II TA 2013, namun karena telah disetujuinya perpanjangan hingga 31 Desember 2013 maka diharapkan kinerja penyerapan proyek dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

c. Realisasi Penyerapan Proyek dengan Capaian Realisasi Penyerapan Baik dan/atau serious delay

Pada bagian ini akan dibahas mengenai proyek-proyek yang masa berlakunya melebihi 31 Desember 2013 dengan kinerja penyerapan baik dan/ atau *serious delay*. Proyek dengan kinerja penyerapan baik yaitu proyek yang pelaksanaannya sudah melebihi tahun ke-3 dan progres varian lebih besar dari -20, serta belum pernah diperpanjang. Sedangkan proyek dengan status kinerja penyerapan kurang baik (*serious delay*) adalah proyek yang pelaksanaannya sudah melebihi tahun ke-3 dan progres varian lebih kecil dari -30. Berikut daftar proyek dengan dua kategori tersebut:

Tabel 9. Realisasi Penyerapan Pinjaman Bank Dunia dengan Status Capaian Baik dan/atau Serious Delay

(ekuivalen USD Juta)

No. Loan	NamaProyek	Masa Laku	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif s.d Juni 2013		Pinjaman belum	PV
			,	Jumlah	%	ditarik	
Kinerja Per	yerapan: Baik						
7737-ID	Health Professional Education Quality	09/12/2009	77,80	43,87	56,39	33,93	-13,9
	(HPEQ)	s.d					
		31/12/2014					
Kinerja Per	yerapan: Serious Delay						
7631-ID	Project for Indonesian Tax	31/08/2009	110,00	0,28	0,25	109,72	-60,23
	Administration Reform (PINTAR)	s.d					
		31/12/2015					

Keterangan:

Baik: Proyek dengan pelaksanaan sudahlebih dari tahun ke-3, masa berlaku melebihi 31 Desember 2013, PV >-20, tidak pernah diperpanjang

Serious Delay: Proyek dengan pelaksanaan sudah lebih dari tahun ke-3, masa berlaku lebih dari 31 Desember 2013, PV <-30

Proyek HPEQ yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan proyek dengan kinerja penyerapan paling baik, sisa waktu yang masih cukup panjang untuk penyelesaian (±18 bulan) dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja penyerapan menjadi lebih baik lagi.

Proyek dengan kinerja penyerapan kurang baik (*serious delay*) adalah PINTAR yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan untuk proyek ini sudah sangat terlambat, baru mencapai 0,25% sementara waktu terpakai sudah lebih dari 60%. Oleh karena itu perlu upaya khusus untuk percepatan dalam sisa waktu ±30 bulan sampai dengan proyek berakhir.

1.2. Pencapaian Output/Fisik

a. Pencapaian Output Proyek yang Berakhir Masa Berlakunya pada Triwulan II TA 2013

Pencapaian output untuk proyek USDRP yang sudah berakhir masa berlakunya pada triwulan ini cukup memuaskan, dimana sebagian besar indikator *output/intermediate result* (sebanyak 9 indikator) telah tercapai melampaui target. Salah satunya yang paling signifikan melampaui target yaitu persentase pemerintah kota yang terlibat dalam menyusun LED *City Development Strategy* yang ditargetkan sebanyak 60% dapat dicapai sampai dengan 100%, serta persentase pemerintah kota mengimplementasikan tindakan yang sesuai dengan strategi tersebut ditargetkan 50 % dapat dicapai hingga 100%. Sebanyak 2 indikator/*intermediate result* telah berhasil sesuai dengan target, sedangkan 2 indikator output lainnya hanya mampu mencapai 87,5% dari target yang ditetapkan. Proyek ini dinilai sebagai salah satu proyek yang sukses, sehingga diharapkan penanggung jawab proyek dapat menjaga keberlanjutan output dan melembagakan hasilhasilnya, salah satunya dengan cara membuat template atau panduan teknis pelaksanaan untuk memudahkan replikasi proyek dengan menggunakan dana Pemerintah.

Pencapaian *output* proyek FEATI yang juga sudah berakhir masa berlakunya pada triwulan ini juga cukup memuaskan. Indikator *output* yang berkaitan dengan partisipasi elemen masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan telah dicapai melampaui target, sementara itu beberapa indikator *output* yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan teknologi capaiannya sedikit lebih rendah dari target. Beberapa indikator PDO juga tidak dapat dicapai, diperkirakan disebabkan oleh kualitas data untuk evaluasi yang kurang akurat dan juga desain proyek yang kurang baik dimana target yang dibuat dalam PDO terlalu tinggi dan hubungannya dengan pencapaian *output* maupun *outcomes* kegiatan kurang signifikan. Hal ini merupakan pembelajaran untuk perencanaan proyek selanjutnya agar lebih hati-hati dalam merumuskan target dan indikator dalam PDO. Aspek relevansi antara kegiatan, *output* dan *outcome*, serta kemampuan untuk mencapai target sebaiknya diberikan porsi yang lebih besar dalam pertimbangan untuk memutuskan target yang akan dicapai.

b. Pencapaian Output Proyek yang Akan Berakhir Masa Berlakunya pada Tahun 2013

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat 1 proyek pinjaman Bank Dunia yang akan tutup pada 31 Desember 2013 yang realisasikeuangannya sudah mencapai 100 % yaitu proyek PNPM III. Dilihat dari pencapaian *output*-nya, data *Implementation Status and Result* (ISR) per-Maret 2013 menunjukkan bahwa sebagian indikator *output* (7 indikator) telah tercapai melampaui target, dan sebagian (7 indikator) lainnya masih dalam progres, saat ini capaian terakhir sedang dalam perhitungan dan diprediksikan telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Sebanyak 2 proyek lainnya yang akan tutup tahun ini dengan realisasi penyerapannya menunjukkan capaian sangat baik, yaitu BERMUTU dan Java Bali Power Restructuring & Strengthening juga sudah menunjukkan hasil yang baik dalam pencapaian target indikator output/intermediate result. Sebanyak 5 indikator output dari total sebanyak 7 indikator pada proyek BERMUTU sudah dicapai melampaui target yang ditetapkan, sedangkan 2 indikator lainnya sudah menunjukkan progres. Untuk proyek Java-Bali Power Restructuring & Strengthening dilaporkan bahwa persentase capaian fisik pada beberapa paket kegiatan sampai dengan triwulan II ini sudah melampaui capaian realisasi penyerapannya, sementara itu beberapa indikator output sudah tercapai, namun sebagian lainnya masih belum dapat dicapai karena beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sementara itu, untuk proyek-proyek yang akan tutup pada 31 Desember 2013 namun persentase penyerapan kumulatifnya masih dibawah 50% misalnya proyek GFMRAP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan belum menunjukkan progres dalam pencapaian *output*.

c. Pencapaian Output Proyek dengan Realisasi Penyerapan baik dan/atau serious delay

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk melihat kondisi pencapaian *output* pada proyek-proyek dengan capaian realisasi paling baik dan/atau serious delay. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya terdapat1 proyek pinjaman yang realisasi penyerapannya paling baik yaitu proyek HPEQ, sedangkan proyek dengan *serious delay* adalah proyek PINTAR.

Pada proyek HPEQ, dari 5 indikator *output/intermediate result* yang harus dicapai hingga 31 Desember 2014, pada triwulan sebelumnya baru terdapat 1 indikator *output* yang sudah mencapai target dan pada triwulan ini sebanyak 4 indikator lainnya masih dalam progres pencapaian target. Sedangkan pada proyek PINTAR meskipun sudah aktif semenjak tahun 2009, sampai dengan Triwulan II TA 2013 sebanyak 9 dari 10 indikator *output* belum tercapai, hanya 1 indikator *output* yang sudah tercapai yaitu implementasi GAAP. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pencapaian *output*.

Pencapaian *output* pada proyek lainnya yang tidak termasuk dalam kategori baik ataupun *serious delay* namun dapat dijadikan pembelajaran adalah pencapaian *output* pada proyek *Domestic Gas Market Development*, karena meskipun akan tutuppada tanggal 31 Maret Tahun 2014 (sudah pernah diperpanjang) namun pada triwulan II TA 2013 proyek ini sudah dapat menyelesaikan semua pekerjaannya, dan semua *output* dapat dianggap sudah tercapai. Sebanyak 4 dari 5 indikator *output* sudah tercapai pada tahun sebelumnya, sedangkan 1 indikator lainnya yaitu mengenai penyelesaian instalasi SCADA pada triwulan ini sudah mencapai 90% namun karena output ini bukan merupakan output utama sehingga Bank Dunia menyimpulkan bahwa semua *output* sudah tercapai dan

semua pekerjaan sudah dapat diselesaikan dengan baik meskipun masih tersisa waktu selama 3 triwulan sebelum *closing*. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Februari 2013 telah diajukan *cancellation* untuk dana yang belum terserap dan permintaan untuk memajukan tanggal penutupan proyek menjadi bulan Oktober 2013.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pada Bagian ini akan diuraikan berbagai permasalahan untuk proyek-proyek yang telah tutup pada triwulan ini atau akan segera tutup pada tahun 2013 serta permasalahan pada proyek-proyek yang membutuhkan tindak lanjut khusus, sedangkan permasalahan dan tindak lanjut secara keseluruhan untuk semua proyek dapat dilihat pada lampiran.

Pada proyek USDRP yang masa berlakunya berakhir pada triwulan ini, tidak terdapat permasalahan yang signifikan selama periode 1 triwulan terakhir, baik dalam penyerapan dana maupun pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output, sehingga proyek berhasil diselesaikan dengan baik dan diharapkan dapat direplikasi dengan dana pemerintah.

Untuk proyek FEATI pada triwulan terakhir masa berlakunya terdapat beberapa permasalahan diantaranya permasalahan revisi nomenklatur dan jangka waktu penerbitan PMK untuk revisi tersebut yang memakan waktu cukup lama, hal ini menyebabkanketerlambatan pelaksanaan kegiatan. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan meminta perpanjangan untuk administrasi selama 1 bulan.

Untuk proyek-proyek yang akan segera tutup pada akhir tahun 2013 terutama proyek-proyek dengan serious delay terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan agar kinerja proyek pada saat tutup dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan. Untuk proyek ERP Sumatera dan Sulawesi, diperkirakan terdapat sisa dana yang tidak dapat diserap sebesar USD 9,1 juta dan telah diajukan pembatalan. Pembelajaran penting dari proyek ini adalah dalam hal perencanaan, meskipun pelaksanaan proyek dinilai berhasil, namun sebagian komponen kegiatan sudah ada dan sudah dibiayai oleh sumber lain, hal ini menyebabkan dana pinjaman tidak terserap seluruhnya dan dilakukan pembatalan sebagian, oleh karena itu dalam perencanaan proyek selanjutnya perlu lebih berhati-hati dalam memasukkan komponen kegiatan yang akan didanai dari pinjaman luar negeri.

Pada proyek GFMRAP yang juga akan segera tutup pada akhir tahun 2013 dan mengalami serious delay, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, diantaranya kegiatan SPAN dan SAKTI yang mundur pelaksanaannya dan diperkirakan baru akan selesai pada Tahun 2015. Selain itu juga terdapat permasalahan uncommitted loan sebesar USD 14 juta yang akan digunakan untuk membayar *recurrent cost* sepanjang lima tahun hanya cukup untuk membiayai selama tiga tahun. Saat ini ada usulan untuk menutup kekurangan biaya tersebut dengan dana pemerintah dan realokasi dana antar kategori.

Proyek yang belum akan berakhir pada tahun 2013 namun juga mengalami *serious delay* adalah proyek PINTAR. Terdapat permasalahan yang sangat mempengaruhi keberlanjutan proyek yaitu Paket *core tax* yang merupakan inti dari kegiatan PINTAR gagal untuk dilaksanakan. Terdapat 2 alternatif solusi untuk permasalahan tersebut yaitu (i) pembatalan pinjaman atau (ii) restrukturisasi kegiatan. Tindak Lanjut yang akan segera dilakukan Bank Dunia adalah melaksanakan misi *appraisal* dan segera membuat rencana restrukturisasi.

Selain itu juga terdapat 2 proyek yang sedang diajukan perpanjangannya pada triwulan ini yaitu proyek DOISP dan IIFF. Proyek DOISP yang semula akan tutup pada 31 Desember 2013 saat ini sedang diajukan perpanjangan hingga tanggal 01 Juli 2015, sedangkan proyek IIFF yang semula juga akan tutup pada 31 Desember Tahun 2013, sedang diajukan perpanjangan hingga 30

November 2015. Permasalahan pada proyek DOISP diantaranya pengadaan beberapa paket yang membutuhkan waktu penyelesaian cukup panjang sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyerapannya tertunda sampai saat ini. Selain itu, paket-paket pekerjaan pada proyek DOISP ini nilainya terlalu kecil sehingga mengakibatkan konsultan lebih memilih untuk melakukan penarikan dana sekaligus di akhir, sehingga kinerja penyerapan dana proyek menjadi rendah, namun pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesungguhnya tetap berjalan dengan baik.

Untuk proyek IIFF yang dikelola PT. SMI yang merupakan proyek dengan realisasi penyerapan sangat rendah dan progres varian cukup tinggi, tidak terdapat permasalahan yang signifikan baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan dana. Upaya untuk mempercepat realisasi penyerapan terus dilakukan, pada bulan Juli TA 2013 akan ada penyerapan dana sebesar USD 40 Juta, kemudian pada bulan September ditargetkan tambahan penyerapan sebesar USD 20 Juta, dan pada awal Tahun 2014 sisa pinjaman akan terserap seluruhnya (USD 30 Juta). Sementara itu, pengkajian ulang terhadap indikator pencapaian PDO perlu untuk dilakukan karena indikator saat ini sulit untuk diukur dan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh PT.IIF masih berada dalam skala mikro dibandingkan dengan skala indikator capaian yang diharapkan.

Box 1. Upaya Strategis Penyelesaian Permasalahan Sistemik Pada Proyek

Kawasan Konservasi Vs. Lahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik Nasional

PT. PLN sebagai satu-satunya BUMN yang membantu pemerintah dalam menyediakan pasokan energi listrik nasional terus berupaya meningkatkan cakupan maupun kualitas layanannya kepada masyarakat. Melalui pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia saat ini terdapat 4 pinjaman proyek yang sedang berjalan, serta banyak proyek yang dibiayai oleh sumber pendanaan luar negeri lainnya. Dalam pelaksanaannya berbagai proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN tersebut berhubungan dengan kawasan konservasi/hutan. Sulitnya proses dan jangka waktu yang terlalu lama dalam pembebasan lahan berdampak pada berbagai aspek dalam proyek maupun di luar proyek seperti kontraktor dan masyarakat sekitar. Akibatnya, proyek sulit untuk diselesaikan dan mengalami perpanjangan.

Oleh karena itu, Bappenas sebagai lembaga yang terlibat mulai dari perencanaan, pemantauan hingga evaluasi proyek pinjaman luar negeri berupaya untuk mengurai permasalahan yang sistemik tersebut dengan meningkatkan koordinasi dan negosiasi dengan K/L terkait, dan tentunya juga dengan partisipasi aktif dari PT.PLN.

Langkah awal yang telah dirumuskan adalah PT. PLN selaku penanggung jawab proyek perlu mengidentifikasi proyek-proyek yang terkait dengan pembebasan lahan hutan/konservasi termasuk informasi lokasi, stakeholder terkait, permasalahan dan informasi rinci lainnya, untuk kemudian disampaikan secara tertulis kepada Bappenas (c.q Deputi Pendanaan Pembangunan). Berdasarkan surat tersebut Bappenas akan melakukan koordinasi strategis dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koordinator untuk merumuskan solusi terbaik terkait permasalahan pembebasan lahan hutan/konservasi tersebut. Sedangkan untuk perbaikan perencanaan kedepan, untuk proyek-proyek yang terkait dengan pembebasan lahan terutama kawasan hutan, sebelum efektif diupayakan untuk memastikan mengenai pembebasan lahan terlebih dahulu, meskipun tidak mungkin dilakukan pembebasan lahan secara keseluruhan namun setidaknya ada spot-spot tertentu yang pasti sudah dapat dilakukan pembebasan.

Proyek STATCAP-CERDAS yang dikelola oleh BPS juga mengalami permasalahan sistemik yang menghambat pelaksanaan proyek. Sampai saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan diantaranya melalui pembahasan khusus dengan *stakeholders* terkait. Dari berbagai pembahasan tersebut disepakati bahwa proyek tetap akan dilaksanakan tanpa banyak merubah desain awal, namun akan dilakukan pengurangan pinjaman untuk komponen-komponen yang sudah dibiayai dana pemerintah. Saat ini BPS sedang melakukan identifikasi dan penghitungan kembali untuk komponen-komponen tersebut.

Hasil Kunjungan Lapangan Proyek Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI)

Tujuan proyek FEATI adalah untuk mengembangkan sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pasar melalui peningkatan kemitraan antara kelompok petani, pemerintah, dan sektor swasta di berbagai tingkatan.

Pemantauan lapangan proyek FEATI yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat,



Komoditas dagang PT. Tani Jaya Makmur yang dikelola oleh perwakilan organisasi petani di Kab. Lombok Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk memantau *progress* pencapaian *output* proyek serta mengumpulkan berbagai pembelajaran dari kelima komponen kegiatan. Pihak-pihak yang ditemui antara lain tim pengelola FEATI di tingkat kabupaten, Kepala Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gunung Sari, kelompok tani Kecamatan Gunung Sari, dan pengelola lembaga ekonomi PT. Tani Jaya Makmur dan UD.Laba-Laba.

Komponen (A): penguatan sistem penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Pemilihan komoditas pembelajaran telah dilakukan melalui studi terhadap kebutuhan pasar, misalnya penangkaran benih padi. Tingginya permintaan pasar Kab. Lombok Barat terhadap bahan baku/mentah membuat kegiatan pembelajaran lebih diarahkan pada produksi daripada pemrosesan hasil. Pelaksanaan scaling-up FEATI terlihat dari telah terjalinnya kemitraan organisasi petani dengan supplier hotel di kawasan Senggigi dan Mataram untuk penyediaan sayur dan buah, serta dengan beberapa perusahaan swasta untuk penyediaan telur asin dan bibit sayur. Selain itu, telah terbentuk lembaga ekonomi PT. Tani Jaya Makmur dan UD Laba-laba yang

bergerak sebagai sub-distributor produk pertanian

Komponen (B): penguatan kelembagaan dan kemampuan petugas penyuluhantelah dilaksanakan melalui berbagai pelatihan bagi petugas penyuluh lapangan setempat dan perbaikan infrastruktur. dibangun 2 gedung Badan Penyuluh Pertanian (BPP) baru dan renovasi 8 gedung BPP kecamatan. Kegiatan kaji tindak merupakan suatu inovasi yang diinisiasi oleh kantor **BPP** untuk memberikan pelatihan kepada penyuluh melalui metode learning by practice.



Salah satu hasil renovasi gedung BP3K yang aktif digunakan sebagai pusat informasi dan pertemuan penyuluh dan petani

Komponen (C) peningkatan kapasitas pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) provinsi, aktif dalam memberikan pelatihan, demplot, serta pendampingan penggunaan inovasi teknologi terbaru. Selain itu, petani dapat memanfaatkan laboratorium BPTP untuk melakukan uji laboratorium terhadap produk pupuk sebelum dipasarkan. Demikian halnya dengan komponen (D) perbaikan pelayanan informasi dan teknologi untuk petani, petani di Lombok Barat telah dapat lebih cepat mengakses informasi harga produk pertanian di pasar, baik menggunakan internet maupun melalui telepon seluler. Hal ini membantu petani untuk menentukan komoditas yang akan ditanam, dijual, atau dipasarkan pada waktu tertentu. Sedangkan pada komponen (E) penguatan dan perbaikan dukungan kebijakan dan manajemen penyuluhan, telah dilaksanakan pelaporan kegiatan, audit, pertemuan koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi FMA bagi TPL dan koordinator BPP di wilayah kerja masing-masing.

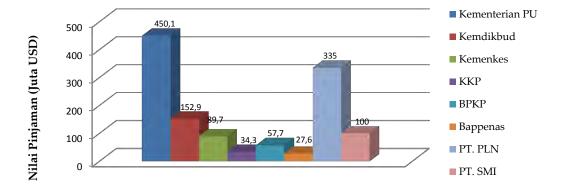
Hambatan utama proyek ini adalah pada pengelolaan anggaran dan pergantian pengelola UP FMA dan penyuluh lapangan. Selain keterlambatan akibat seringnya kesalahan penomoran dalam DIPA, peruntukkan dana pinjaman yang berasal dari DIPA Pusat dinilai belum mampu menangkap kebutuhan kabupaten yang beragam. Dukungan dana pemerintah daerah dinilai belum mampu mendukung kebutuhan kegiatan penyuluhan.

Peningkatan kapasitas dan akses petani terhadap informasi dan teknologi pertanian melalui proyek FEATI, dan didukung dengan partisipasi masyarakat yang tinggimemotivasi petani untuk kembali mengelola lahan tani dan melakukan perbaikan manajemen pertanian. Ke depan, peningkatan akses modal bagi petani/poktan menjadi kebutuhan untuk melakukan perluasan kegiatan.

ADB

Pinjaman proyek yang dibiayai oleh *Asian Development Bank* (ADB) pada triwulan II TA 2013 terdiri dari 17 proyek dengan total nilai pinjaman sebesar USD 1.247,45 juta. Pada triwulan ini, tidak ada proyek pinjaman ADB yang baru efektif atau berakhir masa berlakunya.

Dari total 17 pinjaman proyek tersebut, berdasarkan instansi pelaksananya dikelola oleh 6 Kementerian/Lembaga dan 2 BUMN seperti yang ditunjukkan oleh diagram berikut ini:



Gambar 4. Jumlah Pinjaman Proyek ADB Berdasarkan Instansi Pelaksana

Jumlah pinjaman terbesar dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total nilai mencapai USD 450,1 juta yang terdiri dari 6 proyek, sedangkan nilai pinjaman terkecil adalah yang dikelola

oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu sebanyak 1 proyek dengan nilai USD 27,6 juta.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Sampai dengan bulan Juni 2013, secara kumulatif nilai pinjaman proyek ADB yang telah terserap mencapai USD 658,77 juta (52,80%). Nilai tersebut naik USD 39,83 juta dari total nilai penyerapan kumulatif triwulan sebelumnya sebesar USD 618,94 juta. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman ADB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman ADB Posisi Bulan Juni 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab (ekuivalen juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	_	rapan ulatif	Pinjaman Belum	Pen	yerapan TA 2	013
	Tenunggung juwub	Tioyex	1 mjaman	Jumlah	%	Ditarik	Target	Realisasi	%
Dilaks	sanakan oleh K/L	13	812,45	360,22	44,37	452,23	119,70	52,05	56,73
1	KemenPU	6	450,10	150,29	33,39	299,81	99,35	23,58	23,73
2	Kemendikbud	2	152,90	81,31	53,17	71,59	12,00	17,95	149,58
3	Kemenkes	2	89,70	80,85	90,13	8,85	5,17	3,32	64,27
4	KKP	1	34,40	32,03	93,10	2,37	1,30	3,79	291,77
5	BPKP	1	<i>57,7</i> 5	1,46	2,52	56,29	2,90	1,46	50,17
6	Bappenas	1	27,60	14,28	51,73	13,32	5,20	1,95	37,42
Diteru	ıspinjamkan (SLA)	4	435,00	298,56	68,63	136,44	108,65	17,69	16,28
7	PT. PLN	3	335,00	227,43	67,89	107.57	102,45	17,69	17,26
8	PT. SMI	1	100,00	71,13	71,13	28.87	6,20	0	0
	Total	17	1.247,45	658,77	52,80	588,77	234,57	69,74	29,73

Selama Triwulan II 2013, telah terjadi penyerapan sebesar USD 39,83 juta, sehingga penyerapan kumulatif hingga periode ini tercatat sebesar USD 658,77 juta dari sebelumnya USD 618,94 juta. Jika dibandingkan dengan target penyerapan TA 2013, penyerapan hingga triwulan ini baru mencapai 29,73 % dari target USD 234.57 juta. Oleh karena itu, beberapa strategi percepatan penarikan pinjaman telah dilakukan dan diharapkan agar target penyerapan TA 2013 dapat dicapai tepat pada waktunya.

Sebagian besar dari proyek-proyek yang akan berakhir masa berlakunya tahun ini telah menyerap >90% dari total pinjaman, di antaranya adalah *Rural Infrastructure Project* (RIS) PNPM 2 (98,27%), *Vocational Education Strengthening Project* (97,96%), dan *Sustainable Aquaculture Development for Food Security* (93,10%). Dua proyek lain yang akan habis masa berlakunya tahun ini yaitu *Decentralized Health Service* dan *Renewable Energy Development* masing-masing telah menyerap sebesar 83,38% dan 82,26%.

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Secara umum, proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh ADB pada triwulan II 2013 telah menunjukkan *progress* yang positif. Sebanyak 8 dari 17 proyek akan berakhir pada tahun 2013, dan sebagian besar diperkirakan dapat memenuhi target *output* yang telah ditetapkan.

Di sektor pendidikan, proyek *Vocational Education Strengthening Project* (INVEST) telah melalui survei yang dilakukan oleh konsultan independen dan dinyatakan telah mencapai 98 % dari target *Design Monitoring Framework (DMF)*. Proyek yang akan berakhir pada bulan November 2013 ini mendapatkan apresiasi positif dan akan dilanjutkan dengan mengembangkan sekolah model dan aliansi melalui pembiayaan APBN. Keberhasilan proyek INVEST ini telah dipresentasikan di Timor Leste dan Thailand. Untuk kegiatan *Polytechnic Education Development Project* (PEDP), telah dilaksanakan seleksi politeknik yang akan mengikuti program dan sedang dalam persiapan pengadaan untuk beberapa paket pekerjaan.

Kegiatan *State Accountability Revitalization Project* (STAR) mengalami perkembangan pelaksanaan kegiatan yang positif. Sejak efektif pada triwulan I tahun 2013, kegiatan ini telah berhasil mencapai target output untuk program *non-degree* (sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/JFA) dengan realisasi sebanyak 2.009 peserta yang terdaftar dari target sebesar 915 peserta pada tahun 2013. Peserta program *degree* juga mencapai target dengan pendaftar sebanyak 422 orang dari target 329 calon mahasiswa pada tahun 2013. Adapun komponen lain seperti Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMA) dan *elearning* baru saja dimulai dan tidak mengalami kendala berarti. Kegiatan STAR menjadi contoh sukses pelaksanaan proyek yang tidak mengalami keterlambatan pada tahun pertama pelaksanaan kegiatan(*non-start up delay*).

Di sektor pemberdayaan masyarakat, proyek-proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mendapatkan nilai yang positif. Catatan dari proyek ini adalah penyesuaian waktu proyek karena adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri proyek PNPM yang didanai dana pinjaman pada Desember 2014. Khusus untuk proyek Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri II (RIS PNPM II) yang akan berakhir pada bulan September 2013, output kegiatan pada umumnya telah tercapai, namun masih ada kegiatan yang akan dilakukan yaitu pelatihan bagi kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) yang akan dilaksanakan setelah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disetujui.

Proyek lain yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2013, yaitu Sustainable Aquaculture Development for Food Security (SAFVER), Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF) Company Project dan Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri yang diperkirakan akan menyelesaikan seluruh kegiatan fisik pada akhir tahun 2014. Ketiga proyek tersebut tidak mengalami permasalahan yang signifikan dalam pencapaian indikator output.

Namun demikian, masih ada beberapa proyek yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Proyek-proyek tersebut telah menunjukkan progress pencapaian namun mengalami keterlambatan pada beberapa aspek. Proyek-proyek yang dimaksud adalah ICWRMIP-Project 1, IRSDP, Metropolitan Sanitation Management and Health Program(MSMHP), dan Regional Roads Development Project (RRDP).

Untuk ICWRMIP-Project 1, target pembangunan fisik rehabilitasi Saluran Tarum Barat belum tercapai dan mengalami keterlambatan akibat persoalan *resettlement*. Komponen

kegiatan ICWRMIP-Project 1 yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga belum dapat dicapai (0%) karena persoalan perbedaan persepsi terhadap *ADB's Procurement Guidelines*. Upaya khusus yang dilakukan untuk mempercepat kinerja pelaksanaan proyek tersebut adalah dengan penyusunan surat kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dan surat Kementerian PU, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) *resettlement*.

Untuk IRSDP, sampai dengan saat ini terdapat satu sub-proyek yang siap dilaksanakan yaitu *Bandung Waste to Energy*. Selanjutnya, proyek IRSDP akan menentukan kembali prioritas-prioritas sub-proyek mana saja yang akan dilanjutkan. Beberapa sub-proyek dalam IRSDP yang dianggap layak untuk dilanjutkan adalah *Batam Solid Waste Management*, *Malioboro Pedestrianization Project*, dan *Lamongan Water Supply Project*.

Perkembangan pencapaian fisik kegiatan (MSMHP) tidak sesuai dengan target karena mengalami keterlambatan khususnya untuk paket pekerjaan di Kota Medan, yaitu paket 2, 3, 4, dan 5 yang realisasi pencapaiannya di bawah 15% dari target. Keterlambatan pembangunan fisik mencapai diperkirakan akan mencapai 2-6 bulan akibat mundurnya perolehan rekomendasi dan izin penggalian dari Walikota Medan dan Dinas Bina Marga Kota Medan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan juga dialami pada kegiatan *Regional Roads Development Project* (RRDP). Kegiatan ini sudah hampir berjalan satu tahun, namun masih mengalami keterlambatan dalam pengadaan dan menghadapi isu *land acquisition* untuk tiga paket pekerjaan di Kalimantan Barat. Proyek lain yang mengalami keterlambatan adalah *Java Bali Electricity Distribution Performance* yang mengalami keterlambatan administratif dalam pengadaan. Proses pengadaan diharapkan akan selesai dalam waktu dua belas bulan, dan oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian khusus sehubungan dengan diadakannya pemilihan umum (Pemilu) tahun depan.

Sementara itu, ada tiga proyek yang mengalami keterlambatan serius (serious delay) pada periode triwulan II 2013. Proyek Decentralized Health Services (DHS) II masih memiliki progress pelaksanaan batch 4A dan 4B di bawah 50% untuk pekerjaan fisik rekonstruksi dan rehabilitasi di Provinsi Sumatera Barat. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan mengingat kegiatan ini juga akan berakhir pada tahun 2013. Executing Agency akan memantau pelaksanaan civil work secara intensif dan mengambil langkah-langkah percepatan untuk menghindari perpanjangan loan.

Adapun kegiatan *Renewable Energy Development* (RED) dan *Power Transmission Improvement* (PTI) diperkirakan tidak akan mencapai output yang telah ditagetkan pada masa tutup proyek, sehingga kedua kegiatan tersebut akan tetap dilanjutkan dengan biaya PT PLN.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pada triwulan II TA 2013, terdapat 4 proyek yang menunjukan angka $PV \leq -30$ atau masuk dalam kategori *serious delay*. Ketiga proyek tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan perbandingan status PV pada triwulan I TA 2013.

Tabel 11. Pinjaman Pinjaman ADB dengan PV ≤ -30 (Triwulan I, 2013 dan Triwulan II, 2013)

No.	Nomor	Nama Proyek	Tanggal	Tanggal	TA 2	2013
INO.	Loan	Nama Proyek	Efektif	Tutup	TW I	TW II
Keme	nterian Pekerja	an Umum				
1	2500-INO	Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP- Project 1)	03/06/2009	30/06/2014	-70,85	-75,76
2	2501-INO (SF)	Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP- Project 1)	03/06/2009	30/06/2014	-38,18	-41,54
Keme	nterian PPN/Ba	ppenas				
3	2264-INO (SF)	Infrastructure Reform Sector Dev. Program	29/11/2006	30/08/2014	-36,30	-33,23
PT. PLN						
4	4 2619-INO JavaBali Electricity Distribution Performance			31/10/2014	-50,16	-42,87

Salah satu permasalahan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan serius (serious delay) pada proyek pinjaman ADB di triwulan II 2013 adalah perbedaan persepsi penggunaan procurement guidelines antara tim lelang implementing agency dan ADB. Permasalahan ini terjadi pada proyek ICWRMIP-Project 1, dimana tim lelang Kementerian Lingkungan Hidup memiliki pemahaman yang berbeda terhadap penggunaan ADB Procurement Guidelines sehingga belum dapat memulai proses pengadaan. Keterlambatan ini berpotensi menyebabkan output peningkatan kualitas air sungai Citarum tidak dapat tercapai dan mempengaruhi pencapaian outcome proyek secara keseluruhan. Permasalahan lain yang terjadi di ICWRMIP-Project 1 adalah permasalahan resettlement yang mendorong timbulnya inisiasi penggunaan Country Safeguard System (CSS). Selain itu, telah dilakukan pula penyusunan surat kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dan surat Kementerian PU, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) resettlement.

Mengenai kurangnya kesesuaian antara desain proyek dan implementasi di lapangan pada proyek IRSDP, Bappenas telah meminta PMU untuk mengidentifikasi ulang sub-proyek apa saja yang akan dilanjutkan maupun dihentikan. Satu sub-proyek yang telah siap untuk dilaksanakan adalah Bandung Waste to Energy. Tiga sub-proyek lainnya yaitu BatamSolid Waste Management, Malioboro Pedestrianization Project, dan Lamongan Water Supply Project dianggap layak untuk dilanjutkan. Adapun proyek Java Bali Electricity Distribution Performance yang dikelola oleh PT. PLN sebelumnya terkendala mekanisme pembayaran dengan AFD dengan menggunakan rekening khusus. Proyek ini tengah menyelesaikan proses pengadaan dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan.

Permasalahan lain yang patut menjadi catatan pada triwulan II 2013 adalah keterlambatan pencairan DIPA yang terjadi pada proyek RIS PNPM II dan SAFVER. Upaya percepatan telah dilakukan agar kedua proyek yang berakhir masa berlakunya di tahun 2013 ini dapat selesai tepat waktu.

3. Laporan Kunjungan Lapangan

a. State Accountability Revitalization Project (STAR)

Proyek STAR bertujuan untuk mendukung prioritas reformasi pemerintah dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah melalui penguatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan pada tingkat pusat dan daerah. Kegiatan STAR telah efektif sejak

tanggal 19 Februari 2013 dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2017. Proyek ini terdiri dari berbagai kegiatan seperti (i) program gelar, (ii) program non-gelar, (iii) e-learning, (iv) pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), (v) overseas training, dan (vi) pengawasan lintas sektor. Pada triwulan II 2013, telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke Kota Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya untuk memantau kesiapan pelaksanaan proyek ini.

Pada kunjungan lapangan tersebut, dilaksanakan pertemuan dengan BPKP DIY, BPKP Provinsi Jawa Tengah, BPKP Provinsi Jawa Timur; Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; Pemerintah Kota Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya; serta tiga universitas yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Airlangga. Kunjungan ketiga kota tersebut lebih banyak membahas persiapan untuk program gelar, di antaranya mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan program studi S-2 dan mekanisme seleksi mahasiswa. Isu lain yang muncul adalah keinginan untuk menjadikan beberapa universitas yang dikembangkan sebagai *center of excellence*, seperti Universitas Airlangga. Tidak tertutup kemungkinan pula dilaksanakan *twinning* program bagi universitas-universitas di Indonesia Timur yang belum memenuhi syarat akreditasi yang telah ditetapkan, sebagai contoh kerjasama antara Universitas Udayana dengan Universitas Nusa Cendana.

Hasil pembahasan lain yang didapatkan adalah adanya keinginan untuk menjadikan STAR sebagai salah satu success project sehingga dapat dilanjutkan untuk dibiayai menggunakan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, isu yang mengemuka adalah mengenai *living allowance* yang diusulkan untuk mengalami kenaikan. Batas *living allowance* untuk proyek ini telah sesuai dengan APBN yaitu Rp 1.500.000,00; namun tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan tambahan dari pemerintah daerah masing-masing.

Catatan lain adalah perlunya pemahaman untuk menilai proyek ini tidak semata-mata pada penyerapan yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Yang harus diperhatikan adalah committed funding yang sudah ditetapkan untuk proyek ini. Sebagai proyek yang berhubungan dengan pendidikan tinggi, proyek ini memiliki masa waktu tertentu kapan tuition fee harus dibayarkan. Sebagai contoh, pada periode April-Juni proyek ini belum membayarkan tuition fee untuk mahasiswa yang dibiayai dalam STAR. Namun pada bulan September, seluruh tuition fee untuk mahasiswa tersebut akan dibayarkan serentak dalam periode waktu yang sama.

b. Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (USRI)

Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandirimerupakan kegiatan yang didanai dari pinjaman yang bersumber dari Ordinary Capital Resources (OCR) ADB sebesar 100 juta USD dan digunakan untuk mendanai 2 (dua) komponen utama kegiatan, yakni: (i) kegiatan perbaikan dan peningkatan infrastruktur perdesaan di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung; dan (ii) kegiatan perbaikan dan peningkatan sanitasi masyarakat pada lokasi phasing out Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) PNPM Mandiri di 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini efektif pada tahun 2011 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Bappenas telah melaksanakan kunjungan lapangan proyek USRI ke Provinsi Jawa Timur, yaitu ke Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Selain itu, Bappenas

juga melakukan kunjungan lapangan kegiatan RIS PNPM yang berada di bawah proyek USRI ke Provinsi Jambi.

Dalam kunjungan ke Provinsi Jambi, dilaksanakan pemantauan di empat desa yaitu Desa Pematang Kabau dan Desa Sumurung di Kecamatan Air Hitam, serta Desa Manunggal Makmur dan Desa Suka Maju di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, Bappenas juga melakukan dialog dengan asisten Bupati Tanjung Jabung Timur mengenai bantuan RIS PNPM yang diberikan oleh ADB. Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka evaluasi ruang lingkup kegiatan, pengaturan pelaksanaan, pencapaian target, status dan progress komponen kegiatan, kinerja konsultan dan fasilitator, kapasitas lembaga, kecukupan alokasi dana, penyerapan dana pinjaman, dan penyampaian output kegiatan.

Secara umum, proyek ini memberikan dampak yang positif dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa-desa. Keberhasilan pembangunan infrastruktur pedesaan ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat. Adapun hambatan yang dialami di proyek adalah masih kurangnya jumlah fasilitator kegiatan yang membantu proses pelaksanaan proyek.



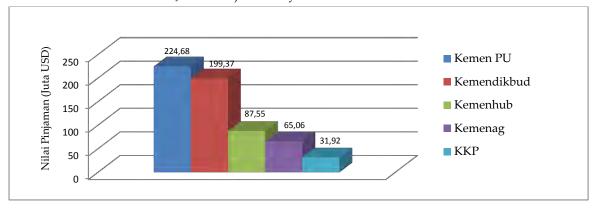
Pembangunan MCK di Kelurahan Kepel, Kabupaten Pasuruan



Gorong-gorong di Desa Suka Maju, Kec. Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sementara itu, kunjungan ke Provinsi Jawa Timur dilakukan di tiga kota/kabupaten yaitu Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo. Dalam kunjungan ini, dilakukan pemantauan terhadap kegiatan perbaikan dan peningkatan sanitasi masayarakat di ketiga wilayah tersebut. Masih ada beberapa permasalahan yang mengganggu proses pelaksanaan kegiatan, di antaranya adalah keterlambatan pembayaran untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sulitnya pengerjaan proyek karena dilakukan di pemukiman padat penduduk, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas MCK. Hambatan ini menjadi bahan evaluasi untuk melakukan upaya-upaya pembenahan dan percepatan pencapaian output di masa yang akan datang.

Selama Triwulan II TA 2013, jumlah pinjaman IDB yang sudah efektif dan sedang dalam pelaksanaan sebanyak 24 pinjaman proyek (Financing Agreement) dengan total nilai pinjaman sebesar USD 608,58 juta. Nilai penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Juni 2013 sebesar USD 172,49 juta. Pinjaman IDB digunakan oleh 5 (lima) kementerian/lembaga.



Gambar 5. Jumlah Pinjaman Proyek IDB Berdasarkan Instansi Pelaksana

Jumlah pinjaman terbesar dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total nilai pinjaman mencapai USD 224,68 juta yang terdiri dari 5 (lima) pembiayaan, sedangkan nilai pinjaman paling rendah adalah yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu sebanyak 1 (satu) proyek dengan nilai USD 31,92 juta.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman IDB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman IDB Posisi Bulan Maret 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(ekuivalen juta USD)

	Instansi			Penyer	apan	Pinjaman	Penyerapan TA 2013			
No.	Penanggung	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Kumu	latif	Belum	т	D 1' '	0/	
	Jawab	Tioyek	1 iiijaiiiaii	Nilai	%	Ditarik	Target	Realisasi	%	
1	KemenPU	5	224,68	142,49	63,41	82,19	32,46	25,63	78,98	
2	Kemendikbud	12	199,37	16,79	8,42	182,58	40,44	11,73	29,00	
3	Kemenhub	1	87,55	0,09	0,10	87,46	11,06	0,02	0,18	
4	Kemenag	5	65,06	5,41	8,31	59,65	1,31	1,82	139,17	
5	KKP	1	31,92	7,71	24,15	24,21	12,00	1,39	11,58	
	Total	24	608,58	172,49	28,34	436,09	97,26	40,59	41,73	

Nilai penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Juni tahun 2013 untuk 24 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga mencapai USD 172,49 juta atau sebesar 28,34% dari total nilai seluruh pinjaman proyek. Sementara pada periode Januari-Juni TA 2013, penyerapan pinjaman baru mencapai USD 40,59 juta atau 41,73% dari target penyerapan TA 2013.

Progres Varian

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2013 diidentifikasi sebanyak 17 (tujuh belas) pembiayaan proyek dengan nilai PV ≤ -30, yang artinya sangat lambat pelaksanaannya (*serious delay*). Permasalahan utama yang menyebabkan proyekproyek ini mengalami keterlambatan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan. Terkait hal ini, perlu dilakukan komunikasi yang intensif dengan pihak IDB dan meningkatkan pemahaman PMU terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa. Sebagai tindak lanjut atas laporan ini, Bappenas akan mengadakan workshop pengadaan barang dan jasa pada Triwulan III TA 2013, dengan mengundang langsung *Procurement Specialist* dari IDB Jeddah.

Tabel 13. Pinjaman Pinjaman IDB Dengan Nilai PV ≤-30 (Triwulan I TA 2013 dan Triwulan II TA 2013)

			Tanggal	Tanggal	TA 2	2013
No.	Nomor Loan	Nama Proyek	Efektif	Tutup	TW I	TW II
1	IND-113 (Installment Sale)	The Reconstruction of IAIN Ar Raniry	13/12/2006	10/06/2013	-97,01	-99,12
2	IND-115 (Installment Sale)	North Sumatera University Hospital	23/12/2006	31/03/2013	-100,00	-100,00
3	IND-121 (Istisna'a)	Dev. of Belawan and Sibolga Fishing Port	15/07/2008	30/11/2014	-54,05	-53,61
4	IND-126 (Istisna'a)	Upgrading & Dev. of The SIU of Sunan Gunung Djati	06/07/2008	31/12/2013	-65,61	-60,40
5	IND-127 (Installment Sale)	Upgrading & Dev of The SIU of Sunan Gunung Djati	06/07/2008	31/12/2013	-84,43	-88,97
6	IND-130 (loan)	Development Upgrading of the UNJ	12/04/2009	31/05/2013	-42,72	-46,76
7	IND-133 (Istisna'a)	Development of Belawan Port Phase I	01/05/2010	14/06/2014	-70,68	-76,71
8	IND-137 (Istisna'a)	The Dev. of MERC and Two Univ. Hosp	26/02/2011	31/12/2014	-54,42	-60,57
9	IND-138 (Installment Sale)	The Dev. of MERC and Two Univ. Hosp	26/02/2011	31/12/2014	-54,09	-60,90
10	IND-140 (Istisna'a)	The Quality Improvement of UNPAD	24/07/2011	24/10/2015	-39,67	-45,52
11	IND-141 (Installment Sale)	The Quality Improvement of UNPAD	24/07/2011	24/10/2015	-39,67	-45,52
12	IND-147 (Loan)	PNPM-ICDD II	24/09/2011	31/12/2013	-59 , 52	-44,13
13	IND-152 (Loan)	Dev & Quality Improv of State Univ of Semarang	28/11/2011	31/12/2014	-36,98	-37,93
14	IND-153 (Istisna'a)	Dev & Quality Improv of State Univ of Semarang	28/11/2011	31/12/2014	-43,24	-51,18
15	IND-154 (Installment Sale)	Dev.& Quality Improv of State Univ of Semarang	28/11/2011	31/12/2014	-43,31	-51,37
16	IND-157 (Istisna'a)	Development of IAIN Sunan Ampel	28/11/2011	28/11/2015	-32,97	-39,28
17	IND-158(Installment Sale)	Development of IAIN Sunan Ampel	28/11/2011	28/11/2015	-33,47	-39,70

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Secara umum, proyek-proyek yang didanai oleh IDB sedang berada dalam penyelesaian pekerjaan konsultansi dan memasuki tahap pembangunan fisik. Selain itu, terdapat proyek-proyek yang hampir menyelesaikan pekerjaan fisik yaitu pembangunan UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pencapaian *output* pekerjaan fisik di UIN Sunan Gunung Djati saat ini mencapai 85% dan direncanakan akan selesai pada bulan November 2013. Sementara itu, pencapaian *output* pekerjaan fisik di UNJ hampir mencapai 80% dimana proyek ini direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2013.

Untuk proyek *The Development and Quality Improvement of IAIN Sunan Ampel Surabaya, The Development and Quality Improvement of Semarang State University,* dan *The Development and Upgrading the State University of Padang,* ketiganya berada dalam proses kontrak konsultan

dan diharapkan dapat segera menyelesaikan desain pembangunan proyek. Adapun proyek *The Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* saat ini telah memenuhi seluruh *output* untuk pembangunan pelabuhan di Sibolga dan saat ini dalam tahap penetapan pemenang kontraktor untuk pembangunan pelabuhan ikan di Belawan. Terkait pelaksanaan pekerjaan di Belawan, saat ini prosesnya mengalami keterlambatan akibat lamanya proses Penetapan Pemenang di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proyek *Development of North Sumatera University Hospital* sudah memenuhi seluruh indikator *output* pekerjaan fisik dan saat ini menunggu proses pengadaan peralatan yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2013. Untuk proyek PNPM ICDD *phase* II telah memenuhi hampir seluruh indikator *output* sesuai target pelaksanaan yang direncanakan.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian

Berdasarkan hasil pemantauan pada Triwulan II TA 2013, secara umum permasalahan utama yang dihadapi masih berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman PMU terhadap dokumen procurement guidelines IDB. Beberapa proyek yang mengalami masalah dalam pengadaan barang dan jasa adalah Rehabilitation, Reconciliation, and Upgrading of State University(UNP) of Padang; Development and Upgrading of Padjadjaran University – Bandung (UNPAD); the Development and Upgrading of State University of Semarang/UNNES – Semarang; dan Upgrading & Development of the UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) - Bandung. Atas permasalahan tersebut, Bappenas telah melakukan koordinasi dengan pihak PMU masing-masing perguruan tinggi untuk melakukan review guna percepatan pelaksanaan tender. Saat ini kontrak konsultan untuk pekerjaan desain (DEDC) pada proyek UNPAD – Bandung dan UNP Padang telah ditandatangani, dan konsultan sedang dalam pelaksanaan.

Pada akhir triwulan II 2013, terdapat satu proyek yang berakhir masa berlakunya yaituIND 131 (InstallmentSale) The Reconstruction of IAIN Ar Raniry- Aceh. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisik (bangunan) telah diselesaikan pada akhir tahun 2012. Installment Sale (IND 113) ini digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan, adapun pekerjaan fisik telah selesai pada akhir tahun 2012. Atas usulan ini, Bappenas telah mengadakan beberapa pertemuan koordinasi, diantaranya pada tanggal 14 Juni 2013 yang dihadiri oleh pihak IAIN Ar-Raniry (Rektor dan PMU), Kementerian Agama (Sesditjen dan Biro Perencanaan), Kementerian Keuangan dan Dit. Pendidikan serta Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa proyek ini akan diperpanjang selama 6 (enam) bulan (hingga Desember 2013) apabila IDB memberikan NOL atas evaluasi hasil lelang (PQ). Namun demikian, pada tanggal 10 Juli 2013, IDB menyampaikan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan tidak sesuai dengan IDB Procurement Guideline dan dinyatakan gagal (harus dilakukan tender ulang). Bappenas merekomendasikan untuk tidak memperpanjang loan ini dan meminta agar proyek ini dilanjutkan menggunakan anggaran pemerintah. Rekomendasi ini atas pertimbangan bahwa 1) Proyek telah mengalami 3 kali perpanjangan akibat keterlambatan proses pengadaan. Perpanjangan ke-4 dinilai sudah tidak efektif lagi dan mengganggu kinerjapelaksanaan pinjaman IDB secara keseluruhan; 2) Mengingat proses tender hingga saat ini belum dapat diselesaikan, maka tidak ada kepastian bahwa proyek ini akan dapat diselesaikan hingga bulan Juni 2014, apabila permohonan perpanjangan disetujui; 3) Apabila proyek ini dibiayai dari dana pemerintah, proses pengadaannya diharapkan dapat dilaksanakan oleh PMU karena mengacu pada mekanisme pengadaan dengan ketentuan pengadaan pemerintah. Pada tanggal 19 Juli 2013, Bappenas menyampaikan rekomendasi untuk tidak memperpanjang proyek ini melalui surat kepada Dirjen Pengelolaan Utang,

Kementerian Keuangan. Bappenas juga menyampaikan rekomendasi kepada Sekjen Kemenag untuk dapat melakukan pembiayaan atas proyek ini menggunakan dana rupiah.

Multilateral Lain

Pinjaman luar negeri dari lembaga-lembaga Multilateral lain pada Triwulan II TA 2013 terdiri dari 4 (empat) proyek dari IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) dan 1 (satu) proyek dari *Saudi Fund*, dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 197,38 juta.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

Proyek proyek tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) Kementerian/Lembaga dengan realisasi penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan II TA 2013 mencapai 33,90% dari total nilai pinjaman atau senilai USD 66,91 juta. Realisasi penyerapan untuk proyek-proyek IFAD mencapai ekuivalen USD 71,37 juta, sedangkan untuk pinjaman Saudi Fund belum ada penyerapan sampai saat ini. Informasi lebih rinci mengenai kinerja penyerapan pinjaman dari lembaga-lembaga Multilateral lain berdasarkan instansi penanggung jawabnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Multilateral Lain Posisi Bulan Juni 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(ekuivalen Juta USD)

	Instansi Penanggung	Jumlah	Nilai	Penyerapar	Kumulatif	Pinjaman	Peny	erapan TA 2	013
No	Jawab	Proyek	Pinjaman	Nilai	%	Belum Ditarik	Target	Realisasi	%
IFAL	IFAD		162,21	71,37	43,99	90,84	16,99	4,12	24,25
1	Kementan	2	66,72	20,11	31,98	46.61	8,83	4,09	46.42
2	Kemendagri	1	62,88	50,89	80,94	11,98	0,00	0,00	0,00
3	KKP	1	31,78	0,00	0,00	31,78	8,08	0,00	0,00
SAU	DI FUND	1	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
4	Kemendikbud	1	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5	197,38	66,91	33,90	130,48	16,91	0,00	0,00

Adapun proyek-proyek pinjaman IFAD adalah (1) Rural Empowerment and Agriculture Development (READ); (2) Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID); (3) National Programme for Community Empowerment in Rural Area; dan (4) Coastal Community Development Project. Sedangkan proyek pinjaman Saudi Fund adalah Construction of Two University Hospitals in Sebelas Maret University and Andalas University Project.

Progress Varian

Terdapat 1 (satu) proyek pinjaman dari lembaga Multilateral Lain yang memiliki progress varian ≥-30 (serious delay) yaitu proyek Construction of Two University Hospitals in Sebelas Maret University and Andalas University Project. Proyek ini merupakan proyek pinjaman Saudi Fund yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai progress varian mencapai -45,48. Nilai tersebut belum mengalami perbaikan dari nilai progress varian pada pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar -40,50.

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Pada Triwulan II TA 2013 terdapat 1 (satu) proyek Multilateral Lain yang menyampaikan laporan pencapaian kinerja *output* yaitu *Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)* yang didanai oleh IFAD. Pada proyek SOLID, pencapaian indikator kinerja *output* kelompok mandiri yang dibina, untuk Triwulan II TA 2013 telah mencapai 72% dari target total 496 kelompok. Adapun untuk indikator kinerja *output* 64 federasi yang ditargetkan untuk dibina telah tercapai seluruhnya. Indikator *output* yang belum tercapai adalah jumlah demonstrasi plot (demplot) yang dibina. Target hingga triwulan ini adalah sebesar 43% dari 230 demplot, namun baru dapat tercapai sebesar 6%.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang terjadi selama Triwulan II TA 2013 untuk masing-masing proyek yang didanai oleh IFAD dan *Saudi Fund* akan diuraikan dengan rinci agar dapat diketahui langkah-langkah terbaik untuk menindaklanjutinya sebagai berikut:

a. Rural Empowerment and Agriculture Development (READ)

Permasalahan yang dihadapi proyek ini dari triwulan sebelumnya adalah revisi DIPA yang baru selesai pada bulan Mei 2013 (pertengahan Triwulan II), dan pelaksanaan pengadaaan yang menghabiskan waktu terlalu lama sehingga mengakibatkan keterlambatan pada proyek. Amandemen untuk *loan*telah diajukan dan saat ini sedang menunggu tanggapan dari pihak IFAD. Percepatan perlu dilakukan baik di pihak IFAD maupun pelaksana proyek, agar kinerja proyek meningkat.

b. Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)

Tahun ini direncanakan akan dilakukan pembentukan desa binaan baru yang membutuhkan dana yang cukup besar.Namun karena kinerja penyerapan proyek yang rendah pada tahun sebelumnya menyebabkan adanya pembatasan alokasi dana pinjaman pada tahun 2013, yaitu sebanyak Rp. 27 Miliar dari dana pinjaman dan Rp. 29 Miliar dari dana pendamping. Selain itu, di Maluku Utara dilakukan perubahan KPA oleh Gubernur, yang semula hanya Dinas Pertanian saat ini ditambahkan dengan Dinas Kehutanan, sampai dengan bulan Juli tahun 2013 belum ada penyerapan sehingga mempengaruhi kinerja proyek.

c. National Programme for Community Empowerment in Rural Area

Tidak ada permasalahan yang signifikan untuk proyek ini, progress penyerapan sudah jauh melampaui target yang direncanakan.

d. Coastal Community Development Project

Proyek ini masih mengalami permasalahan yang sama dengan triwulan sebelumnya yaitu permasalahan pengadaan konsultan di pusat dan perubahan pelaksana proyek di daerah.

e. Construction of Two University Hospitals in Sebelas Maret University and Andalas University

Saat ini proyek masih dalam proses tender dan diharapkan akan segera selesai agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai.

Kreditor Bilateral

Pada Triwulan II TA 2013, terdapat 90 jumlah pinjaman proyek yang berasal dari kelompok Kreditor Bilateral terdiri dari 37 pinjaman proyek JICA, 22 Bilateral lain, dan sebanyak 29 alokasi Kredit Ekspor. Total nilai pinjaman proyek dari kreditor Bilateral tersebut sebesar ekuivalen USD 10.833,85 juta dengan realisasi penyerapan kumultaif sebesar USD 3.702,63 atau 34,18% dari total nilai pinjaman. Sementara realisasi pada Tahun Anggaran 2013 periode Januari-Juni sebesar USD 664,60 atau 19,15% dari target Tahun 2013. Berikut rincian pinjaman proyek berasal dari kelompok Kreditor Bilateral:

Tabel 15. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral

(ekuivalen juta USD)

No.	Pemberi Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai 	Penaril kumula		Pinjaman belum	Peny	erapan TA 2	013
			pinjaman	Jumlah	%	ditarik	Target	Realisasi	%
1	JICA	37	5.984,19	2.284,62	38,18	3.699,57	1.013,52	150,03	14,80
2	Bilateral Lain	22	1.500,28	706,36	47,08	793,92	350,03	71,96	20,56
	- Australia	1	277,49	188,62	67,97	88,87	26,75	10,54	39,42
	- Austria	2	20,19	10,31	49,31	1,60	19,34	8,74	45,18
	- Belanda	1	29,29	27,97	95,54	1,31	5,84	5,84	100,00
	- China	5	587,26	279,87	47,66	307,39	138,90	17,04	12,27
	- Denmark	1	17,50	17,50	100,00	0,00	4,90	4,90	100,00
	- Jerman	4	150,02	80,28	53,51	69,74	39,14	7,61	19,43
	- Korea	5	230,90	30,13	13,02	200,78	45,77	7,07	15,45
	- Perancis	2	97,70	50,80	57,92	36,90	19,98	0,55	2,75
	- Perancis AFD	2	80,00	9,10	11,5	70,80	42,03	9,20	21,88
	- Spanyol	1	19,21	11,67	60,75	7,54	7,37	0,46	6,21
3	FKE	29	3.349,37	711,65	21,25	2.637,72	2.106,80	442,61	21,01
	Total	90	10.833,85	3.702,63	34,18	7.131,22	3.407,35	664,60	19,15

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pada Triwulan II TA 2013, terdapat 11 Kementerian/Lembaga yang menjadi instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) atas 130 pinjaman luar negeri, dimana sebagian besar berada di 3 Kementerian/Lembaga, yaitu di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, berada di Badan Usaha Milik Negara (PT. PLN dan PT. Pertamina), sisa proyek lainnya tersebar di 8 Kementerian/Lembaga lainnya. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan II TA 2013 menurut instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 16. Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(ekuivalen dalam juta USD)

No	Kementerian/	Jumlah	Nilai	Penari kumu		Pinjaman belum	Peny	erapan TA 20	13
	Lembaga	Proyek	Pinjaman	Jumlah	%	ditarik	Target	Realisasi	%
Dilak	sanakan oleh K/L	74	8.265,50	2.677,30	32,39	5.588,21	3.133,90	592,52	18,91
1	Kemen PU	23	2.900,50	1.519,15	52,38	1.381,35	440,83	117,34	26,62
2	Kemendikbud	4	308,83	78,01	25,26	230,82	84,23	4,01	4,76
3	Kemenkes	3	72,01	40,72	56,56	31,28	19,11	6,08	31,80
4	KKP	1	30,00	4,37	14,57	25,63	8,82	4,37	49,55

No	Kementerian/	Jumlah	Nilai	Penari kumu		Pinjaman belum	Peny	erapan TA 201	13
	Lembaga	Proyek	Pinjaman	Jumlah	%	ditarik	Target	Realisasi	%
5	Kemenhub	11	1.488,34	271,63	18,25	1.216,71	452,86	31,26	6,90
6	Kemkominfo	1	29,42	10,95	37,21	18,47	4,48	0,00	0,00
7	Kemenag	1	30,15	27,44	91,02	2,71	2,06	0,19	9,06
8	Lembaga/Non Kementerian	3	123,23	62,57	50,78	60,66	41,61	2,81	6,76
9	Kemhan	23	3.107,11	560,99	18,06	2.546,12	2.022,61	414,98	20,52
10	Kepolisian RI	3	<i>77,7</i> 0	39,78	51,20	37,92	47,83	9,91	20,72
Dite	ruspinjamkan (SLA)	16	2.568,35	1.025,33	39,92	1.543,02	336,45	72,08	21,42
11	PT. PLN	15	2.295,81	1.022,54	44,54	1.273,27	309,20	71,31	23,06
12	PT Pertamina	1	272,54	2,79	1,02	269,75	27,25	0,77	2,81
	Total	90	10.833,85	3.702,63	34,18	7.131,22	3.407,35	664,60	19,15

Sepanjang Triwulan II tahun 2013 telah dilaksanakan pemantauan terhadap 130 proyek pinjaman luar negeri bilateral. Dari laporan indikator output proyek dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri bilateral masih belum dapat memenuhi target yang hendak dicapai pada Triwulan II tahun 2013.Berikut paparan deskripsi proyek **per-lender**, yang berisikan indikator kinerja output, data proyek per-instansi, status permasalahan pelaksanaan pinjaman proyek, progress varian proyek pinjaman, dan daftar nama proyek yang berakhir masa berlakunya pada Tahun 2013.

JICA

Selama Triwulan II TA 2013, jumlah pinjaman JICA yang efektif dan dipantau pelaksanaannya berjumlah 37 proyek dengan nilai pinjaman JPY 592.098,18 juta.Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan II TA 2013 sebesar JPY 226,05 miliar atau 38,18% dari jumlah pinjaman, sehingga dana pinjaman yang belum ditarik senilai JPY 366,05 miliar atau 61,82% dari total pinjaman.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Penarikan pinjaman pada Triwulan II 2013 sebesar JPY 7.349,35 atau 1,24% dari pinjaman lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penarikan Triwulan I 2013. Pelaksana proyek melakukan penarikan pinjaman pada Triwulan I sebesar JPY 7.495,53 juta dengan, sedangkan pada Triwulan II 2013 pelaksana proyek melakukan penarikan sebesar JPY 7.349,35 juta sehingga persentase penarikan kumulatif turun menjadi 38,18% dari jumlah pinjaman dari sebelumnya 41,68%. Penurunan tersebut karena terdapatbeberapa masalah pada pelaksanaan proyek terkait teknis pelaksanaan, alokasi DIPA, pengadaan barang/jasa, dan pembebasan lahan.

Tabel 17. Perbandingan Penarikan Pinjaman Tahun 2012 dan 2013

		Tah	un 2012			Tal	nun 2013	
Triwulan	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman (Juta JPY)	Penarikan Triwulan	% Penarikan Pinjaman Kumulatif	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman (Juta JPY)	Penarikan Triwulan	% Penarikan Pinjaman Kumulatif
I	48	771.731,18	15.105,57 47,96		38	641.188,18	7.495,53	41,68
II	48	771.731,18 7.718,		48,96	37	592.098,18	7.349,35	38,18

Pada Triwulan TA 2013 semua instansi penanggung jawab pinjaman proyek telah melaksanakan rekomendasi langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan sebagaimana disepakati dalam pertemuan pemantauan Triwulan I meskipun belum semua permasalahan dapat terselesaikan pada Triwulan II. Beberapa langkah tindak lanjut tersebut adalah (i) pertemuan koordinasi dengan pihak JICA dan instansi terkait lainnya untuk membahas penyelesaian permasalahan dalam proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, dan realokasi pinjaman; (ii) pertemuan dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dan pengeluaran barang dari pelabuhan; serta (iii) penyampaian suratsurat ke instansi terkait untuk penyelesaian administrasi DIPA.

Masalah yang cukup memonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek JICA selama Triwulan II adalah **pengesahan dan revisi DIPA**. Lamanya proses pengesahan DIPA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan penyerapan pinjaman proyek yang berada di ITB, Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin hanya dapat ditarik sebesar rata-rata 5,23 % dari target tahun 2013. Pinjaman proyek di Kementerian Perhubungan juga hanya dapat ditarik sebesar rata-rata 0,71% dari target. Hal ini karena belum selesainya proses revisi DIPA di Kementerian Perhubungan antara lain untuk melakukan penyesuaian besaran jumlah penyerapan pinjaman beberapa proyek pada TA 2003.Dengan melihat permasalahan pada proses administrasi DIPA, diperlukan adanya kebijakan yang memungkinkan proses pengesahan DIPA (termasuk DIPA Luncuran) dan revisi DIPA dapat dilakukan untuk tiap kegiatan yang telah siap atau tiap Satuan Kerja sehingga tidak menghambat pelaksanaan proyek yang telah siap.

Masalah **pengadaan lahan** yang telah diidentifikasi pada Triwulan I belum terselesaikan sampai dengan akhir Triwulan II. Proyek IP-529 dan IP-539: *Tanjung Priok AccessRoad*masih terhambat masalah lahan sehingga memiliki PV yang sangat rendah yaitu -39,29 dan -70,68. Meskipun demikian, terdapat kemajuan yang cukup berarti dalam pengadaan lahan pada kedua proyek sehingga memungkinkan pihak pelaksana proyek melanjutkan pekerjaan. Masalah dalam pengadaan lahan umumnya berupa belum tercapainya kesepakatan dengan masyarakat atau lembaga pemilik lahan terutama mengenai harga. Hal khusus yang terjadi dalam proses pengadaan lahan adalah tuntutan hukum. Pada pinjaman proyek IP-532 *Asahan Hydro Electric Power Plant II*, PLN menghadapi gugatan dari satu perusahaan swasta terkait penggunaan lahan dan pemakaian sumber air. Saat ini prosesnya masih berada di tingkat banding (Pengadilan Tinggi) untuk ijin pemakaian lahan dan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) untuk gugatan pemakaian sumber air.

Masalah **pengadaan barang dan jasa** yang diidentifikasi pada Triwulan II adalah (i) lamanya proses *concurrence* dari pihak JICA dan (ii) lamanya proses internal untuk persetujuan hasil evaluasi/usulan pemenang dan untuk amandemen/perpanjangan kontrak. Belum tuntasnya penyelesaian masalah pengadaan barang dan jasa menyebabkan proyek IP-542 *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province* belum dapat melakukan penarikan pinjaman sampai dengan akhir Triwulan II 2013.

Masalah lain yang juga menghambat pelaksanaan proyek adalah **perijinan dari Ditjen Bea dan Cukai** untuk pengeluaran barang dari pelabuhan dan dari **Kementerian Kehutanan** untuk penggunaan lahan. Berlarutnya dan ketidakjelasan persyaratan ijin dari Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan menyebabkan terhambatnya instalasi peralatan dan menambah biaya proyek. Permasalahan ini terjadi pada pinjaman proyek IP-549 *Development of World Class University at University of Indonesia*. Pinjaman proyek ini juga menghadapi masalah perijinan/ rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk pengeluaran barang dari pelabuhan. Sedangkan masalah belum keluarnya perijinan dari Kementerian Kehutanan untuk penggunaan kawasan hutan terjadi pada beberapa pinjaman proyek PLN (IP-539 *North – West Sumatera Interconnection*).

Dari 37 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA, sebanyak 27 pinjaman proyek dilaksanakan langsung oleh kementerian/lembaga dan 10 pinjaman proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui penerusan pinjaman atau *subsidiary loan agreement* (SLA). Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman proyek yang dibiayai JICA status pada Triwulan II TA 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 18. Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan II TA 2013

(dalam juta JPY)

No	Instansi Penanggung	Jumlah	Nilai 	Penaril kumula		Pinjaman belum	Penye	rapan TA 20		
	Jawab	Proyek	pinjaman	Jumlah	%	ditarik	Target	Realisasi	%	
Dila	ksanakan oleh Kementerian/	Lembaga								
1 KemenPU 14 188.285,00 105.262,11 55,91 83.022,89 25.393,60 8.782,13										
2	Kemendikbud	3	28.100,18	7.718,69	27,47	20.381,49	7.584,16	396,74	5,23	
3	Kemenhub	6	122.905,00	9.946,36	8,09	112.958,64	39.288,42	1.277,17	3,25	
4	Kemkominfo	1	2.911,00	1.083,22	37,21	1.827,78	443,50	0,00	0,00	
5	Kemenag	1	2.983,00	2.715,02	91,02	267,98	203,72	18,46	9,06	
6	LPND	2	16.090,00	10.342,06	64,28	5.747,94	2.875,47	334,57	11,64	
Dite	ruspinjamkan (SLA)									
7	BUMN	10	230.824,00	88.981,15	38,55	141.842,85	24.492,48	4.035,82	16,48	
	Total	37	592.098,18	226.048,61	38,18	366.049,57	100.281,35	14.844,88	14,80	

Progres Varian Proyek Pinjaman JICA yang dalam kategori *at-risk* atau *serious delay*(\le -30) Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2013 diketahui terdapat 16 (enam belas) proyek pinjaman JICA yang berada pada kategori *at risk* (PV \le -30). Dari 16 (enam belas) proyek tersebut, 5 (lima) proyek bahkan memiliki PV \le -50. Proyek pinjaman JICA yang masuk kategori *at risk*tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Progres Varian Proyek Pinjaman JICA

No	Nomor	Nama Proyek	Tanggal	Tanggal	T.A.:	2012	T.A.	2013
INU	Loan	Nama Froyek	Efektif	Tutup	TW III	TW IV	TW I	TW II
1	IP-551	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28/07/2009	28/07/2017	-37,57	-38.90	-37,62	-38,10
2	IP-552	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose	28/07/2009	28/07/2015	-42.57	-35.55	-37,72	-41,61
3	IP-529	Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I	28/07/2005	28/01/2015	-38,36	-39.48	-38,49	-39,29
4	IP-531	Tanjung Priok Acces Road Construction Proj.II	01/04/2006	30/06/2013	-69,57	-69.05	-69,94	-70,68
5	IP-558	Regional Solid Waste Management for Maminasata	01/09/2010	01/09/2018	-22,51	-24,80	-27,35	-30,47

No	Nomor	N D I	Tanggal	Tanggal	T.A.	2012	T.A.	.2013
No	Loan	Nama Proyek	Efektif	Tutup	TW III	TW IV	TW I	TW II
6	IP-549	Development of World Class University at University of Indonesia	25/07/2008	15/07/2018	-27,50	-26.18	-27,53	-30,03
7	IP-553	Development of Bandung Institute of Technology	28/07/2009	30/09/2018	-30,99	-32.64	-35,17	-37,65
8	IP-521	The Urgent Rehab. Project of Tj Priok Port	24/12/2004	24/12/2013	-74,15	-70.33	-69,15	-67,32
9	IP-508	Railway Electrification and D.D. Tracking Project I	13/12/2001	11/019/201 6	-70,80	-64.77	-66,18	-67,87
10	IP-540	Railway DT on Java South Line III	26/07/2007	26/07/2013	-45,41	-41.61	-45,72	-35,28
11	IP-548	Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III	25/07/2008	25/07/2016	-48,46	-52.01	-55,09	-58,20
12	IP 554	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Proj.	28/07/2009	28/07/2019	-31,76	-34.28	-36,75	-39,24
13	IP-542	ICT Utilization Project forn Educational Quality Enchancement	29/03/2007	29/05/2015	-37,15	-33.32	-36,34	-39,39
14	IP-532	Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	15/05/2007	15/05/2017	-45,63	-48.28	-51,02	-53,66
15	IP-537	PLN Operation Improvement System for Support	15/05/2008	26/01/2018	-36,63	-39.43	-42,17	-44,17
16	IP-539	North-West Sumatera Inter- Connector Tranmission	26/01/2009	26/01/2019	-44,62	-47.70	-50,78	-51,10

Kinerja Pinjaman Proyek JICA yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

Pada Triwulan II TA 2013 terdapat 27 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dengan kinerja pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pinjaman Proyek Pada Kementerian Pekerjaan Umum

Sebanyak 14 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum meliputi 8 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen. Sumber Daya Air; 3 dikelola oleh Ditjen. Bina Marga; dan 3 dikelola Ditjen. Cipta Karya dengan total nilai pinjaman proyek sebesar JPY 188,29 miliar. Pada periode Januari – Juni 2013, penyerapan pinjaman proyek mencapai 34,58% dari target Tahun Anggaran 2013. Pencapaian fisik atau output 14 (empat belas) pinjaman proyek sampai dengan posisi Juni 2013 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Lampiran Laporan terdiri atas IP-522 Lower Solo River Improvement Project (2). IP-523 Komering Irrigation Project Stage II, Phase 2, IP-524 Urgent Disaster Reduction Project, IP-534 Integrated Water Resources and Flood Management Project for Semarang, IP-546 Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management, IP-547 Decentralized Irrigation System Improvement Project (II), IP-551 Urban Flood Control System Improvement In Selected Cities, IP-552 Countermeasures For Sediment In Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I), IP-529 Tanjung Priok Access Road Construction Project (I), IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project (II), IP-545 Aceh Reconstruction Project, IP-543 Regional Infrastructure For Social And Economic Development, IP-550 Denpasar Sewerage Development Project (II), IP-558 Regional Solid Waste Management For Mamminasata.

Pada Triwulan II 2013 terdapat 6 proyek yang perlu mendapat perhatian karena akan berakhir masa berlakunya dan menghadapi masalah dalam pelaksanaan. Proyek yang akan berakhir pada TA 2013 yaitu IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project II membutuhkan perpanjangan waktu karena masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan. Kelima proyek lainnya yaitu IP-551 Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities, IP-552 Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose, IP-529 Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I, IP-531 Tanjung Priok Acces Road Construction

Proj. II, IP-558 Regional Solid Waste Management for Maminasata memiliki PV ≤ -30 atau berada dalam kategori *at risk*.

b. Pinjaman Proyek Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Terdapat 3 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang seluruhnya dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yaitu Hasanuddin University Engineering Faculty Development (IP-541), Development of World Class University At University of Indonesia (IP-549) dan Development of Bandung Institute of Technology (IP-553). Pada TA 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyerapan dana pinjaman JICA sebesar JPY 396,74 juta (5,23%) dari target tahun ini (JPY 7.584,16 juta). Untuk proyek Development of World Class University At Univ. of Indonesia (IP-549), terdapat 1 indikator output yang telah selesai dilaksanakan dan 6 indikator output lainnya yang masih dalam proses penyelesaian, sementara untuk proyek Hasanuddin University Engineering Faculty Development (IP-541) masih tersisa 1 paket pekerjaan yang harus diselesaikan dan untuk proyek Development of Bandung Institute of Technology III (IP-533) target penyelesaian fisik masih dalam tahap pelaksanaan.

Proyek-proyek yang perlu mendapat perhatian pada Triwulan II 2013 yaitu IP-549 Development of World Class University at University of Indonesia dan IP-553 Development of Bandung Institute of Technology. Kedua proyek tersebut memiliki $PV \leq -30$ atau berada dalam kategori at risk.

c. Pinjaman Proyek Pada Kementerian Perhubungan

Sebanyak 6 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 122,91 miliar dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan II 2013 sebesar JPY 9,95 miliar atau 8,09%. Pada tahun anggaran 2013, target penyerapan pinjaman proyek di Kementerian Perhubungan senilai JPY 39,29 miliar. Sampai dengan akhir Triwulan II, jumlah penyerapan mencapai JPY 1,28 miliar atau 3,25% dari target. Terdapat 3 (tiga) pinjaman proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang pada Triwulan II penyerapannya masih nol.

Keenam pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Urgent Rehabilitation Project of Tanjung Priok Port (IP-521) dengan 2 indikator output yang sampai saat ini belum selesai, demikian pula untuk proyek Railway Electrification And Double-Double Tracking Project I (IP-508) dengan 3 indikator output meliputi pekerjaan konstruksi dan konsultan masih dalam pelaksanaan, sementara untuk IP-536 Jakarta Mass Rapid Transit System Project penyerapan kumulatifnya sebesar JPY 1.107,52 juta atau 59,26% dari total pinjaman tetapi 3 indikator kinerja output belum selesai dan IP-540 Railway Double Tracking on Java South Line III (Engineering Services) meliputi 5 indikator kinerja output, Railway Double Tracking on Java South Line III (IP-548), Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (IP-554) masih dalam persiapan pelaksanaan. Rincian dan pencapaian indikator output dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Beberapa proyek di Kementerian Perhubungan perlu mendapat perhatian khusus karena akan segera berakhir masa berlakunya dan memiliki $PV \le -30$ atau berada dalam kategori at risk. Terdapat 2 proyek Kementerian Perhubungan yang akan berakhir masa berlakunya pada TA 2013 yaitu IP-540 Railway DT on Java South Line III dan IP-521 Urgent Rehabilitation Project of Tanjung Priok Port. Proyek-proyek yang memiliki $PV \le -30$ antara lain IP-521 The Urgent Rehab. Project of Tj. Priok Port, IP-508 Railway Electrification and D. D. Tracking Project I, IP-540 Railway DT on Java South Line III, IP-548 Double Track Cirebon-Kroya Phase I & II, dan IP-554 Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project.

d. Pinjaman Proyek Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek dengan penyerapan kumulatifnya baru mencapai 37,21% dan pada Triwulan II tidak ada penyerapan sama sekali. Proyek *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province* (IP-542) merupakan kegiatan yang menyediakan fasilitas teknologi informasi dan jaringan, mengembangkan sistem *elearning*, dan menyediakan bantuan dan perangkat yang dibutuhkan untuk aktivitas sekolah di tingkat SD dan SMP di DI Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebagai model penggunaan ICT pada sektor pendidikan di Indonesia. Dari 6 indikator kinerja output, sebanyak 4 indikator kinerja output sudah selesai pada tahun 2012 dan 2 indikator output sedang dalam proses penyelesaian pada tahun 2013.

e. Pinjaman Proyek Pada Kementerian Agama

Terdapat 1 proyek bersumber dari JICA yaitu IP-530 Development of Faculty of Medicine and Health Sciences Project, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia melalui pendidikan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan serta meningkatkan pelayanan medis dan kesehatan masyarakat pada wilayah pedesaan. Pembangunan sarana prasarana pendidikan meliputi Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan termasuk penyedian Mebel dan Peralatan Laboratarium, serta peningkatan mutu tenaga pendidik melalui karya studi ke Jepang dengan program Doktoral dan Master. Penyerapan kumulatif dana pinjaman JICA sebesar JPY 2.715,02 juta atau 91,02%. Sementara pada Tahun Anggaran 2013 periode Januari - Juni, proyek ini melakukan penyerapan dana pinjaman sebesar JPY 18,46 juta (9,06%) dari target tahun 2013 sebesar JPY 203,72 juta.

Proyek telah menyelesaikan 8 indikator output dan sedang mengerjakan 1 indikator output pada Triwulan II tahun 2013. Proyek direncanakan selesai pada TA 2013. Pencapaian kinerja pinjaman proyek IP-530 *Development of Faculty of Medicine and Health Sciences Project, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* secara rinci dapat dilihat pada Lampiran laporan ini.

f. Pinjaman Proyek Pada Bakosurtanal/Badan Informasi Geospasial

Proyek IP-544 National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project telah menyerap dana pinjaman sebesar JPY 178,67 juta atau 9,21% dari target penyerapan dana tahun 2013. Tujuan proyek adalah mewujudkan good governance baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah, mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien, menghindari duplikasi pekerjaan, dan investasi dalam pembuatan data tata geo-spatial melalui: (a) Akuisisi dan pembuatan data geo spatial Pulau Sumatera, (b) Pengembangan sistem jaringan Prasarana Data Geo-Spatial Nasional (NSDI), (c) Pemanfaatan NSDI untuk mendukung rancana pembangunan daerah pada tataran pemerintah provinsi sehingga mendukung pendayagunaan sumber daya alam secara tepat, melindungi lingkungan dan mencegah bencana/kerusakan alam, serta mendukung pembangunan ekonomi Indonesia

Proyek telah menyelesaikan 1 indikator *output* pada tahun anggaran 2011. Pada TW II 2013, proyek mengerjakan 3 indikator *output* dan salah satu indikator *output* telah melebihi target output tahun 2013. Pencapaian kinerja pinjaman proyek IP-544 *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project* dapat dilihat pada Lampiran bersama Laporan ini.

g. Pinjaman Proyek Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Bappenas melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek dan pada periode Januari – Juni 2013 penyerapan mencapai 16,65% dari target penyerapan tahun anggaran 2013, sementara penyerapan kumulatifnya sebesar JPY 6.102,73 juta atau 62,80% dari total pinjaman. Proyek dimaksud adalah IP-535 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP)* – *III* yang bertujuan memperkuat kapasitas instansi yang berada di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah dalam rangka memfasilitas proses desentralisasi dengan melaksanakan Program Pendidikan di Luar Negeri dan Dalam Negeri baik di Indonesia maupun di Jepang yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari seluruh Indonesia, terutama mereka yang bekerja berhubungan dengan Perencanaan Publik dan Keuangan Publik, serta untuk Aceh. Sampai dengan Triwulan II tahun2013, proyek telah menyelesaikan 5 indikator output dari 7 indikator *output*.

Kinerja Pinjaman Proyek Yang Diteruspinjamkan (SLA)

Pada Triwulan II TA 2013 terdapat 10 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh BUMN melalui penerusan pinjaman (SLA) dengan nilai pinjaman JPY 279,91 miliar dan telah diserap sebesar JPY 88,98 miliar atau 38,55%. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN sebanyak 9 pinjaman proyek, PT PGN dan PT Pertamina masing-masing 1 (satu) pinjaman proyek.

Terdapat 9 (sembilan) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh PT PLN. Jumlah total pinjaman tersebut adalah JPY 203,86 miliar dengan penyerapan kumulatif senilai JPY 88,71 miliar atau 43,51%. Dari 9 pinjaman proyek tersebut, terdapat 2 pinjaman proyek yang progress variannya melebihi -50 (minus 50), dan terdapat 1 pinjaman proyek yang progress variannya positif. Selama Triwulan II, jumlah penyerapan mencapai JPY 3.959,96 miliar atau 18,17% dari target penyerapan tahun anggaran 2013. Terdapat satu pinjaman proyek yang selama Triwulan II penyerapannya 0,00%.

a. Pinjaman Proyek Yang Diteruspinjamkan Kepada PT. PLN

Berikut 9 (sembilan) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN yaitu *Tanjung Priok Gas Fired Power Plant Extension Project* (IP-515)yang pada Triwulan II 2013 telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan, *Ulubelu Geothermal Power Plant Project* (IP-525) masih dalam pelaksanaan, IP-527 *Keramasan Power Plant Extension Project*, IP-532 *Asahan Hydroelectric Power Plant Extension Project*, IP-537 PLN Operation Improvement System Project for Supporting Generation Facilities, IP-538 Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project, IP-539 North – West Sumatra Interconnector Transmission Line, IP-555 Engineering Services For Java - Sumatra Interconnection, IP-556 Construction of Java-Sumatra Interconnection Transmission 500 kV Line HVDC Project (I). Daftar dan rician inikator kinerja output yang harus dicapai dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

Pada Triwulan II 2013, beberapa proyek PT. PLN yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu IP-527 *Keramasan Power Plant Extension Project* membutuhkan perpanjangan waktu karena masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan tetapi *loan* akan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2013, kemudian IP-532 *Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III*, IP-537 *PLN Operation Improvement System for Support*, dan IP-539 *North-West Sumatera Inter-Connector Tranmission* memiliki $PV \leq -30$ atau berada dalam kategori *at risk* atau *serious delay*.

b. Pinjaman Proyek Yang Diteruspinjamkan Kepada PT. Pertamina

PT. Pertamina melaksanakan 1 pinjaman proyek *yaitu Lumut Balai Geothermal Power Plant* (IP-557) yang penyerapan kumulatifnya baru mencapai 1,02% dari total pinjaman JPY

26,97 miliar sementara realisasi penyerapan pinjaman pada periode Januari – Juni 2013 mencapai 2,81% dari target JPY 2,69 miliar. Tujuan proyek adalah meningkatkan kapasitas penyediaan tenaga listrik dalam sistem Sumatera untuk mendukung peningkatan standar hidup, memacu pertumbuhan ekonomi kawasan seiring dengan perbaikan iklim investasi, dan mendukung mitigasi perubahan iklim melalui penggunaaan sumber energi terbarukan yang juga mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

1.2. Pencapaian Output/Fisik

Dari sebagian besar laporan pencapaian indikator kinerja output bersumber dari JICA, berikut salah satu pencapaian indikator output proyek *IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project (II)* yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan paket konstruksi masih terkendala oleh pengadaan lahan antara lain di Simpang Jampea, seksi E-2A, pembongkaran bangunan liar dan pemindahan makam di lokasi JICT, saat ini pihak penanggung jawab proyek berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sementara untuk paket-pakety lainnya dalam proses lelang. Ditargetkan seluruh pekerjaan diperkirakan dapat selesai pada tahun 2015

Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-531Tanjung Priok Access Road Construction Project (II)

				Prog fisi					T	ahun Anş	ggaran 20	13			
No	Indikator Output		Output trak	Kumu s.dal Decer 201	ılatif khir nber		Output n 2013	TV	V I	TW	/ II	TW III	TW IV	Tot	al
		Vol	Sat	Vol	%	Vol	%	T	R	T	R	T	T	T	R
Civi	l Works														
1	Seksi NS Link	2,24	km	1,49	66,51	0,81	36,16	31,00	22,00	69,00	42,00	100,00		100,00	1,8 3
2	Seksi E2A	1,92	km	0,18	9,37	0,97	50,52	27,38	13,51	49,01	31,85	76,59	100,00	100,00	0,4 8
Cons	sulting services														
3	Consulting Services for Tanjung Priok Access Road							50,00	37,30	100,00	73,10	0,00	0,00	100,00	58,70

Catatan: T = target, R= realisasi, TW=triwulan. Realisasi sampai dengan triwulan II, tahun 2013.

Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

Terdapat 6 (enam) proyek pinjaman JICA yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2013. Pada tahun terakhir pelaksanaan proyek, rata-rata proyek yang akan berakhir masa berlakunya tersebut sudah melakukan penarikan kumulatif diatas 80%. Meskipun demikian masih ada proyek yang penarikan kumulatifnya dibawah 50%. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan anggaran proyek JICA yang berakhir pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 21. Daftar Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013 dan Status Dana Pinjaman Yang Belum Ditarik

(dalam juta IPY)

					n' '	D 1	(**************************************
	Nomo		Tanggal	Tanggal	Pinjaman		
No	r Loan	Nama Proyek	Efektif	Tutup	Ditari	ıĸ	Keterangan
	1 Loun		Elekul	Tutup	Jumlah	%	
1	IP-531	Tanjung Priok Access Road Construction Project II	01/04/2006	30/06/2013	18.813,73	70,68	Menunggu tanggapan perpanjangan <i>loan</i> dari pemerintah Jepang.
2	IP-540	Railway DT on Java South Line III	26/07/2007	26/07/2013	357,75	36,47	Diindikasi akan melakukan perpanjangan L/A.
3	IP-530	Development of Faculty of Medicine & Health Science	28/07/2005	28/07/2013	267,98	8,98	Proyek akan segera berakhir.
4	IP-527	Keramasan Power Plant Extension Project	22/10/2007	22/10/2013	1.527,28	15,69	Menunggu tanggapan perpanjangan <i>loan</i> dari pemerintah Jepang.
5	IP-511	South Sumatera-West Java Gas Transmission	27/03/2003	27/03/2013	551,76	1,12	Proyek akan segera berakhir.
6	IP-521	Urgent Rehabilitation Project of Tanjung Priok Port	24/12/2004	24/12/2012	8.7616,79	72,70	diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2016.

a. IP-531 Tanjung Priok Access Road Construction Project II

Proyek ini telah mengajukan usulan perpanjangan loan agreement dari semula berakhir tanggal 26 juli 2013 menjadi tanggal 26 Juli 2015 melalui surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang No. S-151/PU/2013 tanggal 5 Maret 2013. Usulan perpanjangan ini belum mendapat balasan dari Pemerintah Jepang.

b. IP-540 Railway DT on Java South Line III

Berdasarkan rapat pemantauan TW I 2013, proyek ini diindikasi akan melakukan perpanjangan L/A karena penyerapannya baru 48,94%. Sampai saat ini, Kementerian Perhubungan belum mengajukan usulan perpanjangan L/A.

c. IP-527 Keramasan Power Plant Extension Project

Proyek ini telah mengajukan usulan perpanjangan L/A dari semula berakhir tanggal 9 November 2013 menjadi tanggal 31 Desember 2015 melalui surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang No. S-303/PU.2/2013 tanggal 28 Maret 2013. Usulan perpanjangan ini belum mendapat balasan persetujuan dari Pemerintah Jepang.

d. IP-521 Urgent Rehabilitation Project of Tanjung Priok Port

Telah diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2016.

Australia

Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Pemerintah Australia melalui *AusAID* yang efektif dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II TA 2013 berjumlah 1 pinjaman proyek, yaitu proyek EINRIP (*Eastern Indonesia National Road Improvement Project*) dengan nilai pinjaman sebesar AUD 300,00 juta (ekuivalen USD 277,49 juta). Proyek EINRIP bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di kawasan Indonesia Timur. Proyek ini terdiri atas 20 paket kegiatan yang tersebar di 9 provinsi dan dikelola oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

Target penyerapan pada TA 2013 adalah sebesar AUD 28,92 juta (ekuivalen USD 26,75 juta), adapun realisasi penyerapan hingga Triwulan II TA 2013 sebesar AUD 11,40 juta (ekuivalen USD 10,54 juta). Penyerapan kumulatif pinjaman Australia hingga bulan Juni tahun 2013 mencapai AUD 203,92 juta (67,97 %), sehingga sisa dana pinjaman yang belum ditarik sebesar AUD 96,08 juta.

1.2. Pencapaian Output/Fisik

Pelaksanaan pekerjaan hingga tahun keenam pelaksanaan telah menyelesaikan 2 dari 3 indikator kinerja *output*, yaitu pada penyiapan proyek (identifikasi, FS, *Screening*, *Design*, *Document*) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Adapun untuk indikator kinerja pelaksanaan konstruksi masih dalam tahap penyelesaian.

Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Output EINRIP (Eastern Indonesia National Road Improvement Project)

To	tal	1		Taı	get		K	emajuai	n Pelaks	anaan F	isik TA	2013		
		s.d.	TA			TV	٧I	TV	V II	TW	' III	TW	IV	
Vol	Sat	Vol	%	Vol	%	T	R	T	R	Т	R	T	R	
10,79	km	10,79	100	10,79	100				Suda	h Selesai	i			
8,21	km	8,21	100	8,21	100				Suda	h Selesai	i			
Tengga	ara Bara	ıt												
11.00		11.20	100	11.20	100				0.1	1.0.1				
11,20	km	11,20	100	11,20	100				Suda	n Selesai	L			
31,79	km	29,92	94,12	31,79	100	100	95,03	100	98,58	100		100		
14.00	1	14.00	100	14.00	100				C 1-	l- C-1				
14,09	кm	14,09	100	14,09	100				Suda	n Seiesai	ļ			
22.62		22.02	07.02	22.62	100	100	00.77	100	00.00	100		100		
23,62	KM	22,92	97,03	23,62	100	100	98,77	100	99,22	100		100		
Tengga	ara Tim	ur												
15,60	km	5,14	32,92	14,83	95,08	45,75	35,77	61,45	52,23	81,55		95,08		
nantan l	Barat													
31,50	km	28,70	91,10	31,50	100	97,03	92,86	100	96,13	100		100		
,		′ -		, , ,		1	/==		′ -					
nantan	Selatan													
18,8	km	6,12	32,3	18,8	99,7	47,5	37,6	65,9	59,2	85,1		99,79		
	Out Kon Vol 10,79 8,21 Tengga 11,20 31,79 14,09 23,62 Tengga 15,60 antan 31,50 antan	10,79 km 8,21 km Tenggara Bara 11,20 km 31,79 km 14,09 km Tenggara Tim 15,60 km nantan Barat 31,50 km	Total Output Kontrak Real s.d. Sebelium Vol Sat Vol 10,79 km 10,79 8,21 Tenggara Barat 11,20 km 11,20 31,79 km 29,92 Tenggara Timur 15,60 km 5,14 nantan Barat 31,50 km 28,70 nantan Selatan	Realisasi s.d. TA Sebelumnya Vol Sat Vol % 10,79 km 10,79 100 8,21 km 8,21 100 Tenggara Barat 11,20 km 11,20 100 31,79 km 29,92 94,12 14,09 km 14,09 100 23,62 km 22,92 97,03 Tenggara Timur 15,60 km 5,14 32,92 tantan Barat 31,50 km 28,70 91,10 tantan Selatan	Total Output Kontrak Realisasi s.d. TA Out TA Be Sebelumnya Vol Sat Vol % Vol 10,79 km 10,79 100 10,79 8,21 km 8,21 100 8,21 Tenggara Barat 11,20 km 11,20 100 11,20 31,79 km 29,92 94,12 31,79 14,09 km 14,09 100 14,09 23,62 km 22,92 97,03 23,62 Tenggara Timur 15,60 km 5,14 32,92 14,83 tantan Barat 31,50 km 28,70 91,10 31,50	Total Output Kontrak Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan Vol Sat Vol % Vol % 10,79 km 10,79 100 10,79 100 8,21 km 8,21 100 8,21 100 Tenggara Barat 11,20 km 11,20 100 11,20 100 31,79 km 29,92 94,12 31,79 100 14,09 km 14,09 100 14,09 100 23,62 km 22,92 97,03 23,62 100 Tenggara Timur 15,60 km 5,14 32,92 14,83 95,08 tantan Barat 31,50 km 28,70 91,10 31,50 100	Total Output Kontrak Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan Vol Sat Vol % Vol Total Berjalan Total Sebelumnya TA Berjalan 10,79 Nol Nol Total Sebelumnya Total Sebelumnya	Total Output Kontrak Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan TW I Vol Sat Vol % Vol % T R 10,79 km 10,79 100 10,79 100 100 8,21 km 8,21 100 8,21 100 100 Tenggara Barat 11,20 km 11,20 100 11,20 100 100 95,03 31,79 km 29,92 94,12 31,79 100 100 95,03 14,09 km 14,09 100 14,09 100 100 98,77 Tenggara Timur 15,60 km 5,14 32,92 14,83 95,08 45,75 35,77 Inantan Barat 31,50 km 28,70 91,10 31,50 100 97,03 92,86	Total Output Kontrak Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan Tw I Tw I Vol Sat Vol % Vol % T R T 10,79 km 10,79 100 10,79 100	Total Output Kontrak Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan TW I Suda Tenggara Barat Suda 31,79 km 29,92 94,12 31,79 100 100 95,03 100 98,58 14,09 km 14,09 100 100 98,77 100 99,77 100 99,77 100 99,77 100 99,22 Tenggara Timur 15,60 km 5,14 32,92 14,83 95,08 45,75 <td colspan<="" td=""><td> Total Output Kontrak</td><td>Total Output Kontral Sebelumnya Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan TW I TW III TW III TW IIII Vol Sat Vol % Vol % Vol % TO IR TW III TW III</td><td>Total Output Kontrak Realisasi S.d. TA Berjalan Tury I Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw II</td></td>	<td> Total Output Kontrak</td> <td>Total Output Kontral Sebelumnya Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan TW I TW III TW III TW IIII Vol Sat Vol % Vol % Vol % TO IR TW III TW III</td> <td>Total Output Kontrak Realisasi S.d. TA Berjalan Tury I Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw II</td>	Total Output Kontrak	Total Output Kontral Sebelumnya Realisasi s.d. TA Sebelumnya Target Output TA Berjalan TW I TW III TW III TW IIII Vol Sat Vol % Vol % Vol % TO IR TW III TW III	Total Output Kontrak Realisasi S.d. TA Berjalan Tury I Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw III Tw II

		otal		ulatif lisasi		rget		K	emajuai	n Pelaks	anaan F	isik TA	2013	
Paket Kontrak		tput trak	s.d.	TA umnya		tput erjalan	TV	V I	TV	V II	TW	III	TW	IV
	Vol	Sat	Vol	%	Vol	%	Т	R	Т	R	Т	R	Т	R
Martapura- Ds.Tungkap	9			9	5	9	8	4	4	8	6			
EKS-02, Banjarmasin -Bts.Kalteng	12,90	km	6,34	49,12	12,90	100,00	60,15	55,84	86,67	71,84	99,17		100	
Provinsi Sula	wesi Ut	ara											1	
ESU-01, Malibagu- Taludaa (Jembatan)	490,00	m	354,17	72,28	490,00	100	100	73,58	100	82,46	100		100	
Provinsi Sula	wesi Te	ngah												
ESH-01, Lakea-Buol	16,23	km	15,45	95,22	16,23	100	100	98,01	100	100	100		100	
Provinsi Sula	wesi Te	nggara												
ESR-01, Tinanggea- Kasipute	33,77	km	33,77	100	33,77	100				Suda	h Selesai	i		
ESR-02, Bambaea- Sp. Kasipute	23,93	km	21,27	88,88	23,93	100	100	89,34	100	93,77	100		100	
Provinsi Sula	wesi Se	latan												
ESS-01, Sengkang- Impa Impa- Tarumpakk ae	24,18	km	20,32	84,04	24,18	100	100	89,89	100	98,47	100		100	
ESS-02, Bantaeng- Bulukumba	26,88	km	26,88	100,00	26,88	100				Suda	h Selesai	i		
ESS-03, Janeponto- Bantaeng	25,84	km	15,75	60,94	25,84	100	72,56	64,44	87,53	62,08	91,5 3		100	
ESS-04, Bulukumba -Tondong 1	20,74	km	10,72	51,69	20,74	100	65,24	55,93	100	69,31	100		100	
ESS-05 Bulukumba - Tondong 2	19,96	km	0,00	0,00	17,52	87,76	4,32	2,68	21,08	14,83	55,88		87,76	
ESS-06 Bulukumba - Tondong - Sinjai	24,52	km	0,00	0,00	21,25	86,67	4,14	1,84	23,52	5,53	55,15		86,67	

Progres Varian

Sampai dengan akhir Triwulan II TA 2013, proyek EINRIP memiliki PV sebesar -10,01, yang berarti realisasi penyerapan pinjaman yang bersangkutan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan sehingga perlu percepatan pelaksanaan. Sampai dengan Triwulan II TA 2013 permasalahan pembebasan lahan menjadi salah satu penghambat utama pelaksanaan kegiatan.

1.3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Secara umum, sampai dengan Triwulan II TA 2013 terdapat isu yang masih belum terselesaikan sejak kegiatan pemantauan proyek EINRIP triwulan sebelumnya, diantaranya:

- **a. Permasalahan** *price adjustment* terdapat pada paket EBL-01, EBL-02, ENB-02, dan ESR-01. Masalah ini sedang ditangani oleh PPK dan Satker paket kegiatan terkait, berkoordinasi dengan BPKP Provinsi tempat pelaksanaan proyek.
- b. Permasalahan pengadaan barang dan jasa yang dipicu oleh adanya desain ulang atau penyesuaian pada beberapa paket proyek. Pada paket EBL-01 dan EBL-02 terdapat perubahan desain guna mengakomodasi permintaan masyarakat. Pada paket ESS-05, terdapat perubahan berdasarkan kondisi di lapangan. Usulan perubahan ini telah dibahas pada tanggal 13 Mei 2013, meliputi perubahan Nilai Kontrak menjadi Rp 112.107.720.963 dan tambahan waktu pelaksanaan menjadi 105 hari (Penyelesaian Pekerjaan 1 Juni 2014). Pada paket ENB-03 terdapat pekerjaan tambahan yang belum diakomodir dalam kontrak dan kerusakan pada Deck Slab Jembatan Sta 18 + 206. Penambahan pekerjaan pada Paket ESR-02, ESS-01 dan ESH-01 juga belum diakomodasi dalam kontrak. Di samping itu, pekerjaan tambahan pada paket (ESH-01) dan (ESR-02 dan ESS-01) sedang diproses termasuk perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaannya.
- c. Permasalahan pembebasan lahan yang terdapat pada paket kegiatan EINRIP cukup variatif. Hal ini menghambat penyelesaian pekerjaan fisik jalan. Pada paket ENB-01C, kontraktor mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan di 3 (tiga) lokasi karena masalah pembebasan lahan. Pelaksana proyek telah mengusulkan untuk melakukan Serah Terima Sebagian Pekerjaan. Pada Sta 31 +450 - Sta 31 + 525 telah terjadi longsor (tanah, tanaman dan batu-batuan) yang mengakibatkan kerusakan pada dinding bronjong dan drainase. Longsoran tersebut diperkirakan akan terus terjadi hingga saat ini dan dikawatirkan sewaktu waktu batu-batu besar dan pohon besar akan jatuh, longsoran tersebut akan membahayakan bagi pengguna jalan. Pelaksana proyek telah mengusulkan perbaikan dan rencana biayanya (VO-5) dan dilaksanakan pada Masa Pemberitahuan Cacat Mutu. Selain itu, paket ESS-05 dan ESS-06 juga mengalami masalah pembebasan lahan sehingga pekerjaan di lokasi tersebut dihentikan sementara menunggu persetujuan redesign. Sedangkan paket EKS-01 mengalami masalah terkait pembebasan lahan untuk saluran air (waterways). Masalah ini dalam proses penyelesaian dengan Pemda setempat. Terdapat beberapa lokasi waterways yang telah diserahkan oleh pemilih lahan tanpa pemberian ganti rugi. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini, Ditjen Bina Marga akan berkoordinasi dengan BPKP Provinsi terkait.
- d. AusAID mewajibkan untuk membuat sertifikasi tanah bagi seluruh lahan yang dilalui dan terkena proyek pembangunan jalan, sebagaimana tertulis juga dalam perjanjian Proyek EINRIP. Sampai saat ini hanya 1 paket yang telah menyelesaikan kewajiban pembuatan sertifikat tanah. Permasalahan sertifikasi tanah ini direncanakan akan ditindaklanjuti bersama BPN dan Pemda terkait, serta diharapkan selesai pada waktunya.
- e. BPKP sudah tidak melakukan kewajibannya untuk mengaudit kegiatan *Anti-Corruption Action Plan* (ACAP) EINRIP. Hal ini disebabkan karena kesibukan internal mereka. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah, BPKP akan mengkomunikasikan kembali terkait audit ACAP dalam internal mereka.

Dari 10 paket kegiatan yang ditargetkan selesai pada tahun 2013, hanya 8 diantaranya yang dapat diselesaikan pada tahun ini dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2014. Selain itu, dana pinjaman sejumlah AUD 25 juta diperkirakan tidak terpakai (bersisa) pada Desember 2014. Kepastian tentang jumlah sisa dana dan rencana pengembaliannya akan diinformasikan pada rapat Triwulan III TA 2013.

AUSTRIA

Pada Triwulan II TA 2013, terdapat 2 proyek yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Austria yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Total nilai kedua pinjaman Austriasebesar EUR 16,00 juta dengan realisasi penyerapan kumulatif sebesar EUR 7,89 juta. Proyek-proyek yang bersumber dari pinjaman Austria tersebut adalah (1) *Procurement of Maritime Medical Facilities program*, dan (2) *Improvement of Aeromedical Hospital-Phase II* yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan akan berakhir pada akhir 2013. Realisasi penarikan pada akhir Triwulan II tahun 2013 kedua proyek tersebut sebesar EUR 6,69 juta atau 45,23% dari target penarikan pinjaman pada Tahun Anggaran 2013.

Tabel 23. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Austria Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah	,		Penarikan Kumulatif		Pinjama Dita		Realisasi Penarikan TA 2013 (Januari-Juni)		
	Proyek	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kementerian Pertahanan	2	16,00	20,91	7,89	10,31	8,11	10,60	6,69	8,76	45,23
Procurement Maritime Medical Facilities	1	8,00	10,46	1,20	1,57	6,80	8,90	0,00	0,00	0,00
Imrpovement of Aeromedical Hospital Phase II	1	8,00	10,46	6,69	8,74	1,31	1,71	6,69	8,74	83,67
Total	2	16,00	20,91	7,89	10,33	8,11	10,60	6,69	8,74	45,23

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Juni 2013 (1 EUR = 1,307001 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

a. Procurement of Maritime Medical Facilities Program

Nilai pinjaman proyek ini sebesar EUR 8,00 juta, dengan akhir masa laku pinjaman sampai dengan 30 November 2013. Proyek ini meliputi peningkatan Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo berlokasi di Jakarta. Tujuannya adalah untuk (i) peningkatan peralatan medis/kesehatan RSAL Dr. Mintohardjo dengan teknologi mutakhir, (ii) peningkatan fasilitas RSAL Dr. Mintohardjo, (iii) peningkatan pelayanan medis yang mendukung pertolongan pertama keadaan darurat/bencana, dan (iv) peningkatan kualitas sumber daya manusia RSAL Dr. Mintohardjo. Pelayanan medis yang diberikan oleh RSAL Dr. Mintohardjo tidak hanya ditujukan untuk anggota TNI-AL beserta keluarganya, namun juga untuk masyarakat umum. Sampai dengan Triwulan II TA 2013 proyek ini belum ada penarikan pinjaman, penarikan direncanakan akan dilakukan mulai bulan Oktober tahun 2013.

b. Improvement of Aeromedical Hospital-Phase II

Nilai pinjaman sebesar EUR 8,00 juta dengan akhir masa laku sampai dengan 28 Desember 2013. Proyek ini meliputi peningkatan kualitas RSAU Dr. Hardjolukito yang berlokasi di Yogyakarta. Proyek ini bertujuan untuk (i) peningkatan peralatan medis/kesehatan RSAU Dr. Hardjolukito dengan teknologi mutakhir, (ii) peningkatan fasilitas, (iii) peningkatan peralatan medis yang mendukung pertolongan pertama keadaan darurat/ bencana, dan (iv) peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya personel teknisi dan operator. Pelayanan medis yang diberikan oleh RSAU Hardjolukito tidak hanya ditujukan untuk anggota TNI AU beserta keluarganya, namun

juga untuk masyarakat umum. Realisasi penyerapan hingga akhir Triwulan II 2013 sebesar EUR 6,69 juta atau sebesar 83,67% dari nilai pinjaman.

Pinjaman Austria Dengan Progres Varian ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan pada Triwulan II TA 2013 diketahui terdapat 1 proyek pinjaman Austria yang memiliki angka progres varian ≤–30. Proyek tersebut yaitu *Procurement of Maritime Medical Facilities,* dengan progres varian sebesar -54,46. Rendahnya progres varian ini disebabkan karena sampai dengan Triwulan II TA 2013 ini belum dilakukan penarikan pinjaman walaupun pada kenyataannya beberapa material sudah diterima dan saat ini sedang dalam proses instalasi.

1.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan pada Triwulan II TA 2013 terkait masalah teknis pelaksanaan. Keterlambatan terjadi dikarenakan adanya perubahan spesifikasi teknis pada beberapa barang *Improvement of Aeromedical Hospital-Phase II*. Oleh karena itu, diperkirakan akan terjadi pinjaman perpanjangan masa laku.

Belanda

Terdapat 1 proyek yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya pada Triwulan II TA 2013, bersumber dari pinjaman Pemerintah Belanda yaitu *Procurement of 30 units Airport Rescue and Firefighting Vehicles* yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Proyek ini memiliki nilai pinjaman sebesar EUR 22,41 juta untuk pengadaan dan pengiriman 30 unit kendaraan untuk 26 bandara di Indonesia. Proyek ini akan berakhir pada Juni 2013. Proyek ini dibiayai dari pinjaman yang didampingi oleh hibah luar negeri, keduanya menjadi satu kesatuan, dimana dalam setiap termin pembayaran terdapat porsi pinjaman dan hibah sebagaimana diatur dalam *Preliminary Offer*. Realisasi penarikan pinjaman ini pada Triwulan II TA 2013 telah mencapai 100% dari target pada TA 2013.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

Penyerapan pada akhir Triwulan II TA 2013 mencapai EUR 4,47 juta, atau 100% dari target yang telah direncanakan. Dengan demikian secara kumulatif penyerapan pinjaman proyek ini telah mencapai 95,98% atau sebesar EUR 21,51 juta, sehingga sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 0,90 juta.

1.2. Pencapaian Indikator Output

Pencapaian indikator kinerja output sampai Triwulan II tahun 2013 untuk proyek *Procurement of 30 Units Airport Rescue and Firefighting Equpment* hampir seluruhnya tercapai, sisa pekerjaan ditargetkan akan dapat diselesaikan pada tahun 2013, seperti digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Pencapaian Indikator Kinerja Output Proc of 30 units Airport Rescue and Firefighting Vehicles

(dalam persen)

					ess	Target C	utput			Tal	nun Anş	ggaran 2	2013		
No	Indikator Output	Total Output Kontrak		fisik Kumulatif s.d akhir Des. 2012		Tahun Berjalan (Tahun 2013)		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Vol	Sat	Vol	%	Vol	%	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan PKP-PK	30	Unit	11	37	19	63	37	37	100	96,7	100			

1.3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pada triwulan II TA 2013 pinjaman yang dibiayai Pemerintah Belanda ini terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait masalah alokasi DIPA TA 2013 yang diperkirakan tidak dapat mencukupi kebutuhan pada tahun 2013. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kurs yang terjadi pada tiap-tiap termin penarikan/pembayaran. Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan revisi DIPA TA 2013 untuk penambahan alokasi pagu anggaran.

China

Pada Triwulan II tahun 2013, terdapat 5 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah China sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan jumlah total nilai pinjaman sebesar USD 587,26 juta. Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2013 sebesar USD 279,87 juta atau 47,66%, sehinggapinjaman yang belum ditarik sebesar USD 307,39 juta (52,34%). Pada periode Januari – Juni TA 2013, penyerapan pinjaman sebesar USD 17,04 juta atau 12,27% dari target TA 2013.

Terdapat tambahan 3 proyek baru dan mulai dipantau pada Triwulan II 2013 sehingga penyerapan pada pinjaman pada TA 2013 rendah. Salah satu penyebabnya adalah adanya beberapa tahapan legal administrasi yang harus ditempuh dengan pihak CEXIM sebelum pinjaman dapat ditarik meskipun Loan Agreement telah efektif. Proses tersebut membutuhkan waktu 4 bulan. Diperkirakan dengan telah selesainya proses legal administrasi dengan pihak CEXIM, pada Triwulan III TA 2013 dapat dilakukan peningkatan penyerapan pinjaman.

Proyek yang bersumber dari pemerintah China dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga yaitu 4 proyek oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 1 proyek oleh Kementerian Perhubungan.

Tabel 25. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman China menurut Instansi Penanggung jawab

(dalam Juta USD)

No	Kementrian/Lembaga	Jumlah	Nilai		Penarikan kumulatif		Penyerapan TA 2013			
	Ŭ	Proyek	Pinjaman	Jumlah	%	ditarik	Target	Realisasi	%	
1	Kemen PU	4	498,32	220,08	44,16	278,24	125,22	17,04	13,61	
2	Kemenhub	1	88,94	59 <i>,</i> 79	67,23	29,15	13,68	0,00	0,00	
	Total	5	587,26	279,87	47,66	307,39	138,90	17,04	12,27	

Pinjaman Proyek China Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

Pada Tahun Anggaran 2013 terdapat 2 proyek yang dibiayai pinjaman China akan berakhir masa berlakunya yaitu *Construction of Jatigede Dam Project*dan *Procurement of Track Materials 1000 km and Turnout*. Pada tahun terakhir pelaksanaan proyek, penarikan kumulatif kedua proyek tersebut sudah melebihi 60%. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan anggaran proyek China yang berakhir pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Daftar Pinjaman Proyek China Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

(dalam Juta USD)

No	Nomor	Nama Proyek	Tanggal	Tanggal	Penarikank	Cumulatif	Pinjaman Ditar	
	Loan	·	Efektif	Tutup	Jumlah	%	Jumlah	%
1	21595701	Construction of Jatigede Dam Project	25/09/2007	20/11/2013	206,65	95,84	8,97	4,16
2	21649501	Procurement of Track Materials 1000 km and Turnout	29/07/2011	29/07/2013	59,79	67,23	29,15	32,77

Catatan: Proyek Procurement of Track Materials 1000 km and Turnouts 200 units telah menyelesaikan pekerjaan fisik. Penyelesaian proses administrasi pembayaran masih menunggu selesainya proses pengesahan DIPA kementerian Penrhubungan.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Selama Triwulan II TA 2013, jumlah pinjaman Pemerintah China yang efektif dan dipantau pelaksanaannya terdiri dari 5 (lima) proyek.

a. Pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sebanyak 4 pinjaman proyek yang bersumber dari China yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum meliputi 1 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air; dan 3 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga dengan total nilai pinjaman proyek sebesar USD 498,33 juta. Proyek Construction of Jatigede Dam Project dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan Sistem Irigasi Rentang 90.000 Ha, penanggulangan krisis air baku untuk keperluan domestik, perkotaan dan industri di hilir Cimanuk (Pantura CIAYU) sebesar 3.500 liter/detik, penyediaan tenaga listrik sebesar 110 MW, pengendalian banjir untuk 14.000 Ha di wilayah Pantura Jawa, dan pengendalian lahan kritis di DAS Cimanuk. Lingkup pekerjaan proyek ini mencakup Civil Works dan Hydromechanical Work yang pencapaian outputnya lebih kurang 80%. Kemudian Tayan Bridge Construction (Loan No.21660201), yang bertujuan meningkatkan sistem jaringan jalan di Indonesia dan mendukung program pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan nasional di seluruh Wilayah Timur Indonesia, Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Phase I (No.21662601), Toll Road Development of Medan-Kualanamu (No.21663301).

b. Pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan

Terdapat 1 pinjaman proyek yang bersumber dari China yang dikelola oleh Ditjen Perkeretaapian dengan total nilai proyek sebesar USD 88,94 juta. Proyek *Procurement of Track Materials 1000 km and Turnouts 200 units* dilaksanakan untuk (a) merekondisi eksisting jalur KA yang ada ke dalam kapasitas asli dirancang untuk mempertahankan kecepatan kereta, (b) meningkatkan tingkat layanan jalur untuk pengoperasian KA angkutan penumpang dan barang, dan (c) mengurangi tingkat resiko kecelakaan.

Lingkup pekerjaan proyek ini meliputi pengadaan 3.000 Km *track material tipe* UIC-54 dan pengadaan 500 Unit Wesel. Pencapaian output proyek saat ini telah selesai.

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Berikut merupakan indikator *output* proyek *Toll Road Development of Medan-Kualanamu* (No.21663301) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 27. Pencapaian Indikator Kinerja Output IP-531Tanjung Priok Access Road Construction Project (II)

No	No Indikator Output		Total Output Kontrak				Total Output Tahun 2013		T I V	TW III	TWIV		
		Vol	Satuan	Vol	%	Vol	%	T	R	T	R	T	T
1	Jalan dan Jembatan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu	6,35	KM	0.007	0.11	2,99	47,09	3,18	0,98	23,66	9,86	57,17	100,00

1.3. Laporan Kunjungan Lapangan Proyek *Toll Road Development of Medan-Kualanamu* No. 21663301

Proyek Development of Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) Toll Road Phase I merupakan proyek yang dibiayai pinjaman Pemerintah China dengan Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum. Loan efektif pada tanggal 12 November 2012 sampai tanggal 12 November 2015 dan saat ini dalam masa pelaksanaan proyek. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, mempromosikan pembangunan nasional dan regional di daerah koridor-dampak dan kota-kota sepanjang jalan di bagian timur Jawa Barat, dan meningkatkan produktivitas daerah dan meningkatkan akses ke pasar regional dan internasional.Pembangunan jalan tol Cisumdawu juga diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sering terjadi di Bandung dan sekitarnya. Untuk melihat perkembangan pelaksanaan proyek, maka dilakukan pemantauan lapangan di Rancakalong, Jawa Barat pada tanggal 14 Juni 2013.

Ruang lingkup pekerjaan	 Pembangunan konstruksi jalan sepanjang 6,3 km (tahap I Seksi II). Panjang seluruh Seksi II adalah 17,35 km Jasa konsultansi 					
Sasaran	Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan yang menghubungkan Bandung dan Cirebon					
Lokasi	Rancakalong s.d Interchange Sumedang, Jawa Barat (Seksi II)					
Jumlah Pinjaman	USD 100 juta					

Kinerja Proyek s.d. Triwulan II 2013

- Pembangunan jalan tol Cisumdawu dibagi menjadi 6 seksi. Pada Tahun Anggaran 2013 pembangunan dilakukan untuk menyelesaikan seksi II dengan panjang jalan 17.350 km dan luas tanah yang digunakan 338,06 Ha. Hingga Triwulan II 2013, seksi II telah membebaskan lahan 47,63% (161,00 Ha) dan tanah yang belum dibebaskan seluas 52,37% (177,06 Ha).
- Pekerjaan proyek jalan tol Cisumdawu telah memasuki tahap pengerukan dan perataan tanah jalan akses (*interchange*).





Gambar 6 Proses Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol

 Berdasarkan rapat pemantauan dan kunjungan lapangan yang dilakukan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu. Rapat pemantauan yang telah dilakukan menghasilkan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pelaksana proyek. Status permasalahan dan tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Status Permasalahan dan Tindak Lanjut Proyek Development of Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) Toll Road



No	Permasalahan	Tindak Lanjut
i	Pencairan dana pinjaman Pelaksana proyek belum dapat mencairkan dana pinjaman karena <i>legal opinion</i> proyek ini belum dikeluarkan. Pencairan dana pinjaman ini perlu segera dilakukan karena pekerjaan fisik (termasuk yang dikerjakan oleh kontraktor China) telah dimulai dan dibiayai dana Rupiah uang muka.	Satuan Kerja pembangunan jalan Cisumdawu dan Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga dan Sekretariat Jendral) perlu mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Direktorat Pinjaman dan Hibah) untuk mempercepat dikeluarkannya legal opinion sehingga dana pinjaman dapat segera dicairkan.
ii	Fungsionalisasi proyek dan pembangunan terowongan Dalam kegiatan pemantauan diketahui bahwa	Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga dan Sekretariat Jendral) perlu memastikan keputusan

jalan tol tahap I Seksi II yang dibiayai pinjaman ini meskipun dapat diselesaikan, jalan tersebut tidak dapat berfungsi karena pada ruas tersebut terdapat 2 (dua) buah terowongan yang harus dibangun sementara pada pinjaman ini tidak terdapat alokasi pembiayaan pembangunan kedua terowongan tersebut. Hal ini disebabkan realisasi kontrak konstruksi melampaui perkiraan kebutuhan pembiayaan yang disusun executing agency dan pihak pelaksana proyek tidak dapat mengalokasikan pinjaman untuk pembangunan terowongan.

pembiayaan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan 2 buah terowongan tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum dapat mempertimbangkan usulan pinjaman tahap II untuk dialokasikan pada pembangunan terowongan.

iii Masalah fisik

Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, pihak proyek bahwa pelaksana menemukan pembangunan jalan tol tersebut memerlukan penambahan lahan sepanjang 10,85 km yang diperlukan untuk penguatan struktur. Berdasarkan perhitungan pihak pelaksana proyek, penambahan lahan untuk penguatan struktur merupakan pilihan yang lebih murah dibandingkan merubah desain yang telah disusun.

Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga dan Sekretariat Jenderal) perlu mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembebasan lahan tambahan untuk penguatan struktur.

Denmark

Pada Triwulan II tahun 2013, terdapat 1 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Denmark sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek Indonesia Ship Reporting Systemdengan nilai pinjaman sebesar USD 17,50 juta yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan akan berakhir masa berlaku pada 31 Oktober 2013. Proyek ini merupakan kegiatan membangun sistem informasi terkini untuk lalu lintas pergerakan kapal, dan sistem pelaporan saat terjadinya suatu keadaan bahaya atau hilangnya suatu kapal. International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR Convention) 1979, yang efektif berlaku sejak tahun 1985 mensyaratkan adanya Ship Reporting System (SRS). Sebagai negara kepulauan dan sebagai anggota dari International Maritime Organization (IMO), Indonesia diwajibkan membangun suatu SRS yang diterapkan di wilayahnya. Pemasangan peralatan SRS terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu Vessel Traffic System (VTS) di Selat Sunda dan Selat Lombok, dan SRS di Ambon, Banjarmasin, Benoa, Bitung, Cirebon, Jakarta, Jayapura, Kendari, Kupang, Merauke, Palembang, Pare-Pare, Pontianak, Sibolga, Sorong, Surabaya, Tarakan, dan Ternate.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Realisasi penarikan pada periode Januari-Juni tahun 2013 sebesar USD 4,90 juta atau 100% dari targetpenarikan pinjaman Denmark pada Tahun Anggaran 2013 sebesar USD 4,90 juta. Penyerapan kumulatif pinjaman Denmark sampai dengan bulan Juni 2013 mencapai USD 17,50 juta (100%). Dengan demikian, sampai dengan Triwulan II TA 2013, proyek ini telah berhasil menyerap 100% dari total keseluruhan pinjaman yaitu sebesar USD 17,50 juta.

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Pencapaian indikator kinerja *output* sampai Triwulan II tahun 2013 untuk proyek ini mencapai 100%, sisa pekerjaan ditargetkan akan dapat diselesaikan pada tahun 2013, seperti digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 28. Pencapaian Indikator Kinerja Output Indonesia Ship Reporting System

(dalam persen)

		То	tal	Pro	gres	Tarş Outpu	•			Tahur	Angga	ıran 2	2013		
N	o Indikator Output	Total Output Kontrak		Kumulatif s.d TA Sebelumnya		Berjalan (Tahun 2013)		TWI		TW II		TW III		TW IV	
		Vol	Sat	Vol	%	Vol	%	T	R	T	R	T	R	T	R
	Pembangunan 2 VTS di Selat Sunda	2	Unit	1	73,00	0,54	27,00	73,00	73,00	100,00	100,00				
2	Pembangunan 18 Stasiun SRS di lokasi: Ambon, Banjarmasin, Benoa, Bitung, Cirebon, Jakarta, Jayapura, Kendari	18	Unit	13	73,00	13	73,00	73,00	73,00	100,00	73,00				
(Pembangunan Nasional INDOSREP Center di Tj. Priok, Jakarta	1	Unit	0,73	73,00	0,27	27,00	73,00	73,00	100,00	100,00				
4	Pembangunan Sub Monitoring di Kantor Pusat Ditjen Hubla Jakarta	1	Unit	0,73	73,00	0.,27	27,00	73,00	73,00	100,00	100,00				

1.3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang pada Triwulan II, 2013 terkait masalah teknis pelaksanaan dan alokasi DIPA.

- 1. Teknis pelaksanaan, yaitu permasalahan dari *External Power Supply* (PLN) pada beberapa lokasi sehingga menghambat instalasi dan menimbulkan kerusakan peralatan yang telah terpasang, termasuk pemasangan instalasi *power supply* hingga saat ini belum terkoneksi karena terjadi sengketa dengan warga untuk pendirian tiang pole listrik.
- 2. Alokasi DIPA TA 2013, diperkirakan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan tahun 2013, maka Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mengusulkan revisi DIPA TA 2013 untuk penambahan pagu anggaran.

Jerman

Pada Triwulan II, tahun 2013 terdapat 4 (empat) pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Jerman yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Total nilai pinjaman proyek sebesar EUR 114,78 juta dengan penyerapan kumulatif hingga akhir Juni 2013 sebesar EUR 61,42 juta (53,51%) sehingga masih terdapat sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 53,36 juta. Proyek tersebut adalah (1) Sustainable Economic Development through Tech & Vocational (2) Jabotabek Commuter Railway (3) Track Maintenance Improvement Programme, (4) The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital.

Tabel 29. Perbandingan Penarikan Pinjaman Jerman Tahun 2012 dan 2013

		Tahun 20)12		Tahun 2013					
Triwulan	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman (Juta EUR)	Ekiv. USD*	% Penarikan Pinjaman Kumulatif	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman (Juta EUR)	Pinjaman Ekiv.			
I	4	114,78	150,36	40,77	4	114,78	150,36	53,31		
II	4	114,78	150,36	42,10	4	114,78	150,36	53,51		

Catatan: * menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Juni 2013 (1 EUR = 1,307001 USD)

Executing Agency proyek Sustainable Economic Development through Tech & Vocational Education and Training adalah Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan Implementing Agency adalah sebagai berikut (1) Kementerian Pendidikan Nasional (2) Kementerian Perindustrian, dan (3) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masa laku proyek adalah 15 Desember 2011 – 15 Desember 2015.

Proyek *Jabotabek Commuter Railways* yang berlaku sebagai *Executing Agency* dan *Implementing Agency* adalah Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dengan masa laku pinjaman sampai dengan 31 Desember 2013. Demikian pula proyek *Track Maintanance Improvement Programme*dengan aasa laku pinjaman samapi dengan 30 Juni 2014. Sementara proyek *The Improvement of the Moehamad Hoesin Hospital* yang berlaku sebagai *Executing Agency* dan *Implementing Agency* adalah Kementerian Kesehatan dengan masa laku pinjamna sampai dengan 30 Desember 2014.

Target penarikan pinjaman Jerman pada TA2013 sebesar EUR29,95 juta, dengan realisasi penarikan pada periode Januari-Juni tahun 2013 sebesar EUR 5,82 juta atau 19,43% dari target TA 2013.

Tabel 30. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Pada Triwulan II TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam juta)

Instansi	Jumlah	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2013 (Januari–Juni)			
Penanggung Jawab	Proyek	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%	
Dilaksanakan oleh K/L	4	114,78	150,36	61,42	80,46	53,36	69,90	5,82	7,62	19,43	
Kem. Dikbud	1	19,00	24,89	0,00	0,00	19,00	24,89	0,00	0,00	0,00	
Kem. Perhubungan	2	84,50	110,69	50,37	65,98	34,13	44,71	5,82	7,62	24,26	
Kem. Kesehatan	1	11,28	14,77	11,05	14,47	0,23	0,30	0,00	0,00	0,00	
Total	4	114,78	150,36	61,42	80,46	53,36	69,90	5,82	7,62	19,43	

Catatan: * menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Juni 2013 (1 EUR = 1,307001 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret tahun 2013 untuk 4 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga mencapai EUR 61,42 juta atau 53,51% dari total nilai pinjaman Jerman, sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 53,36 juta. Sementara pada periode Januari – Juni Tahun Anggaran 2013, penyerapan pinjaman mencapai EUR 5,82 juta atau 24,26% dari target penyerapan Tahun Anggaran 2013. Persentase penyerapan pada Triwulan II TA 2013 ini lebih tinggi dibandingkan penyerapan pada periode yang sama pada TA 2012 sebesar 7,23%.

Dari 4 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, 1 pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai pinjaman proyek

sebesar EUR 19,00 juta dan belum menarik dana pinjaman (0%). Kementerian Perhubungan mengelola 2 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar EUR84,50 juta dengan penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Juni tahun 2013 mencapai EUR 50,37 juta (59,61%). Pada Tahun Anggaran 2013 periode Januari-Juni penyerapan kedua proyek ini mencapai EUR 5,82 juta atau 24,26% dari target TA 2013. Selain itu terdapat 1 pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk proyek Rumah Sakit Moh. Hoesin Palembang yang saat ini dalam penyelesaian kontrak masa garansi sampai dengan tahun 2014 dengan penyerapan kumulatifnya mencapai EUR 11,05 juta atau 97,95%. Masih terdapat sisa pinjaman sebesar EUR 0,23 juta yang akan dapat ditarik seluruhnya sampai proyek berakhir.

Pinjaman Jerman Dengan Progres Varian ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2013 diketahui bahwa terdapat 2 (dua) proyek yang didanai Jerman yang dengan kategori *at risk,* yakni proyek Sutainable Economic Development through Tech & Vocational dengan progres varian menunjukan angka -38,54 dan Track Maintenance Improvement Programme dengan progres varian sebesar -51,77. Perkembangan pinjaman proyek Jerman yang mengalami keterlambatan serius pada Triwulan II TA 2013 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 31. Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (status pada Triwulan IV, 2012 dan Triwulan I, 2013)

NI-	N I	NiI	Tanggal	Tanggal	TA 2013	TA 2013
No.	Nomor Loan	Nama Proyek	Efektif	Tutup	TW I	TW II
1	2007 66 071	Sutainable Economic Dev't through Tech & Voc	15/12/2011	15/12/2015	-32,29	-38,54
2	2005 66 612	Track Maintenance Improvement Programme	22/12/2009	30/06/2014	-46,26	-51,77

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

a. Sustainable Economic Development through Tech & Vocational

Proyek ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan institusi, peningkatan penyediaan tenaga kerja, peningkatan kemampuan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas lulusan. Proyek tersebut dilaksanakan oleh 3 Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagai *Implementing Agency*. Nilai pinjaman luar negeri sebesar EUR 19 juta dan hibah sebesar EUR 2 juta. Alokasi anggaran masing-masing implementing agency adalah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar EUR 7 juta (33%), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar EUR 5 juta (24%), Kementerian Perindustrian sebesar EUR 5 juta (24%), kemudian sisanya adalah untuk Pekerjaan Konsultan sebesar EUR 2 juta (9,5%). Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 15 Desember 2015.

Pencapaian output TA 2013 untuk proyek pinjaman yang bersumber dari Jerman untuk proyek di Kementerian Perhubungan di proyek *Sustainable Economic Dev't through Tech & Vocational.* Rencanapencapaian output dari proyek tersebut disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2013

b. Jabotabek Commuter Railways

Proyek ini bertujuan untuk memberikan alternatif dan solusi terhadap permasalahan transportasi, mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi tingkat polutan di DKI Jakarta. Porsi pinjaman luar negeri untuk proyek adalah sebesar EUR 51 juta dan hibah sebesar EUR 1 juta. Kementerian Perhubungan merupakan *executing agency*/pelaksana proyek tersebut.

Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 19 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2013. Pencapaian output TA 2013 untuk proyek pinjaman yang bersumber dari Jerman untuk proyek di Kementerian Perhubungan di proyek *Jabotabek Commuter Railways*. Rencana pencapaian output dari proyek tersebut disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2013.

c. Track Maintenance Improvement Programme

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan jaringan jalur di Jawa. Alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme pinjaman dan didampingi oleh hibah luar negeri. *Loan* dan hibah dalam pekerjaan ini merupakan satu kesatuan (satu paket). Porsi pinjaman luar negeri sebesar EUR 32,00 juta dan porsi hibah sebesar EUR 0,5 juta. *Executing agency* proyek ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan proyek direncanakan dilaksanakan sejak dari tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan 30 Juni 2014. Rencana pencapaian output TA 2013 untuk proyek *Track Maintenance Improvement Programme* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2013.

d. The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital

Proyek ini merupakan pengadaan peralatan kesehatan, *rezoning*, dan pelatihan bagi pegawai dan perawat rumah sakit Moh. Hoesin Palembang. Porsi pinjaman luar negeri sebesar EUR 11,28 juta dan porsi hibah sebesar EUR 1,5 juta. Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 14 Mei 2003 sampai dengan 31 Desember 2014.

1.3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Gambaran umum mengenai isu dan permasalahan yang terjadi pada masing-masing proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 32. Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek Jerman Triwulan I TA 2013

		Isu/Permasalahan								
No.	Nama Proyek	Teknis Pelaksanaan ¹⁾	Alokasi DIPA ²⁾	Pengadaan Barang/Jasa	Pembebasan Tanah					
1	Sustainable Eco. Dev't through Tech Vocational Educ & Training	٧								
2	Jabotabek Commuter Railways		1	√						
3	Track Maintenance Improvement Programme	1	1							
4	Improv. of the Moh. Hoesin Hospital			V						

Catatan:

- 1) Masalah teknis pelaksanaan adalah permasalahan dalam pelaksanaan desain, struktur organisasi, administrasi, mobilisasi
- 2) Masalah DIPA adalah permasalahan menyangkut pencantuman alokasi dana loan, dana pendamping, revisi DIPA maupun pemenuhan persyaratan administrasi

Korea

Pada Triwulan II, terdapat tambahan penyerapan sebesar KRW 4.704,00 juta atau hanya mencapai 15,45% dari target tahun 2013. Jumlah ini hanya meningkat 2,22% dibandingkan Triwulan sebelumnya.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan II TA 2013 sebesar 34.500,49 juta atau 13,05 % dari jumlah yang tersedia, sehingga dana pinjaman yang belum ditarik senilai KRW 229.934,62 juta(86,95%). Penyerapan pinjaman pada Triwulan II 2013 masih rendah karena beberapa hal antara lain:

Belum adanya progres pekerjaan fisik proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum yang jumlah pinjamannya cukup besar yaitu KRW 198.854,55 juta.

Lambannya progres fisik di Kementerian Kesehatan yaitu INA-10 *Strenghtening of Teaching Hospital* dan INA-14 *Improvement of H. Adam Malik Hospital* in Medan karena adanya masalah koordinasi dengan instansi terkait mengenai ijin pengeluaran barang dari pelabuhan.

Pelaksanaan fisik proyek Kementerian Kesehatan diperkirakan akan selesai pada TA 2014 meskipun demikian penyelesaian administrasi pembayaran diperkirakan baru dapat diselesaikan pada TA 2014.

Diperkirakan rendahnya penyerapan pinjaman akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2013 karena Kementerian Pekerjaan Umum belum melakukan pekerjaan fisiknya.

Tabel 33. Perbandingan Penarikan Pinjaman Korea Tahun 2012 dan 2013

		Tal	hun 2012	Tahun 2013				
Triwulan	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman (Juta JPY)	Penarikan Triwulan	% Penarikan Pinjaman Kumulatif	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman (Juta JPY)	Penarikan Triwulan	% Penarikan Pinjaman Kumulatif
I	5	264.435,11	973,45	6,52	5	264.435,11	3.396,61	11,27
II	5	264.435,11	7.546,47	9,37	5	264.435,11	4.704,00	13,05

Jumlah proyek yang dibiayai pinjaman EDCF yang efektif dan dipantau pelaksanaannya adalah 5 (lima) proyek, terdiri dari 3 (tiga) proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 2 (dua) proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Tabel 34. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam Juta USD)

No	Kementrian/Lembaga	Jumlah	Nilai	Penarikan kumulatif		Pinjaman belum	Penyerapan TA 2013		
	Ŭ	Proyek	pinjaman	Jumlah	%	ditarik	Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	3	198.854,55	4.401,60	2,21	194.452,95	30.774,80	1.142,00	3,71
2	Kemenhub	2	65.580,56	30.098,89	45,90	35.481,67	21.640,20	6.958,61	32,16
	Total	5	264.435,11	34.500,49	13,05	229.934,62	52.415,00	8.100,61	15,45

Progress Varian Proyek Pinjaman Korea ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2013 diketahui terdapat 3 (tiga) proyek pinjaman EDCF (Korea) yang berada pada kategori *at risk* (PV \leq -30). Dari 3 (tiga) proyek tersebut, 2 (dua) diantaranya bahkan memiliki PV \leq -50. ketiga proyek pinjaman EDCF yang masuk kategori *at risk* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Progress Varian Proyek Pinjaman Korea

No	Nomor	Na D	Tanggal	Tanggal	T.A 2	012	T.A.2013		
NO	Loan	Nama Proyek	Efektif	Tutup	TW III	TW IV	TW I	TW II	
1	INA-11	Manado By-Pass Project Phase II	22/03/2009	31/12/2014	-59,23	-64.51	-69,67	-74,89	
2	INA-17	Padang By Pass Capacity Expansion Project	14/04/2011	14/10/2015	-32,13	-37,.72	-43,20	-48,63	
3	INA-14	Improvement of H.Adam Malik Hospital in Medan	27/05/2009	27/11/2013	-59,36	-62.56	-62,94	-58,48	

Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

Terdapat 2 (dua) proyek pinjaman EDCF (Korea) yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2013. Pada tahun terakhir pelaksanaan proyek, penarikan kumulatif kedua proyek tersebut masih dibawah 20%. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan anggaran proyek pinjaman EDCF (Korea) yang berakhir pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 36. Daftar Pinjaman Proyek Korea Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

(dalam juta KRW)

No			Nama Proyek Tanggal Efektif		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
	Loan	·	Efektif	Tutup	Jumlah	%	Jumlah	%
1	INA-11	Manado By Pass Project Phase II	23/03/2009	31/12/2013	2.982,02	14,56	17.493,58	85,44
2	INA-14	Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan	27/05/2009	27/11/2013	13.549,49	32,41	28.262,67	67,59

Deskripsi Proyek

a. INA-10 Strenghtening of Teaching Hospital

Penyerapan kumulatif dana yang telah dilakukan sebesar KRW 16.549,40 juta atau 69,63% dari total pinjaman. Pada TA II 2013, proyek ini melakukan penyerapan dana pinjaman sebesar KRW 650,06 (5,56%) dari target tahun ini (KRW 11.697,70 juta). Hingga TW II 2013, proyek masih mengerjakan 3 paket kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, proyek mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol yaitu adanya penolakan dari pihak rumah sakit mengenai pengadaan alat EO gas karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan alat tersebut akan berdampak negatif dan tidak layak digunakan bagi pasien. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan BPFK untuk melakukan uji kelayakan alat tersebut. Selain itu, pengadaan alat kesehatan tertunda karena tertahan di pelabuhan. Proyek memerlukan amandemen/perpanjangan kontrak agar dapat mengefektifkan masterlist sehingga barang yang tertahan di pelabuhan agar dapat segera dikeluarkan. Tertundanya pengadaan alat kesehatan tersebut menyebabkan jadwal pelaksanaan pelatihan penggunaan alat kesehatan tersebut tertunda.

b. INA-11 Manado By-Pass Project Phase II

Penyerapan kumulatif dana yang telah dilakukan sebesar KRW 2.982,02 juta atau 14,56% dari total pinjaman dan pada TA 2013, proyek ini belum melakukan penyerapan dana pinjaman. Lingkup pekerjaan meliputi konstruksi jalan 2 lajur sepanjang 8 km termasuk jembatan sepanjang 210 m, pengaspalan jalan *By-Pass fase* satu sepanjang 8,4 km, dan jasa konsultan.

c. INA-14 Improvement of H.Adam Malik Hospital in Medan

Penyerapan kumulatif sebesar KRW 13.549,49 juta atau 32,41% dari total pinjaman. Pada TA 2013, proyek ini melakukan penyerapan dana pinjaman sebesar KRW 6.308,55 juta (63,45%) dari target tahun ini (KRW 9.942,50 juta). Pada TW II 2013, proyek diharpkan mencapai 2 indikator *output*.

Pelaksanaan proyek mengalami hambatan akibat proses administrasi yang menyebabkan barang yang terdapat di pelabuhan tidak dapat dikeluarkan karena berkas administrasi yang belum lengkap. Selain itu, proses pengurusan *shipment* 9 dari Dirjen di Kemenkes RI belum selesai, sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan proyek. Pihak pelaksana proyek dan Kementerian Kesehatan perlu segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memproses pengeluaran SAS dari Ditjen Pelayanan Farmasi.

d. INA-17 Padang By-Pass Capacity Expansion Project

Penyerapan kumulatif dana yang telah dilakukan sebesar KRW 346,58 juta atau 0,52% dari total pinjaman. Pada TA 2013, proyek ini melakukan penyerapan dana pinjaman sebesar KRW 69,00 juta dari target tahun ini (KRW 1.077,00juta). Pada TW II 2013, proyek mengerjakan 2 indikator *output*. Rincian dan pencapaian output proyek INA-17 *Padang By-Pass Capacity Expansion Project* dapat dilihat pada Lampiran Laporan ini.

Proyek memiliki progress varian yang rendah pada Triwulan II 2013 yaitu 48,63%. Permasalahan yang menonjol yaitu terhambatnya pelaksanaan proyek akibat masalah pembebasan lahan di Duku Interchange seluas 8,7 ha dan di 3 underpass (Lubuk Begalung, Ketaping, dan Siteba) seluas 2,8 ha. Selain itu, terdapat 83 bangunan liar yang berpotensi mengganggu pekerjaan fisik proyek. Pemda Provinsi Sumatera Barat perlu menyelesaikan masalah pembebasan lahan dengan dana yang telah disediakan APBD 2013. Pemda Provinsi juga perlu menyelesaikan masalah 83 bangunan liar sebelum tanda tangan kontrak pekerjaan fisik. Proyek juga mengalami keterlambatan proses prakualifikasi dan lelang. Keterlambatan proses lelang mengakibatkan mobilisasi personil Supervisi akan mengalami keterlambatan. Tim Supervisi proyek ini mengalami pergantian personel.

e. INA-19 Construction of Karian Multipurpose Dam

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar KRW 1.073,00 juta atau 0,96% dari total pinjaman. Pada TA 2013, proyek ini melakukan penyerapan dana pinjaman sebesar KRW 1.073,00 juta (3,61%) dari target tahun ini (KRW 29.686,90 juta).

Proyek terdiri dari 3 indikator output dimana 1 indikator output sedang dikerjakan hingga TW 11 2013 dan 2 indikator output dalam proses kontrak.

Pelaksanaan proyek mengalami beberapa masalah yaitu terhambatnya penagihan untuk Termin 2 karena penagihan untuk termin 1 masih dalam proses. Pelaksana proyek perlu mempercepat pembayaran untuk termin 1 agar penagihan untuk termin 2 dapat segera diselesaikan proses administrasinya. Selain itu, proyek juga terhambat akibat paket 2 pekerjaan fisik yang belum terkontrak dan masih dalam proses pelelangan. Paket *hydromechanical* pembangunan bendungan Karian Dam masih direncanakan akan dilelang setelah Pelelangan Pekerjaan Fisik selesai. Untuk mengatasi masalah ini, pelaksana proyek

perlu mempercepat evaluasi atas dokumen penawaran teknis. Pelaksana proyek juga perlu mempercepat proses pelelangan *civil* pekerjaan fisik dan mempersiapkan dokumen terkait pelelangan *hydromechanical*.

Perancis dan Perancis AFD

Pada Triwulan II TA 2013, terdapat 4 (empat) pinjaman proyek bersumber dari Perancis dan AFD, yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Jumlah pinjaman proyek Perancis sebesar EUR 67,10 juta, dan pinjaman proyek AFD sebesar USD 80.00 juta. Proyek-proyek tersebut adalah:

Perancis

- 1. Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh; Pada proyek ini yang berlaku sebagai *executing agency* dan *implementing agency* adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Masa laku proyek dari 9 September 2009 – 30 April 2013.

Perancis AFD

- 1. Infrastructure Development Space Oceanography
 Pada proyek ini yang berlaku sebagai executing agency dan implementing agency adalah
 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masa laku proyek dari 18 Juni 2012 13 Desember 2016.
- 2. Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement
 Pada proyek ini yang berlaku sebagai executing agency dan implementing agency adalah
 Perusahaan Listrik Negara. Masa laku proyek dari 15 April 2011 31 Oktober 2014.

Target penarikan pinjaman Perancis pada Tahun Anggaran 2013 sebesar EUR 15,29 juta, dengan realisasi pinjaman Perancis pada periode Januari-Juni tahun 2013 sebesar EUR 0,42 juta atau 2,73%.

Target penarikan pinjaman AFD Tahun Anggaran 2013 sebesar USD 42,03 juta, dan realisasi pinjaman Perancis AFD sebesar EUR 9,20 juta atau 21,88%.

Tabel 37. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Pada Triwulan II TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam juta)

Instansi	Jumlah	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2013 (Januari–Juni)		
Penanggung Jawab	Proyek	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Dilaksanakan oleh K/L	2	67,10	87,70	38,87	50,80	28,23	36,90	0,42	0,55	3,12
Kem. Pekerjaan Umum	1	36,80	48,10	32,71	42,75	4,09	5,35	0,00	0,00	0,00
BMKG	1	30,30	39,60	6,16	8,05	24,14	31,55	0,42	0,55	3,73
Total	2	67,10	87,70	38,87	50,80	28,23	36,90	0,42	0,88	3,12

Catatan:* menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Juni 2013 (1 EUR = 1,307001 USD)

Tabel 38. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Pada Triwulan II TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam juta)

Instansi	Jumlah	Nilai Pinjaman	Penarikan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik		
Penanggung Jawab	Proyek	USD	USD	USD	USD	%
Dilaksanakan oleh K/L	1	30,00	4,37	25,64	4,37	49,55
Kem. Kelautan & Perikanan	1	30,00	4,37	25,64	4,37	49,55
Di SLA kan	1	50,00	4,83	45,17	4,83	9,66
PT. PLN	1	50,00	4,83	45,17	4,83	14,54
Total	2	80,00	9,20	70,80	9,20	21,88

Catatan:* menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Juni 2013 (1 EUR = 1,307001 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Pinjaman Perancis yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga di 2 instansi penanggung jawab (*Executing Agency*). Dari 2 proyek pinjaman yang tercatat penyerapan kumulatifnya sebesar EUR 38,87 juta (57,92%) sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 28,23 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran berjalan periode Januari-Juni sebesar EUR 0,42 juta (2,73% dari target yang telah ditetapkan).

Pinjaman Perancis AFD yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga di 2 instansi penanggung jawab (*Executing Agency*). Dari 2 proyek pinjaman yang tercatat penyerapan kumulatifnya sebesar EUR 9,20 juta (11,50%) sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 70,80 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran berjalan periode Januari-Juni sebesar EUR 0,42 juta (3,12% dari target yang telah ditetapkan).

Pinjaman AFD Dengan Progres Varian ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2013 diketahui bahwa proyek *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* memiliki progres varian sebesar - 52,65 (progres varian yang semakin kecil dari minus 30 menandakan bahwa penyerapan dana yang lambat dari waktu yang dijadwalkan).

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

a. Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh

Proyek ini berlokasi di Banda Aceh dan Lhoksumawe dan dilaksanakan sebagai akibat terjadinya bencana tsunami yang melanda NAD pada tahun 2004. Akibat bencana tsunami tersebut, sebagian besar sistem drainage di kota Banda Aceh dan Lhoksumawe mengalami kehancuran sehingga dengan dilaksanakan proyek tersebut, sistem *drainage* dapat terbangun kembali. Proyek ini dilaksanakan melalui mekanisme pinjaman luar negeri. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 36,8 juta. Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 9 Agustus 2009 sampai dengan 30 Maret 2013. Tujuan proyek tersebut adalah (1) Perencanaan tsunami *early warning system;* (2) Pengamanan pantai (3) Pengendalian banjir (4) Drainage perkotaan. Rencana pencapaian outpun proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2013.

b. Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)

Proyek ini bertujuan untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan di dalam mengembangkan stasiun penerima data yang dipergunakan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan internasional di masa depan. Proyek ini dilaksanakan melalui mekanisme pinjaman luar negeri dengan jumlah pinjaman sebesar USD 23 juta.

Pengelolaan sumber daya kelautan oseanografi perlu didukung oleh 3 (tiga) komponen penting; pengamatan berbasis ruang, pengamatan in-situ, dan biokimia laut dan permodelan fisik. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memahami dinamika laut dan menggunakannya untuk meramalkan fenomena alam. Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2016. Rencana pencapaian output proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2013.

c. Strengthening of BMKG Climate and Weather Services

Proyek ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur dan sistem informasi Meteorologi BMKG yang juga merupakan *executing agency* proyek tersebut, dalam rangka mengembangkan peringatan secara ekstensif dan layanan yang disediakan oleh BMKG kepada masyarakat.

Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh sektor ekonomi, sektor transportasi dan sektor pertanian serta sektor lainnya yang terkait. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 30,29 juta. Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan 30Juni 2015. Rencana pencapaian output TA 2013 proyek *Strengthening of BMKG Climate and Weather Services* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2013.

d. Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement

Proyek ini bertujuan untuk efisiensi energi utama sebagai rencana strategis untuk mengurangi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN kepada pelanggan. Diharapkan dengan berjalannya proyek ini PLN dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan dapat diandalkan. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 37,6 juta. Pelaksanaan proyek direncanakan dari tanggal 25 April 2011 sampai dengan 31 Oktober 2014.

1.3. Permasalahan Dalam Pelaksanaan

Gambaran umum mengenai isu dan permasalahan yang terjadi pada masing-masing proyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 39. Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek Perancis Triwulan II TA 2013

		Isu/Permasalahan					
No.	Nama Proyek	Teknis Pelaksanaan ¹⁾	Alokasi DIPA ²⁾	Pengadaan Barang/Jasa	Pembebasan Tanah		
1	Rehabilitation Drainage System of Banda Aceh	٧	٧				
2	Strength BMKG Climate and Weather Service		1				

Tabel 40. Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek AFD Triwulan II TA 2013

		Isu/Permasalahan						
No.	Nama Proyek	Teknis Pelaksanaan ¹⁾	Alokasi DIPA ²⁾	Pengadaan Barang/Jasa	Pembebasan Tanah			
1	Infrastructure Development Space Oceanography	1						
2	Java-Bali Electricity Dist Performance Improvement	1						

Catatan:

- 1) Masalah teknis pelaksanaan adalah permasalahan dalam pelaksanaan desain, struktur organisasi, administrasi, mobilisasi
- 2) Masalah DIPA adalah permasalahan menyangkut pencantuman alokasi dana loan, dana pendamping, revisi DIPA maupun pemenuhan persyaratan administrasi

Pinjaman Proyek Perancis Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

Pada TA 2013 terdapat 1 pinjaman proyek Perancis yang akan berakhir masa lakunya. Proyek tersebut berada di Kementerian Pekerjaan Umum. Informasi tentang proyek yang masa lakunya akan berakhir di TA 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 41. Pinjaman Proyek Perancis Yang Akan Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2013

(dalam juta EUR)

No.	Nomor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
	Loan	Loan		Tutup	Jumlah	%	Jumlah	%
1	ID00264	Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh	09/09/2009	30/4/2013	32,71	88,88	4,09	11,12

Spanyol

Pada Triwulan II TA 2013, hanya terdapat 1 (satu) pinjaman proyek bersumber dari Spanyol yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 14,7 juta. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Tabel 42. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan I TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam juta)

Instansi Penanggung	Jumlah Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2013 (Januari–Juni)			
Jawab	Proyek	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Dilaksanakan oleh K/L	1	14,70	18,79	8,93	11,67	5,77	7,54	0,35	0,46	4,95
LIPI	1	14,70	18,79	8,93	11,67	5,77	7,54	0,35	0,46	4,95
Total	1	14,70	18,79	8,93	11,67	5,77	7,54	0,35	0,46	4,95

Catatan:* menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Juni 2013 (1 EUR = 1,307001 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan

Proyek ini menyediakan peralatan laboratorium, *processing* pakan dan susu, serta penyiapan sarana fisik berupa gedung laboratorium peternakan seluas 1500m², *Unit Processing* pakan seluas 512m², *unit processing* susu seluas 450m², kandang ternak (108m²) Kandang otomatis (180m²), prasarana lingkungan (1 paket)yang akan dibangun di Cibinong di Bogor.

Disamping itu, untuk peningkatan sumberdaya manusia terkait pelaksanaan kegiatan ini, akan dilakukan training yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu: (1) operasional training program, ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi dan operasional peralatan-peralatan, menangani peralatan-peralatan, memahami protocol dan mempu melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut, (2) Overseas Training Program, akan dilaksanakan di Spanyol selama 2 minggu, total jumlah peserta 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok (Embryo Transfer dan Embryo Manipulasi, Feed Management, Dairy Product, Beef product, Project Management), (3) Domestik Training Program, yang akan dilaksanakan di Indonesia selama 8 minggu dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang.

Sampai dengan Triwulan II TA 2013, penyerapan kumulatifnya proyek sebesar EUR 8,93 juta (60,73%), sedangkan pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 5,77 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran berjalan sampai dengan Triwulan II mencapai EUR0,35 juta (6,29% dari target yang telah ditetapkan).

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Rencana pencapaian output TA 2013 untuk proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2013.

1.3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang pada Triwulan II, 2013 terkait masalah teknis pelaksanaan, yaitu pelaksanaan instalasi, pengiriman peralatan, dan training yang tidak sesuai dengan jadwal. Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi di Spanyol yang berdampak pada kontraktor Equinse, SA.

Gambaran umum mengenai isu dan permasalahan yang terjadi pada proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 43. Rekapitulasi Isu dan Permasalahan Pinjaman Proyek Spanyol Triwulan II TA 2013

		Isu/Permasalahan				
No.	Nama Proyek	Teknis Pelaksanaan ¹⁾	Alokasi DIPA ²⁾	Pengadaan Barang/Jasa	Pembebasan Tanah	
1	Animal Husbandry Technology and Practices Improvement Programme	٧				

Catatan:

¹⁾ Masalah teknis pelaksanaan adalah permasalahan dalam pelaksanaan desain, struktur organisasi, administrasi, mobilisasi

²⁾ Masalah DIPA adalah permasalahan menyangkut pencantuman alokasi dana loan, dana pendamping, revisi DIPA maupun pemenuhan persyaratan administrasi

Proyek Fasilitas Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing

Jumlah proyek Kredit Swasta Asing (KSA)/ Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) yang efektif dan sedang berjalan pada Triwulan II TA 2013 adalah sebanyak 68 proyek yang dikelola oleh 3 (tiga) instansi yaitu: Kementerian Pertahanan (53 proyek), Kepolisian RI (10 proyek) dan PT. PLN (5 proyek). Dari 53 proyek Kemhan, 9 diantaranya merupakan alokasi *multi-years*. Total nilai pinjaman KSA/LPKE bernilai USD 3.349,37 juta. Adapun rekapitulasi pelaksanaan pinjaman KSA/LPKE menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman KSA/LPKE Pada Triwulan II TA 2013 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Target Penyerapan TA 2013	Realisasi Penyerapan TW II 2013
Dilaksanakan oleh K/L	63	3.163,90	590,46	2.051,10	416,15
Kemhan	53	3.086,20	550,68	2.003,27	406,24
Kepolisian RI	10	77,70	39,78	47,83	9,91
Di SLA kan	5	185,47	121,19	55,70	26,46
PT. PLN	5	185,47	121,19	55,70	26,46
Total	68	3.349,37	771,65	2.106,80	442,61

1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

a. Kementerian Pertahanan

Total nilai alokasi proyek KSA/LPKE Kementerian Pertahanan yang sedang berjalan saat ini mencapai USD 3,7 miliar, dengan persentase terbesar terdapat pada alokasi Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) 2011-2014 (60%) dan APP 2009 (19%). Besar alokasi lainnya terbilang kecil dengan persentase dibawah 10%.

Penyerapan terhadap nilai total komitmen pinjaman pada Triwulan II Tahun 2013, yakni sebesar 18% atau lebih rendah 1% daripada Triwulan I Tahun 2013. Tahun 2013, Kementerian Pertahanan menargetkan penyerapan sebesar USD 2,00 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Total Komitmen dan Penyerapan Kumulatif Proyek KSA/LPKE on going

(dalam Juta USD)

No.	Alokasi Tahun	Jumlah Alokasi	Jumlah Komitmen Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Target Penyerapan TA 2013
1	AKE 2002	32.776.000	9,50	0	3,69
2	AKE 2004	23.796.000	20,23	5,74	5,68
3	AKE 2005	222.200.000	152,01	8,39	953,44
4	APP 2006	359.950.000	305,65	29,27	61,17
5	APP 2008	138.400.000	117,70	51,66	91,15
6	APP 2009	695.500.000	586,66	281,30	754,86
7	PSP 2011-2014	2.229.500.000	1.894,45	174,32	133,27
Total		3.702.122.000	3.086,20	550,68	2.003,27

b. Kepolisian Republik Indonesia

Terdapat 10 (sepuluh) proyek *on-going* yang dibiayai dengan total nilai alokasi mencapai USD 91,60 juta. Dari total alokasi tersebut, jumlah komitmen pinjaman luar negeri mencapai USD 77,70 juta. Tahun 2013, POLRI menargetkan penyerapan sebesar USD 47,83 juta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia

(dalam Juta USD)

No.	Alokasi Tahun	Jumlah Alokasi	Jumlah Komitmen Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Target Penyerapan TA 2013	Realisasi Penyerapan TA 2013
1	POLRI TA 2004	3,60	3,06	0,12	2,95	0
2	POLRI TA 2005	42,00	35,57	22,37	15,23	2,04
3	POLRI TA 2008	46,00	39,07	17,29	29,65	7,87
	Total	91,60	77,70	39,78	47,83	9,91

c. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Jumlah proyek FKE yang dikelola PT. PLN mencapai 4 (empat) proyek dengan nilai pinjaman USD 185,47 juta. Semua proyek dibiayai dengan pinjaman JBIC melalui skema SLA (*subsidiary loan agreement*). Sampai dengan Triwulan II 2013 tingkat penyerapan kumulatif telah mencapai USD 121,19 juta atau 65,34% dari total pinjaman proyek. Tahun 2013, PT. PLN menargetkan total penyerapan sebesar USD 55,70 juta. Dari target penyerapan 2013 sebesar USD 55,70 juta, jumlah realisasi pada TW II 2013 mencapai USD 26,46 juta atau 47,50%.

Tabel 47. Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN

(dalam Juta USD)

No.	Nama Proyek	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Target Penyerapan TA 2013	Realisasi Penyerapan TA 2013
1	Rehabilitation and Modernization Project of Saguling Hydro Electric Power Plant (CLA-3)	13,17	12,38	2,4	0,00
2	Rehabilitation of Paiton Steam PP (CLA-4)	42,51	35,39	13,8	26,46
3	Rehabilitation for Suralaya Steam PP (CLA-5)	73,75	73,42	0,9	0,00
4	Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4	35,17	0,00	38,6	0,00
5	Scattered Transmissions and Substantions Package 8*)	20,87	0,00	0,00	0,00
	Total	185,47	121,19	55,70	26,46

^{*)} Target penyerapan sebesar USD 0,86 juta masih dalam tahap pengajuan APBN-P.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

- a) Lamanya proses penghapusan tanda bintang di DPR, sebagai syarat untuk pencairan uang muka, merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pelaksanaan proyek-proyek KSA/LPKE yang dilaksanakan Kemhan dan Polri. Misalnya, proses penghapusan tanda bintang untuk kegiatan Aljihandak EOD/MOLE Programmer dan Harsucad Pesawat (Polri -AKE TA 2008) belum selesai sampai dengan triwulan ini berakhir meskipun Polri telah mengajukan usulan ini sejak 10 bulan sebelumnya.
- b) Sebanyak 16 proyek Kemhan mengalami keterlambatan sehingga memerlukan perpanjangan masa laku *loan agreement*.

- c) Hingga Triwulan II Tahun 2013 ini, masih terdapat proyek-proyek Kemhan yang mendapat alokasi sejak 2002 namun masih belum selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, Kemhan diharapkan menginventaris status proyek-proyek yang telah lama dialokasikan namun belum selesai dilaksanakan.
- d) Terkait proyek PT PLN, masalah cuaca menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik untuk proyek *Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4* sehingga dibutuhkan perpanjangan masa laku LA untuk yang kedua kalinya. Untuk memperlancar proses perpanjangan masa laku LA, PT PLN diharapkan dapat segera mempersiapkan proses perpanjangan ini.
- e) Pelaksanaan proyek PT PLN lainnya yaitu *Rehabilitation of Paiton Steam PP* (CLA-4) mengalami kendala akibat rusaknya Trafo Tenaga Unit 2 yang bukan bagian dari *scope of work*. Pada dasarnya, pekerjaan fisik proyek ini telah selesai namun peralatan ini belum dapat difungsikan karena kerusakan trafo tersebut. Sesuai penjelasan pihak PT PLN, perbaikan trafo tersebut memerlukan waktu sekitar 9 bulan sehingga akan melebihi masa laku LAyang akan berakhir pada bulan September 2013. Mengingat PT. PLN tidak berencana untuk memperpanjang masa laku LA, PT PLN diharapkan dapat menyiapkan anggaran PLN untuk membayar tagihantagihan yang tidak tercover LA dan memastikan bahwa proyek ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada Triwulan II Tahun 2013, terdapat beberapa hibah yang direncanakan dengan status pelaksanaan *on-going*, diantaranya hibah program MCC *Compact* yang berasal dari Pemerintah Amerika, hibah proyek dari Pemerintah Jepang, dan juga hibah Pemerintah Jerman.

Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact Program

Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah AS yang menyalurkan bantuan internasional dengan berfokus pada penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk MCC Treshold dan MCC Compact. Program MCC Treshold merupakan program jembatan untuk memfasilitasi peningkatan beberapa indikator yang merupakan syarat kelulusan mutlak bagi negara mitra untuk dapat berpartisipasi dalam Program MCC Compact.

Tabel 48. Gambaran umum Hibah Amerika Serikat

Gambaran Umum		
Instansi Penanggung jawab	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	
Sumber Dana	Millennium Challenge Corporation (MCC)	
Waktu Efektif	2013 -2017 (5 Tahun)	
Nilai Hibah	USD 600.000.000	
	1) Green prosperity	
Lingkup pekerjaan	2) Community-based Nutrition Project	
	3) Procurement modernization project	

Hibah MCC sebesar USD 600 juta yang terhitung sejak 2 April 2013 digunakan untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut.

Tabel 49. Komponen Pembiayaan MCC

No.	Komponen	Nilai (USD)	%
1	Green Prosperity	332.500.000	55,4
2	Nutrition Project	131.500.000	22,0
3	Procurement Modernization	50.000.000	8,0
4	Administration and Control	75.800.000	12,6
5	Monitoring and Evaluation	10.200.000	2,0

1. Kinerja Pelaksanaan

Pencapaian kinerja output pelaksanaan proyek MCC pada Triwulan II TA 2013 adalah telah ditandatanganinya EIF (*Entry Into Force*) yang merupakan tahapan efektifnya *Grant Agreement* dijadwalkan pada tanggal 2 April 2013. Penandatanganan ini telah sesuai dengan target pelaksanaan pada Triwulan I tahun 2013. Selain itu, satker pengelola hibah MCC telah melakukan penyerapan dana yang ditujukan untuk program kesehatan (*Community-based Nutrition Project*) pada 2 Juli 2013. Dana ini langsung ditransfer dari *US Treasury* kepada *PSF World Bank*. Terkait dengan pelaksanaan proyek, PPK pengelola hibah MCC mengajukan

rencana penarikan PHLN tahun 2013 sebesar Rp. 196.032.500.000,00 (USD 20.635.000), diharapkan penyerapan anggaran dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2013 dengan rencana penyerapan per komponen dan per triwulan sebagai berikut:

Tabel 50. Rencana Pelaksanaan Hibah Amerika Serikat TA 2013

(dalam juta)

No	Komponen	Rencana Penyerapan TA 2013		Penyerapan Anggaran TA 2013 (USD)			
	•	IDR	ekiv USD	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Green Prosperity	76.000,00	8,00	0	0,550	2,350	5,100
2	Community-based Nutrition Project	42.607,50	4,49	0	0,000	2,200	2,285
3	Procurement Modernization Project	31.825,00	3,35	0	0,480	1,120	1,750
4	Monitoring and Evaluation	4.750,00	0,50	0	0,100	0,175	0,225
5	Program administration and control	40.850,00	4,30	0,175	1,498	1,141	1,486
	Total	196.032,50	20,64	0,175	2,628	6,986	10,846

Sampai Triwulan II, tahun 2013 MCC telahmelakukan penyerapan dana sebesar Rp. 189.831.600.000 (96,85 %) yang digunakan untuk program kesehatan (*Community-based Nutrition Project*).

Hibah Jepang

Pada Triwulan II Tahun 2013 tercatat terdapat beberapa proyek hibah *on-going* yang disalurkan melalui JICA oleh Pemerintah Jepang, diantaranya:

- Construction of Bridges in Nusa Tenggara Barat merupakan proyek peningkatan jalan lintas selatan Sumbawa dan Jaringan jalan lingkar Sumbawa Besar. Grant Agreement hibah ini telah ditandatangani tanggal 12 Januari 2010 dengan total komitmen senilai JPY 1.286 juta untuk fase I dan II (telah selesai). Grant Agreement fase III ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2013 dengan komitmen hibah senilai JPY 8.961 juta.
- Project for Strengthening the National Laboratory for Controlling the Highly Pathogenic Avian Influenza and Other Emerging and Re-emerging Infectious Diseases merupakan proyek peningkatan kelengkapan laboratorium di beberapa rumah sakit untuk meningkatkan ketahanan terhadap flu burung. G/A hibah ini telah ditandatangani tanggal 26 Maret 2013 dengan total komitmen senilai JPY 212 juta.
- Project for Improvement of Equipment for Disaster Risk Management merupakan proyek pengadaan perlengkapan untuk mitigasi bencana serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. G/A hibah ini telah ditandatangani tanggal 26 Maret 2013 dengan total komitmen senilai JPY 1.500 juta.

Hibah Jerman

Forest Programme adalah sebuah program yang dalam konstribusinya untuk mendukung Kebijakan pengguranggan emisi gas buang yang disebabkan dari kerusakan hutan dan degradasi hutan (REDD+). Forest Programme adalah program yang didanai oleh development partner (GIZ dan AusAID), dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab Kementerian Kehutanan.

Tabel 51. Gambaran Umum Hibah Forest Programme

Gambaran Umum			
Pengelola	Kementerian Kehutanan		
Sumber Dana	Grant TF 2007 66 087 (GIZ dan USAID)		
	a. Implementasi Pilot Proyek (REDD+)		
	b. Pembentukan dan pemantauan tingkat emisi pada Kabupaten yang terpilih		
Lingkup pekerjaan	c. Membangun mekanisme keuangan yang berkelanjutan dan distribusi		
	karbon		
	d. Jasa Konsultansi		
Lokasi Kalimantan (Malinau, Kapuas Hulu dan Berau)			
Durasi Proyek 2011-2018			
Nilai Hibah	ilai Hibah EUR 20.000.000		

1. Kinerja Pelaksanaan

Penandatanganan Separate Agreement pada bulan November 2010, mobilisasi konsultan pada bulan Maret 2011 dan pembentukan tim utama selesai pada Mei 2011. Dalam pelaksanaannya beberapa kendalaantara lain (i) Seleksi dan konsep pelaksanaan untuk kegiatan pendemonstrasian masih ditunggu, termasuk standar yang harus digunakan (ii) penundaan pembayaran jasa konsultan (iii) perjanjian untuk staf dan konsultan (iv) tidak mencukupinya dana DIPA untuk mendukung kegiatan dalam satu tahun.

2. Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan proyek sampai saat ini belum ada progress pekerjaan proyek, maka diharapkan pelaksana proyek dapat menyusun waktu rencana kerja proyek. Pelaksana proyek juga diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan melakukan revisi DIPA apabila diperlukan.

Hibah Lembaga-Lembaga PBB

Berdasarkan dokumen kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Lembaga-lembaga PBB (UNPDF 2011-2015), terdapat 17 perwakilan Lembaga PBB yang bekerjasama dengan Indonesia, dengan indikasi kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi target UNPDF sebesar USD 801,8 juta. Karakteristik kerjasama yang dijalankan lebih menekankan pada pembangunan kapasitas dan sumberdaya manusia, dengan fokus kerjasama pada 5 bidang yaitu: 1) pelayanan sosial; 2) penghidupan yang berkelanjutan; 3) tata kelola pemerintahan; 4) pengurangan resiko bencana; dan 5) perubahan iklim dan lingkungan hidup.

Dengan banyaknya variasi hibah, sebagai langkah awal pemantauan hibah luar negeri difokuskan kepada lembaga-lembaga PBB yang memiliki portofolio cukup besar di Indonesia. Pada triwulan II tahun 2013 dilakukan pemantauan terhadap beberapa kegiatan yang menjadi sampel pemantauan hibah luar negeri dari 6 Lembaga PBB baik untuk kegiatan yang berbasis proyek, maupun program yaitu UNDP, ILO, UNIDO, UNICEF, UNFPA dan FAO. Pemantauan dilakukan

melalui pertemuan triwulanan dan kunjungan lapangan untuk mendapatkan gambaran mengenai progres pencapaian output, permasalahan yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan.

United Nations Development Programme (UNDP)

Pada triwulan II TA 2013 dilakukan pemantauan terhadap 5 proyek UNDP yang telah dipantau pada triwulan sebelumnya dengan nilai total hibah sebesar USD 22.556,40.

Tabel 52. Daftar Proyek UNDP yang Dpantau Pelaksanaannya pada Triwulan II TA 2013

(Ekuivalen USD)

No.	Nama Proyek	Jumlah Hibah	
1	Support for Preparation Arrangement for Indonesia Climate Change Trust Fund (Prep-ICCTF)	11.336,5	
2	Deepening Democracy in Indonesia	596,1	
3	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project (BRESL)	1.661,5	
4	Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)	7.743,0	
5	Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTTDA)	1.219,3	
	Total 22.556,40		

1. Kinerja Penyerapan

Secara umum, realisasi penyerapan proyek UNDPpada triwulan II TA 2013 cukup baik. Hal ini ditandai dengan telah terserapnya dana hibah sesuai dengan perencanaan.

a. Support for Preparation Arrangement for Indonesia Climate Change Trust Fund (Prep-ICCTF)
Direncanakan pledge dana hibah untuk 3 pilot proyek akan terserap seluruhnya pada tahun
2014 sesuai dengan rencana. Terdapat dana sekitar USD 500.000 yang akan digunakan untuk
small grant bagi Universitas/NGO,oleh karena itu diharapkan proyek ini akan tutup pada tahun
2014tanpa adanya perpanjangan.

b. Deepening Democracy in Indonesia

Telah tercantum pada DIPA tahun 2013 sebesar Rp 2,5 milyar. Pada triwulan I, realisasi penyerapan adalah 19% dan pada triwulan II TA 2013 terjadi penyerapan yang sangat siginifikanyaitu sebesar Rp 1,5 milyar atau mencapai lebih dari 70% dari rencana awal. Hal ini disebabkan pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan secara masif di 14 Provinsi.

c. Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project (BRESL)

Pada triwulan II TA 2013, belum terdapat penambahan realisasi penyerapan untuk proyek ini. Hal ini dikarenakan proyek BRESL merupakan proyek regional dimana pencapaian standarisasi dan *labelling* sebagai output proyek tidak hanya ditentukan oleh Indonesia, namun juga oleh negara lain yaitu China.

d. Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)

Alokasi dana dalam DIPA tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2,2 miliar,pada triwulan II TA 2013, terdapat tambahan penyerapan dana sebesar Rp 828 juta, sehingga total realisasi penyerapan sampai dengan akhir triwulan II TA 2013 adalah sebesar Rp 1,6 milyar atau mencapai 73% dari rencana semula. Direncanakan pada triwulan III, akan ada penambahan dana hibah sebesar USD 500.000 untuk kegiatan MDGs yang dimasukkan dalam komponen PGSP, sehingga perlu dilakukan revisi DIPA.

e. Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTTDA)

Untuk proyek PTDDA, penyerapan hingga bulan Juni Tahun 2013 telah mencapai 40% dan sesuai dengan targetdalam AWP. Terdapat penambahan rencana penyerapan hibah untuk tahun 2013 sebesar USD 61,000 dari *carry forward* tahun 2012, sehingga rencana penyerapan hibah tahun 2013 menjadi sebesar USD 530,066.

2. Kinerja Pencapaian Output

Dari sisi pencapaian *output*, pelaksanaan proyek UNDP menunjukkan progres dan kemajuan pada triwulan II TA 2013 sesuai dengan perencanaan. Proyek Prep-ICCTF, sampai dengan tahun 2012 telah dilaksanakan *pilot project* di 3 K/L yaitu Kementerian Pertanian (mengukur emisi lahan gambut untuk lahan pertanian emisi rendah), BMKG (penyadaran perubahan iklim bagi nelayan dan petani) dan Kementerian Peridustrian (*assessment* pemakaian energi untuk 50 perusahaan *pulp/paper* dan baja).Pada tahun 2013 terdapat 3 pilot proyek yang akan dilaksanakan yaitu kelanjutan fase 2 di Kementerian Pertanian, mengkaji dampak perubahan iklim terhadap penyakit malaria dan demam berdarah di Kementerian Kesehatan, dan pengelolaan *wood pellet* serta lahan terlantar di Kementerian Kehutanan. Salah satu *lessons learned* yang penting dari proyek Prep-ICCTF ini adalah pencapaian proses transisi dari semula *international trust fund* menjadi *national trust fund*. Proses tersebut penting untuk didokumentasikan sebagai *lessons learned* bagi pemerintah dalam pengelolaan *trust fund*. Selain itu juga untuk mempersiapkan *exit strategy* dan keberlanjutan bagi satu proyek hibah luar negeri.

Pada proyek *Deepening Democracy in Indonesia*, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya pada triwulan II ini dilakukan kegiatan di 14 provinsi terkait dengan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), diperkirakan target output untuk proyek ini akan tercapai sesuai rencana.

Pencapaian output proyek BRESL masih terkendala dalam hal sinkronisasi antar negara yang terlibat dalam proyek ini, mengingat BRESL merupakan proyek regional. Beberapa draft peraturan sebagai output proyek sudah disusun, tinggal menunggu pengesahan oleh Kementerian untuk dijadikan landasan. Namun demikian, sampai dengan saat ini, belum dapat dirumuskan kesepakatan diantara stakeholder mengenai standar yang akan digunakan oleh industri.

Selanjutnya, pencapaian output untuk proyek PGSP dan PTDDA juga menunjukkan progres yang baik. Untuk proyek PGSP, dari 3 output yang dilaksanakan, keseluruhannyamenunjukkan capaian yang baik.PGSP dilaksanakan di 4 Provinsi pilot, dimana sejak Januari 2013 terdapat tambahan Aceh sebagai salah satu provinsi pilot PGSP. Dari pencapaian output tersebut, telah ada hasil-hasil menarik baik di tingkat nasional maupun daerah yang dapat dijadikan *lessons learned*. Telah ada diskusi untuk *scaling up* proyek PGSP pasca 2014 mengingat beberapa hal menarik yang dihasilkan oleh proyek perlu dipertajam, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran dan implementasi SPM. Kedepan, dengan adanya komponen MDGs yang masuk dalam PGSP di triwulan III, perlu ada koordinasi diantara dua kedeputian di Bappenas.

Proyek PTDDA memiliki 3 *output* yaitupengembangan kebijakan dan kerangka regulasi untuk pencegahan konflik, pembentukan sistem institusi untuk pencegahan konflik, dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan inisiatif pencegahan konflik. Untuk output 1,dokumen *conflict prevention framework* telah disusun dan dilakukan diseminasi, sesuai mandat UU no 7/2011, diharapkan pada Bulan September peraturannya turunan dalam bentuk PP sudah dapat diterbitkan. Untuk output ke-2 telah dibentuk tim koordinasi pembangunan perdamaian dan akan di-*launching* September 2013, sedangkan output ke-3 yaitu penyusunan panduan telah diselesaikan dan telah diuji coba di daerah.

3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

- a. Administratif, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hibah UNDP adalah pada pengajuan pagu DIPA untuk hibah, beberapa proyek UNDP tidak dapat mencantumkan nilai pasti pada awal tahun, sehingga K/L mengalami kesulitan untuk mencantumkan dalam DIPA. Oleh karena itu diusulkan agar pagu yang dicantumkan dalam DIPA adalah jumlah pasti yang dapat direalisasikan. Jumlah yang dicantumkan dapat pula mengacu pada AWP yang disepakati antara UNDP dan NPD.Adapun penambahan pagu hibah dalam DIPA dapat dilakukan pada saat revisi, sehingga tidak memengaruhi kinerja K/L. Selain itu perlu diadakan forum khusus untuk mendiskusikan masalah pencantuman hibah dalam DIPA.
- b. Substantif, beberapa permasalahan yang muncul antara lain adanya kendala dalam koordinasi antara stakeholder regional untuk proyek BRESL untuk menyepakati standarisasi dan labeling. Permasalahan lain muncul pada proyek PTDDA, dimana dalam UU no 7/2011 diamanatkan bahwa peraturan turunan dalam bentuk PP mengenai penanggulangan konflik sosial harus disusun dalam waktu 1,5 tahun, yaitu pada akhir tahun 2013. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala mengenai koordinasi lintas kementerian dalam pengajuan *draft* PP tersebut. Saat ini telah dilakukan diskusi intensif untuk mengkoordinasikan pengajuan ijin mengenai penyusunan PP tersebut.

International Labour Organization (ILO)

Terdapat 1 proyek yang bersumber dari ILO yaituSustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) dengan penanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dantotal nilai hibah sebesar USD 120.000. Adapun tujuan pelaksanaan proyek ini adalah untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) agar lebih maju dan berkesinambungan melalui peningkatan daya saing produktivitas dan dapat menyediakan lingkungan kerja yang layak.

1. Kinerja Penyerapan

Sebagian besar proyek ILO dilaksanakan langsung oleh ILO, termasuk pengelolaan dana hibah. Dengan demikian, Kementerian/ Lembaga belum mendapatkan informasi yang proporsional mengenai jumlah dana hibah yang telah direalisasikan untuk proyek ini.

2. Kinerja Pencapaian Output

Proyek SCORE difokuskan untuk meningkatkan UMKM agar mampu produktif dan kompetitif. Kegiatan telah dilaksanakan di 5 provinsi sebagai pilot project. Hasil proyek berupa 5 modul telah diaplikasikan dan telah dilakukan pendampingan terhadap UMKM. Pencapaian *ouput*, pada triwulan I TA 2013 telah dicapai 2 *ouput*, sedangkan 1 ouput lainnya masih dalam progress. Pada triwulan II TA 2013, berbagai upaya pencapaian output terus dilakukan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mentargetkan pendampingan UMKM tahun ini adalah sebanyak 15 provinsi. Proyek ini SCORE cukup berhasil dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Oleh karena itu, telah dialokasikan dana pendamping untuk proyek ini dan direncanakan untuk dilakukan perluasan cakupan proyek dan memperpanjang pelaksanaan proyek sampai dengan tahun 2018. Adapun perluasan cakupan proyek tersebut mencakup koordinasi antara *implementing partner*, mengingat ILO tidak hanya bekerjasama dengan pemerintah, namun juga dengan swasta termasuk APINDO dan *Trade Union*. Diharapkan sampai dengan tahun 2018, *impact* dari proyek SCORE dapat lebih signifikan.

3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi antara lain dalam hal administrasi. Kementerian/ Lembaga mengalami kesulitan untuk melaporkan progres dan perkembangan realisasi hibah mengingat seluruh pelaksanaan proyek dilakukan oleh ILO. Disamping itu, ILO memiliki 3 mitra, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, APINDO dan Trade Union, sementara pemantauan dilakukan untuk hibah yang berada di Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, dikhawatirkan informasi yang disampaikan belum dapat menggambarkan pelaksanaan proyek secara utuh, karena hanya memuat pencapaian output dari sisi Kementerian/Lembaga saja.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Pada triwulan II TA 2013, pemantauan untuk hibah UNIDO dilakukan pada proyek *Promotion and Transfer of Marine Current Exploitation Technology in China and South East Asia* dibawah tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi. Proyek ini merupakan proyek berbasis riset untuk penyediaan pembangkit listrik tenaga arus laut di Desa Pringgabaya Kecamatan Ketapang Kabupaten Lombok Timur. Desa tersebut belum dialiri listrik, dengan penduduk sekitar 200 Kepala Keluarga. Nilai hibah yang diberikan adalah EUR 180.000. Dari sisi manfaat, meskipun dana hibah yang diberikan tidak terlalu besar, namun dukungan pembangkit listrik telah memberikan pengaruh sangat signifikan untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak di desa tersebut.

1. Kinerja Penyerapan

Hibah ini dikelola oleh UNIDO secara langsung dan diberikan dalam bentuk barang sehingga progress penyerapannya tidak dapat dilaporkan.

2. Kinerja Pencapaian Output

Proyek telah dimulai sejak tahun 2009. Dalam pelaksanaanya sampai dengan saat ini hampir semua peralatan sudah tersedia, hanya menunggu proses instalasi yang masih belum mendapat kepastian dari pihak UNIDO. Semua peralatan yang sudah tersedia tersebut diletakkan di Desa Pringgabaya Kecamatan Ketapang Kabupaten Lombok Timur tanpa pengawasan sehingga dikhawatirkan keamanannya. Hal ini terjadi karena status kepemilikan peralatan tersebut masih atas nama UNIDO dan belum ada kepastian untuk melanjutkan ataupun mengakhiri proyek yang ditandai dengan serah terima peralatan tersebut.

3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Sejak tahun 2009, pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan dan sampai saat ini belum ada progres pelaksanaan proyek. Salah satu penyebab keterlambatan tersebut antara lain adanya kendala dalam komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan proyek. Meskipun untuk mengatasi permasalahan komunikasi ini telah dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, namun masih belum ada progres berarti dalam pelaksanaan proyek.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat kesan bahwa UNIDO mengalami kesulitan untuk menyelesaikan proyek dan membuka ruang bagi pihak-pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan proyek tersebut, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN. Penundaan penyelesaian proyek telah berdampak pada bertumpuknya permasalahan, tidak

hanya dari sisi Kemristek dan UNIDO, namun juga dari sisi pemerintah daerah, mengingat pemda juga telah menyediakan dana pendukung untuk proyek tersebut.

Kementerian Riset dan Teknologi mengharapkan adanya kepastian mengenai kelanjutan proyek ini. Apakah UNIDO akan membatalkan dan menyerahkan penyelesaian proyek kepada Kementerian Riset dan Teknologi atau UNIDO akan tetap menyelesaikan proyek dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan adanya kepastian tersebut, dari pihak Kemristek dapat menindaklanjuti penyelesaian proyek apakah akan dibiayai oleh APBN atau mencari alternatif sumber pembiayaan lain.

Tindak lanjut terhadap permasalahan proyek tersebut adalah perlu dilakukan pembahasan khusus untuk mencari solusi terutama dengan melibatkan Kementerian PU, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, serta UNIDO dengan inisiasi dari Bappenas.

United Nations Children's Fund (UNICEF)

Kerjasama RI dan UNICEF dibagi dalam 5 klaster utama, yaitu Policy Advocacy and Partnership for Children's Rights, Young Child Survival and Development, Basic Education and Gender Equality, Child Protection dan Coordination Support. Pada Triwulan II TA 2013, pemantauan dilakukan terhadap klaster Child Survival and Development (CSD) yang terdapat di Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan KPAN. Sebagai gambaran, perlu disampaikan bahwa struktur pelaksanaan kegiatan hibah UNICEF adalah dalam lingkup program, dimana dokumen perencanaan dituangkan dalam CPAP (Country Programme Action Plan) dalam kurun waktu 5 tahun dan MYWP (Multi Year Work Plan) dalam kurun waktu dua tahun. Capaian kegiatan dilaporkan dalam bentuk intermediate result.

1. Kinerja Penyerapan

Realisasi penyerapan program UNICEF yang dilaksanakan oleh Bappenas pada triwulan II TA 2013 adalah sebesar Rp 1,2 milyar dari rencana Rp 1,9 milyar. Adapun total penyerapan yang telah tercantum dalam DIPA adalah sebesar Rp 3,5 milyar. Sementara untuk KPAN, pada triwulan II TA 2013 terdapat tiga kegiatan yang merupakan kelanjutan dari triwulan I yaitu: 1) finalisasi pemetaan orang muda beresiko sebagai dasar pengembangan *policy brief* dan SOP di daerah dengan jumlah dana sebesar Rp30,78 juta,2) pengembangan perpustakaan digital untuk materi komunikasi dalam mendukung strategi penyebaran informasi mengenai HIV dan AIDS dengan jumlah dana sebesar Rp 20,7 juta; dan 3) *Assessment* bersama tentang penggunaan ART untuk mengurangi infeksi HIV yang berkaitan dengan mortalitas dan pencegahan penularan HIV di Indonesia dengan jumlah dana sebesar Rp 228 juta.

2. Kinerja Pencapaian Output

Dari sisi pencapaian output, komponen program UNICEF yang dilaksanakan di Bappenas menitikberatkan pada manajemen program, peningkatan komunikasi, informasi, edukasi serta monitoring dan evaluasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kegiatan dilaporkan pada tingkat intermediate result. Secara umum, kegiatan koordinasi untuk program-program UNICEF dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dalam hal review program, pokja CSD seharusnya melakukan pertemuan monitoring dan review setiap triwulan, namun dalam pelaksanaanya laporan dari K/L tidak dapat disampaikan setiap triwulan. Laporan lengkap diperoleh pada saat annual review pada akhir tahun.

Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2012-2013 kegiatan difokuskan di provinsi Sulawesi Barat dan Papua. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi melalui pemberian *technical assistance* dalam penyusunan dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di daerah.

Sementara pada triwulan II TA 2013, kegiatan yang dilaksanakan oleh KPAN telah menghasilkan output berupa panduan pemetaan orang muda berisiko tertular HIV (dua bahasa), policy brief mengenai rekomendasi teknis pemetaan orang muda berisiko tertular HIV (dua bahasa), sedangkan untuk perpustakaan digital, saat ini sedang dalam proses penyelesaian. KPAN juga telah melakukan assessment terhadap penggunaan ART untuk mengurangi infeksi HIV yang dilaksanakan di Jakarta, Bandung, Sukabumi dan Bali.

3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Secara umum kegiatan hibah UNICEF masih terkendala oleh permasalahan penyaluran hibah ke daerah karena tidak sesuai dengan PP no 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah dalam mencari solusi melalui diskusi secara intensif antara Pemerintah, UNICEF dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan UNICEF. Proses penyelesaian permasalahan hibah tersebut dapat dilihat secara singkat pada Box 1.

Permasalahan dalam lingkup yang lebih teknis adalah dalam hal pencantuman dalam DIPA. Hal ini disebabkan seringkali terjadi perubahan pagu untuk kegiatan UNICEF yang disetujui dan harus berjalan di tengah tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun seringkali juga mengakibatkan proses pengesahan mengalami keterlambatan. Salah satu solusi bagi permasalahan ini adalah disarankan pencantuman DIPA pada awal tahun tidak terlalu besar dan hanya mencantumkan hibah yang telah pasti. Penambahan pagu hibah dalam DIPA dimungkinkan pada saat revisi.

Proses pemantauan triwulanan di Bappenas juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan *review* program oleh pokja *review*. Dalam hal ini, disarankan agar mekanisme pemantauan pemerintah dan UNICEF perlu diselaraskan, termasuk dalam hal format pelaporan untuk memudahkan proses pemantauan triwulanan, baik oleh pokja review maupun oleh Bappenas.

United Nations Population Fund (UNFPA)

Seperti halnya UNICEF, pelaksanaan kegiatan UNFPA di Indonesia saat ini dilakukan melalui pendekatan berbasis program dan dituangkan dalam CPAP 2011-2015. Sampai dengan periode 2011-2015, kerja sama RI – UNFPA telah masuk dalam siklus ke-8 (*Country Programme* – 8). Pada triwulan II TA 2013, pemantauan dilakukan pada program UNFPA yang dilaksanakan oleh BKKBN, BPS dan Bappenas.

1. Kinerja Penyerapan

Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN, dilaporkan bahwa realisasi penyerapan untuk 3 output sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 453 juta, atau sekitar 10,2%. Anggaran untuk kegiatan UNFPA di BKKBN tercantum dalam DIPA sebesar Rp 5,6 milyar, namun perlu direvisi karena terdapat penambahan dana dari UNFPA menjadi Rp 7,1 milyar. Sedangkan untuk kegiatan UNFPA di BPS, realisasi hibah pada triwulan II TA 2013 sebesar USD 65,286, atau sebesar 62% dari rencana penyerapan triwulan II. Sementara untuk kegiatan UNFPA di Bappenas, realisasi sampai dengan triwulan II TA 2013 adalah sebesar USD 41,219 dari rencana penyerapan

USD 51,439. Bappenas sendiri telah mencantumkan dalam DIPA untuk hibah UNFPA sebesar Rp. 1,5 milyar.

2. Kinerja Pencapaian Output

Dari sisi kinerja pencapaian output, kegiatan hibah UNFPA di pusat dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BKKBN misalnya, telah bekerjasama dengan UNFPA sejak CP-5 dan sampai dengan saat ini terus melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bappenas. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS, berbagai capaian output telah diperoleh, seperti pencetakan publikasi dokumentasi komprehensif SP2010 dalam versi bahasa inggris, hasil evaluasi data kematian penduduk kab/kota, meningkatnya kapasitas SDM melalui berbagai workshop, serta tersusunnya buku panduan nasional mengenai isu data situasi krisis kemanusiaan.

3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan umum yang terjadi dalam kegiatan hibah UNFPA berkaitan dengan penyaluran hibah ke daerah. Pemerintah bersama dengan UNFPA dan instansi terkait lainnya saat ini juga sedang melakukan diskusi intensif untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Sebagian besar hibah UNFPA yang dilaksanakan di daerah sampai dengan saat ini masih tertunda dan menunggu keputusan mengenai mekanisme yang akan digunakan. Langkah tindak lanjut atas permasalahan ini dapat dilihat pada Box 1.

Permasalahan lain adalah berkaitan dengan mekanisme pelaporan dan pemantauan, dimana disarankan agar format pelaporan triwulanan yang dilakukan oleh Bappenas dapat disinergikan dengan format-format pelaporan yang telah ada.

Box 2. Upaya Penyelesaian Permasalahan Hibah UNICEF dan UNFPA yang Dilaksanakan di Daerah

Dalam rangka mencari solusi atas permasalahan pelaksanaan hibah UNICEF dan UNFPA yang dilaksanakan di daerah serta penyaluran dana hibah UNICEF dan UNFPA ke daerah, Pemerintah Indonesia bersama dengan UNICEF, UNFPA dan pihakpihak terkait lainnya melaksanakan koordinasi secara intensif untuk membahas langkah yang tepat dan dapat diimplementasikan namun tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi Pemerintah Indonesia maupun dari sisi UNICEF dan UNFPA.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, disepakati bahwa hibah UNICEF dan UNFPA akan dijadikan sebagai hibah pemerintah pusat, dimana Kementerian/ Lembaga akan bertindak sebagai implementing partner untuk hibah UNICEF dan UNFPA baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, UNICEF dan UNFPA hanya menyalurkan dana kepada Kementerian/ Lembaga di pusat dan tidak ada penyaluran dana kepada SKPD di daerah.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, disepakati bahwa UNICEF dan UNFPA akan menyesuaikan dokumen perencanaan program dalam bentuk "Program Document". Program Document tersebut akan memuat komponen kegiatan yang dilaksanakan pada setiap Kementerian/ Lembaga dan akan ditandatangani antara Sekjen pada K/L dengan Donor (UNICEF/ UNFPA). Saat ini Pemerintah bersama dengan UNICEF dan UNFPA sedang menyusun Program Document dengan mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu CPAP, MYWP untuk UNICEF dan Annual Work Plan.

UNICEF dan UNFPA menyambut positif mengenai solusi tersebut. Dari pihak UNICEF secara lebih khusus menyampaikan bahwa dengan adanya Program Document pada K/L di pusat, akan memudahkan koordinasi UNICEF dengan implementing partner, yang semula berjumlah sekitar 140 instansi di pusat dan daerah menjadi hanya sekitar 10 Kementerian/ Lembaga.

Hal ini juga menunjukkan bahwa donor, dalam hal ini UNICEF dan UNFPA bersedia untuk menyesuaikan mekanisme kerja sama agar tetap sejalan dengan peraturan dan ketentuan Pemerintah.

Food and Agriculture Organization (FAO)

Terdapat dua proyek hibah FAO yang dipantau pada triwulan II TA 2013 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, yaitu:

Tabel 53. Daftar Proyek FAO yang Dipantau Pelaksanaannya pada Triwulan II TA 2013

(Ekuivalen USD)

No	Nama Proyek	Periode Pelaksanaan	Jumlah Hibah
1	Reinforcement and Expansion of the Al Participatory Disease	Juni 2006 – Mei 2010, diperpanjang	USD 44,200,000
	Surveillance and Response Program in Indonesia	tanpa penambahan biaya hingga 30	
	(OSRO/INS/604/USA)	Juni 2013	
2	Enhancing the Capacity of the Government of Indonesia and	Januari – September 2012,	USD 13,400,000
	Partner to Control Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)	diperpanjang sampai dengan 30	
	(OSRO/INS/103/USA)	September 2013	
	Total		USD 57,600,000

1. Kinerja Penyerapan

Pelaksanaan kegiatan hibah dan pengelolaan hibah dilakukan oleh FAO. Kementerian Pertanian menerima hibah dalam bentuk barang dan jasa. Saat ini, kedua proyek sedang dalam tahap BAST antara FAO dan Kementerian Pertanian dan telah disahkan kepada Kementerian Keuangan.

2. Kinerja Pencapaian Output

Secara teknis, kedua proyek telah selesai dilaksanakan. Untuk proyek Reinforcement and Expansion of the AI Participatory Disease Surveillance and Response Program in Indonesia, pekerjaan teknis telah selesai dilaksanakan. Saat ini sedang dalam proses distribusi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang tersebar di 27 Provinsi. Proses BAST untuk proyek ini telah dilakukan sejak awal dilaksanakannya proyek. Saat ini, BAST tahap III bagi 247 kendaraan roda 2 dan 16 kendaraan roda 4 sedang dalam proses pengecekan dokumen. Untuk proyek Enhancing the Capacity of the Government of Indonesia and Partner to Control HPAI, saat ini masih dalam proses BAST dengan pihak donor. Adapun dari sisi pencapaian output, telah banyak hasil yang diperoleh dari pelaksanaan proyek ini, baik dalam bentuk penyebaran dan penggunaan materi komunikasi, pelatihan dan workshop, maupun fasilitasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk swasta.

3. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang terjadi dalam proyek ini antara lain keterlambatan dalam pemrosesan dokumen untuk kendaraan yang menjadi hibah, antara lain untuk pajak, balik nama serta penerbitan STNK. Namun demikian, keseluruhan administrasi di pusat telah selesai untuk selanjutnya di serahkan kepada daerah sebagai Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.Untuk meningkatkan proses pemantauan oleh Kementerian Pertanian, akan dilakukan pertemuan triwulanan dengan FAO untuk pembahasan reporting agar tepat waktu.

Kunjungan Lapangan UN Joint Program – Merapi Volcanic Eruption Livelihood Recovery

United Nations Joint Program (UNJP) Merapi Volcanic Eruption Livelihood Recovery Programmemerupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan UN Agencies, yaitu UNDP, FAO dan IOM dengan skema joint program. Joint program tersebut dibiayai oleh IMDFF-DR (Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery) dan dilaksanakan pada tahun 2012-2013. Joint program tersebut difokuskan untuk mendukung kegiatan yang belum tercakup dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi) pasca bencana Gunung Merapi untuk Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Joint Program difokuskan pada pemulihan mata pencaharian masyarakat, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan ketahanan masyarakat (community resilience). Kunjungan dilaksanakan pada dua lokasi, yaitu huntap Pagerjurang di Desa Kepuharjo dan huntap Kuwang di Desa Agromulyo.

Beberapa program yang dilakukan dalam kerangka UN Joint Program ini antara lain:

- 1. Program Promosi Desa. Program ini dilaksanakan oleh IOM dan bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana Merapi. Secara keseluruhan, terdapat 600 KK yang menjadi cakupan pendampingan dari IOM. Melalui program ini, dibentuk kelompok-kelompok usaha untuk selanjutnya dilakukan pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai ekonomi.
- 2. Sistem Informasi Desa (SID). Program SID dilaksanakan oleh UNDP untuk mendukung pelaksanaan RENAKSI melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam bentuk web-based. SID memiliki tiga komponen, yaitu: i) data dan informasi kependudukan, ii) Early Warning System (EWS) melalui sms gateway dan siaran radio, dan iii) social audit dan monev program. Disamping itu, dilakukan sinergi antara SID dengan Tim Promosi Desa, dimana hasil produksi kelompok usaha yang telah dikembangkan dicantumkan dalam website tersebut untuk dipromosikan.
- **3. Social Audit.** Disamping mengembangkan SID, UNDP memberikan dukungan dalam bentuk pengembangan social audit sebagai salah satu metode yang digunakan untuk melakukan audit secara kinerja dan keuangan dari kegiatan yang dilaksanakan.
- **4. Pengembangan Kandang Komunal.** Program ini dilaksanakan oleh FAO di dua lokasi, yaitu huntap Kuwang, desa Agromulyo, DIY dan desa Blogkeng, Jawa Tengah. Huntap Kuwang dihuni oleh 260 KK yang berasal dari 11 dusun di desa Agromulyo. Pengembangan kandang komunal ini merupakan bentuk *recovery asset* terhadap ternak warga yang musnah akibat bencana Merapi. Konsep pengembangan kandang komunal dilakukan dengan mengenalkan perspektif PRB, serta pembekalan keterampilan dan inovasi bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan.
- 5. Lessons Learned. Beberapa pembelajaran tersebut antara lain sinergi antar program dan mekanisme koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga UN dalam satu kerangka UN Joint Program, pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dan subjek dalam proses rehab-rekon pasca bencana Merapi, kesinambungan (sustainability) program melalui pembangunan struktur dan sistem di tingkat masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan melanjutkan program secara swadaya, serta perspektif pengurangan risiko bencana yang diterapkan dalam pelaksanaan UN Joint Program.

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI

Urban Sector Development and Reform Project 4886-IND (Bank Dunia)

Tujuan Proyek

- (i) Menfasilitasi kemandirian daerah dalam pembangunan infrastruktur perkotaan,
- (ii) Menyediakan pelayanan publik dan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan,dan

Proyek USDRP didanai pinjaman Bank Dunia dengan nilai komitmen pinjaman IBRD sebesar USD 45 Juta dan hibah PHRD sebesar USD 5 Juta. Secara umum, sebagian besar keluaran kegiatan telah tercapai di akhir masa proyek dengan tingkat penyerapan dana pinjaman sebesar 94.85%. Hingga laporan ini dituliskan proses penyusunan Project Completion Report masih dilakukan. Beberapahasil pembelajaran proyekakan disampaikan dalam laporan ini.



dan akuntabilitas, reformasi pengadaan, serta reformasi pengelolaan keuangan daerah

Desain proyek multi-intervensi dan multistakeholder. Kegiatan USDRP menggunakan pendekatan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah dengan pelaksanaan subproyek investasi sebagai insentif. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.Dalam proyek USDRP, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut difasilitasi dengan membentuk Inter-Ministerial Steering Committee(IMSC) untuk

memberikan masukan kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan proyek. Desain USDRP juga sejak awal telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan perkotaan oleh pemerintah daerah, yakni melalui pembangunan kelembagaan (melalui pembentukan Unit Informasi Pembangunan Permukiman dan Bangunan) serta pengembangan kebijakan (melalui penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional/KSPN dan Daerah/KSPD).

Perubahan desain proyek selama pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan dalam desain USDRP. Jumlah ULGs menjadi lebih sedikit dari target semula (13 ULGs menjadi 10 ULGs) karena terdapat pemerintah daerah yang tidak dapat menyelesaikan penandatanganan perjanjian SLA tepat waktu. Perubahan target indikator kegiatan juga dilakukan terhadap indikator reformasi pengadaan disebabkan adanya kesenjangan antara peraturan pengadaan daerah dan target indikator. Namun secara umum perubahan tersebut tidak merubah tujuan awal proyek.

Aspek operasi dan pemeliharaan dari kegiatan konstruksi. Subproyek investasi yang dipilih merupakan kegiatan pembangunan fasilitas umum yang menghasilkan keuntungan (revenuegenerating) dan masih dalam ranah Ditjen Cipta Karya Kementerian PU sebagai executing agency. Belum semua fasilitas umum yang dibangun dapat beroperasi penuh hingga masa laku proyek berakhir. Meskipun aspek operasi dan pemeliharaan bangunan tidak masuk dalam lingkup proyek, namun ke depannya aspek ini sebaiknya menjadi bagian dari perencanaan kegiatan civil works sejenis untuk memastikan keberlanjutan.

Mekanisme penerusan pinjaman dalam pelaksanaan pinjaman luar negeri. Lamanya pemrosesan perjanjian penerusan pinjaman (SLA) juga menjadi pembelajaran penting dalam pelaksanaan pengelolaan proyek USDRP. Pada tahun 2011, proses persetujuan DPR atas anggaran SLA proyek yang tidak kunjung selesai menjadi salah satu penyebab utama dari tidak adanya penyerapan dana pinjaman USDRP pada tahun tersebut, selain dari proses persetujuan IMSC terhadap ULGs baru yang memakan waktu lama. Hal ini yang juga kemudian menyebabkan masa laku proyek perlu diperpanjang untuk menyelesaikan kegiatan subproyek. Kedepannya, minimalisasi risiko keterlambatan akibat faktor eksternal perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan instrumen penyaluran dana pinjaman luar negeri.

Desain dan pelaksanaan proyek USDRP sedikit banyak telah mampu menjawab tantangan akan semakin tingginya tuntutan terhadap peran pemerintah daerah untuk membangun wilayah perkotaannya. Pembelajaran dari proyek USDRP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan perkotaan yang efektif, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

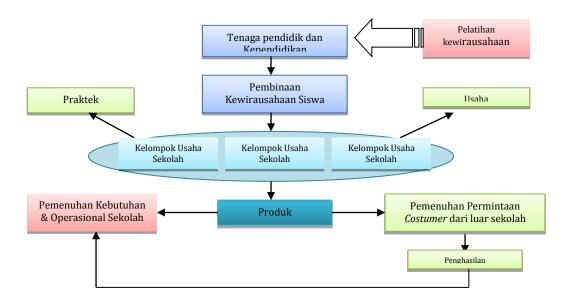
Vocational Education Strenghtening Project (INVEST), 2416-INO(ADB)

Proyek Vocational Education Strengthening Project (INVEST) adalah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan SMK bertaraf internasional sehingga mampu meningkatkan kesempatan bagi lulusan SMK di pasar kerja dan menjamin tercukupinya tenaga kerja ahli dan terampil untuk pengembangan ekonomi Indonesia dan dunia industri. Proyek yang akan berakhir pada November 2013 ini didanai melalui pinjaman ADB dengan nilai USD 77,9 Juta. Meskipun baru akan selesai di akhir tahun 2013, proyek yang dilaksanakan di 90 SMK model dan 230 SMK aliansi ini telah menyelesaikan seluruh kegiatan fisik. Proyek INVEST terdiri dari empat lingkup proyek yaitu (i) Refokus pengembangan manajemen sekolah dengan pendekatan bisnis, (ii) meningkatkan kualitas pembelajaran, (iii) penguatan kemitraan antara sekolah dan industri, dan (iv) penajaman model pembelajaran kewirausahaan. Hingga Juni 2013, proyek ini telah menyerap USD 76,31 Juta atau 97,96 % dari total pinjaman.

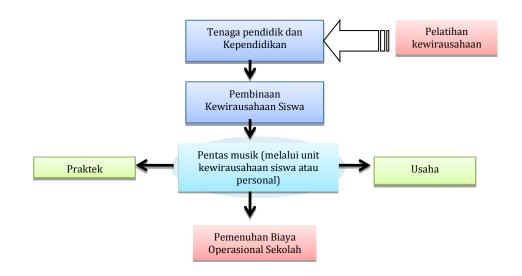
Tabel 54. Gambaran Umum Vocational Education Strenghtening Project (INVEST), 2416-INO Pinjaman ADB

Gambaran Umum			
Kode Proyek	2416-INO		
Nama Proyek	Vocational Education Strengthening Project (INVEST)		
Sumber Pembiayaan	ADB		
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Pendididkan Menengah		
Nilai Pinjaman	USD 77,90 juta		
Pinjaman Efektif	9 Juni 2008		
Pinjaman Berakhir:	30 November 2013		

Salah satu poin utama pembelajaran dari proyek ini adalah *refocusing* pengembangan manajemen sekolah dengan pendekatan bisnis dan penajaman model pembelajaran kewirausahaan yang dilakukan di SMK berbasis teknologi dan SMK berbasis kesenian.



Gambar 7. Refocusing pengembangan manajemen SMK berbasis teknologi



Gambar 8. Refocusing pengembangan manajemen SMK berbasis kesenian

Pembelajaran positif dari proyek ini adalah mekanisme pelaksanaan proyek yang diberikan dalam bentuk hibah uang ke sekolah memberikan keleluasaan bagi sekolah dalam mengelola dana dengan baik. Misalnya,untuk proyek fisik di SMKN 2 Yogyakarta, diterapkan sistem swakelola sehingga sekolah dapat melakukan efisiensi dana hingga Rp. 400 juta. Hasil dari efisiensi tersebut kemudian dialokasikan untuk penambahan ruang kelas baru. Selain itu, mekanisme ini juga membuat sekolah dapat mengupayakan untuk memperoleh barang dan jasa yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada pasca pelaksanaan proyek.

Adapun pembelajaran negatif yang didapatkan dari proyek ini adalah kurangnya pengetahuan mengenai aturan bangunan cagar budaya yang menyebabkan proyek sempat terlambat sehingga tidak memperoleh *reward*, meskipun pelaksanaan secara keseluruhan cukup baik. Untuk proyek yang berhubungan dengan bangunan cagar budaya di masa mendatang seharusnya dapat mengantisipasi permasalahan tersebut pada saat persiapan/rencana pelaksanaan kegiatan. Secara umum, proyek yang akan berakhir pada bulan November 2013 ini dinilai berhasil dan akan

dilanjutkan dengan menambah dan mengembangkan sekolah model aliansi melalui pembiayaan APBN.

Madrasah Education Development Project, 2294-INO (SF) (ADB)

Madrasah Education Development Project (MEDP) merupakan kegiatan yang didanai pinjaman AsianDevelopment Fund (ADF) ADB sebesar USD 52,20 jutadan dari pemerintah Indonesia sebesar USD 21 juta yang bertujuan untuk mencapai standar nasional melalui peningkatan profesionalisme guru, peningkatan sumber daya belajar mengajar, peningkatan efisiensi internal madrasah, dan peningkatan tata pemerintahan, pengelolaan dan kelangsungan yang lebih baik. Proyek ini efektif pada tanggal 15 Juni 2007 dan telah berakhir pada 31 Desember 2012. Proyek ini dilaksanakan di 500 madrasah di 27 kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 55. Gambaran Umum Madrasah Education Development Project, 2294-INO (SF)

Gambaran Umum		
Kode Proyek	2294-INO (SF)	
Nama Proyek	Madrasah Education Eevelopment Projct (MEDP)	
Sumber Pembiayaan	ADB	
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Agama, Ditjen Pendididkan Agama Islam	
Nilai Pinjaman	USD 52,20 juta	
Pinjaman Efektif	15 Juni 2007	
Pinjaman Berakhir:	30 Desember 2012	

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai sebagian besar target output dan menjadikannya sebagai salah satu *success project* yang didanai dari pinjaman. Salah satu target yang tidak tercapai adalah target sertifikasi guru yang disebabkan oleh adanya faktor eksternal, yaitu perubahan kebijakan sertifikasi guru. Adapun beberapa indikator keberhasilan utama dari proyek ini adalah (i) peningkatan nilai rata-rata kelulusan di tingkat MTS, MI, dan MA; (ii) penurunan disparitas nilai di ketiga provinsi proyek, serta (iii) peningkatan kepercayaan masyarakat akan kualitas madrasah.

Beberapa prakarsa yang dihasilkan dari kegiatan MEDP adalah buku elektronik, aplikasi "Buku Cendekia" untuk smartphone dan tablet, pendirian pusat ilmu pengetahuan madrasah yang dikelola di bawah OSIS, *Madrasah Science Expo* sebagai wadah untuk menampilkan karya siswa madrasah, buku penelitian madrasah yang dihasilkan oleh kepala sekolah, guru, dan siswa madrasah, Buku "Madrasah Rumah Belajarku", video dokter pendidikan, siaran televisi Pendidikan Madrasah, festival film pendek oleh siswa madrasah, gerakan "Koin Perpus", film yang berisi inspirasi, dan *Madrasah Peradaban Foundation*.

Setidaknya terdapat dua pembelajaran utama yang dapat diambil dari proyek ini. Pertama adalah pengembangan madrasah berbasis MEDP dapat dijadikan sebagai model pengembangan madrasah lain dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui MEDP, partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan madrasah meningkat. Dalam beberapa contoh, masyarakat juga membantu dalam hal penyediaan lahan, pembangunan kelas, dan pembiayaan kegiatan siswa.

Pembelajaran kedua adalah keberhasilan proyek ini untuk memenuhi standar akreditasi nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk merancang akreditasi madrasah yang lebih komprehensif, diperlukan keterlibatan semua pihak karena berhubungan dengan kapasitas Badan

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) untuk melaksanakan akreditasi dalam hal alokasi anggaran dan jumlah evaluatornya.

Integrated Diponegoro University Development Project, IND-0109/0110 (IDB)

Proyek pembangunan Universitas Diponegoro bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan perluasan aksesnya, melalui pengembangan universitas yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan rumah sakit pendidikan. Dalam proyek ini pembangunan 12 gedung baru (termasuk Rumah Sakit Pendidikan) beserta infrastruktur pendukungnya, pengembangan kurikulum dan *training staff*, serta pengadaan peralatan laboratorium dan rumah sakit. Total nilai pinjaman IDB untuk proyek ini sebesar USD 33 juta.

Tabel 56. Gambaran Umum Integrated Diponegoro University Development Project, IND-0109/0110

Gambaran Umum		
Kode Proyek	IND-0109/0110	
Nama Proyek	Integrated Diponegoro Univeristy Development	
Sumber Pembiayaan	IDB	
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Pendididkan Tinggi	
Nilai Pinjaman	USD 25,19 juta	
Pinjaman Efektif	15 Juli 2006	
Pinjaman Berakhir:	31 Desember 2011	

Proyek ini telah mengintegrasikan Universitas Diponegoro yang sebelumnya terletak di dua lokasi Kampus Peleburan dan Kampus Tembalang, menjadi satu di Kampus Tembalang saja. Secara khusus, proyek ini juga mendukung pengembangan Fakultas Kedokteran sehingga memiliki Rumah Sakit Pendidikan dari sebelumnya di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Adanya Rumah Sakit Pendidikan yang berdiri sendiri merupakan katalisator bagi pengembangan pendidikan dokter selanjutnya di masa yang akan datang.

Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki. Kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana selain mempermudah akses bagi para siswa, juga menunjukkan kemampuan serta daya saing perguruan tinggi untuk dapat lebih berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya, bahkan pada tingkatan internasional.

Meskipun dalam implementasinya, terdapat sebagian fasilitas/kegiatan (*project scope*) yang tidak cukup dibiayai dari porsi pinjaman, namun secara keseluruhan kegiatan pembangunan kampus baru Universitas Diponegoro Semarang dapat diselesaikan, termasuk pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung, terutama untuk laboratorium dan peralatan Rumah Sakit Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *Executing Agency*, tetap menyelesaikan pembangunan gedung tersebut melalui dana APBN, sebagai bentuk komitmen untuk mencapai seluruh *output* proyek.

Rehabilitation for Muara Karang Power Plan Project, IP-512 (JICA)

Tujuan *Muara Karang Gas Power Plant Project* adalah untukmeningkatkan pasokan listrik di Jawa dan Bali dengan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di Muara Karang dari semula 240MW menjadi 700MW. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan memodifikasi pembangkit listrik konvensional (tenaga bahan bakar solar) di Muara Karang dengan menambahkan modul pembangkit listrik tenaga gas alam sehingga menjadi pembangkit listrik dengan gabungan tenaga bahan bakar solar dan gas alam. Masa Pelaksanaan proyek: 28/05/2008 – 30/09/2012.

Tabel 57. Gambaran Umum Rehabilitation for Muara Karang Power Plan Project, IP-512 Pinjaman JICA

Gambaran Umum						
Kode Proyek	IP-512					
Nama Proyek	Muara Karang Gas Power Plant Project					
Instansi Penanggung jawab	PT PLN					
Nilai Pinjaman	JPY 55.750.000.000					
Lokasi	Muara Karang, Jakarta Utara					
Penandatanganan Pinjaman	22 Juli 2003					
Pinjaman Efektif	5 April 2004					
Pinjaman Berakhir :						
- Original	5 April 2012					
- Perpanjangan	31 Desember 2012					

Pelaksanaan proyek ini terbagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu: (i) konstruksi pembangkit listrik (Unit 1: *Turbine Generators and Auxiliaries*, Unit 2: *Steam Turbine Generators and Auxiliaries*, Unit 3: *Gas Turbine Switchyard and Transmission Lines*, Unit 4: *PLTU and PLTGU Switchyard*), (ii) Konsultasi dan supervisi yang meliputi *review* studi kelayakan, penyusunan DED, supervisi lelang, pelatihan operator.Pencapaian output proyek diturunkan dari 4 unit paket yang telah disebutkan di atas.

Tabel 58. Pencapaian Output Pembangunan Power Plant

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	No	Komponen	Satuan	Jumlah
1.	Combined Cycle Power Plant	Unit	1	12.	Steam Turbine Generator	Unit	3
2.	Gas Turbine	Unit	2	13.	Gas Turbine Generator Transformer	Unit	2
3.	Steam Turbine	Unit	3	14.	Steam Turbine Generator Transformer	Unit	3
4.	Heat Recovery System Generator (HRSG)	Unit	2	15.	PLTU Switchyard	Diameters	10
5.	Bypass Stack	Unit	2	16.	PLTGU Switchyard	Diameters	7
6.	Desalination Plant	Unit	2	17.	Durikosambi Substation	Unit	1
7.	Demineralized Water System	Unit	1	18.	Petukangan Subst	Unit	1
8.	Chlorination Plant	Unit	2	19.	Trans. Line (Muara Karang PLTU – Muara Karang PLTGU)	Km	0,6
9.	Light Oil Treatment System	Unit	1	20.	Trans. Line (Muara Karang PLTU – Durikosambi Substation)	Km	11,7
10.	Light Oil Storage Tank	Unit	1	21.	Trans. Line (Muara Karang PLTGU – Durikosambi Substation)	Km	11
11.	Gas Turbine Generator	Unit	2	22.	Trans. Line (Durikosambi Subst – Petukangan Subst)	km	9,5

a. Proses Konstruksi

Konstruksi dilaksanakan dalam rentang waktu sebagai berikut:

- Unit-1: 17 Desember 2007 s.d 17 Juni 2009
- Unit-2: 17 Desember 2007 s.d 4 April 2011
- Unit-3: Partial Taking Over
- Unit-4: Partial Taking Over

Pelaksanaan konstruksi dimulai dengan melakukan pembongkaran terhadap unit pembangkit lama, untuk kemudian dilakukan konstruksi terhadap unit pembangkit baru. Pembongkaran dan pembangunan dilakukan secara bertahap untuk menghindari kekurangan pasokan listrik di Jakarta. Unit pembangkit lama dapat dinonaktifkan seluruhnya pada bulan Januari 2010. Selesainya proyek ditandai dengan selesainya konstruksi unit-2 pada bulan April 2011. Setelah itu dibutuhkan masa garansi selama 12 bulan.

b. Proses Konsultansi dan Supervisi

Jasa konsultasi dan supervisi direncanakan untuk berlangsung dari 1 Juli 2004 sampai dengan 31 Juli 2009, namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali amandemen hingga mengalami keterlambatan sampai dengan 2 Mei 2012.

Pembangunan terdiri dari 7 bangunan gedung fakultas dan 5 bangunan penunjang kampus. Pelaksanaan pembangunan berlangsung sejak bulan Desember 2008 dan selesai seluruhnya pada bulan Oktober 2010.

c. Amandemen Kontrak

Pembiayaan proyek ini dilakukan dengan dua macam kontrak yaitu EPC (Engineering, Procurement, Construction) contract dan Engineering Service contract dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 59. Pembiayaan Proyek

(dalam juta)

No	Contract	For	reign Curr	ency	Local Currency	Amandemen	Fore	ignn Curr	ency	Local Currency
		USD	JPY	EUR	IDR		USD	JPY	EUR	IDR
1	EPC	125	33.666	-	373.443	(11) 19 Nov 2012	129	37.780	-	409.253
2	E/S	-	1.134	1,1	54.602	(3) 4 April 2012	-	1.421	1,2	68.914

Selama pelaksanaan proyek, terjadi 11 kali amandemen kontrak EPC yang difinalkan pada 19 November 2012 dan 3 kali amandemen kontrak E/S yang difinalkan pada 4 April 2013. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa *lesson learned* dari proyek ini diantaranya adalah:

- i. Keterlambatan dalam pelaksanaan konstruksi disebabkan oleh terlambatnya *supply* gas, penundaan pemasangan *switchyard*, *substation*, *transmission line*, dan penundaan pembongkaran pembangkit lama.
- ii. Terlalu banyak dilakukan amandemen kontrak (11 kali pada kontrak EPC) berimbas pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan konstruksi.
- iii. Penggunaan empat jenis mata uang (USD, JPY, EUR, IDR) pada kontrak akan mempersulit proses pembayaran. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya banyak amandemen kontrak.

Seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa berlaku pinjaman pada 31 Desember 2012. Secara umum, kinerja pelaksanaan proyek *Muara Karang Gas Power Plant Project* dapat dikatakan memuaskan.

Muara Tawas Gas Power Plant Project IP-513 (JICA)

Tujuan *Muara Tawar Gas Power Plant Project* adalah untukmeningkatkan pasokan listrik di Jawa dan Bali dengan memodifikasi pembangkit listrik konvensional di Muara Tawar dengan menambahkan modul pembangkit listrik tenaga gas alam sehingga menjadi pembangkit listrik dengan gabungan tenaga bahan bakar solar dan gas alam dengan kapasitas terbesar di Jawa dan Bali yaitu 1800MW. Masa Pelaksanaan proyek : 12/09/2008 – 30/09/2012.

Tabel 60. Gambaran Umum IP-513 Muara Tawar Gas Power Plant Project

Gambaran Umum						
Kode Proyek	IP-513					
Nama Proyek	Muara Tawar Gas Fired Power Plant Extension Project					
Instansi Penanggung jawab	PT PLN					
Nilai Pinjaman	JPY 18.182.000.000					
Lokasi	Bekasi, Jawa Barat					
Penandatanganan Pinjaman	22 Juli 2003					
Pinjaman Efektif	5 April 2004					
Pinjaman Berakhir :						
- Original	5 April 2012					
- Perpanjangan	31 Desember 2012					

Pelaksanaan proyek ini terbagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu: (i) *Mechanical Works*, (ii) Electrical Works, (iii) *Instrumentation and Control Works*, (iii) *Structure, Civil, and Building Works*, (iv) Konsultasi dan supervisi yang meliputi *review* studi kelayakan, *review* DED, supervisi lelang, pelatihan operator. Pencapaian *output* proyek diturunkan dari lingkup pekerjaan yang telah disebutkan di atas.

Tabel 61. Pencapaian Output Pembangunan Power Plant

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	No	Komponen	Satuan	Jumlah
1.	Gas Turbine	Unit	1	13.	Fire Detection & Protection Syst	Unit	4
2.	Steam Turbine and Auxiliaries	Unit	1	14.	HSD Fuel Oil Supply Syst.	unit	2
3.	Heat Recovery Steam Generator (HRSG)	Unit	1	15.	Generator and Auxiliaries	unit	4
4.	Feedwater System	Unit	4	16.	Med Voltage Switchgear	unit	1
5.	Desalination System	Unit	2	17.	LV Board	unit	9
6.	Demineralized Water System	Unit	2	18.	DC System	unit	2
7.	Make up water system	Unit	5	19.	Emergency Diesel Generator	unit	1
8.	Raw Water System	Unit	4	20.	Generator Transformer	unit	5
9	Waste Water System	Unit	9	21.	Substation and Appurtenances	unit	1
10.	Chlorination Plant	Unit	2	22.	Air Insulated Bus Work	unit	1
11.	Pressurized Air System	Unit	4	23.	High Voltage Circuit Breakers	unit	1
12.	Fuel Gas Supply System	Unit	2	24.	Disconnecting and Grounding Switches	unit	2

a. Proses review DED

Pada awal pelaksanaan proyek, dilakukan 83 kali pertemuan untuk me-review DED antara Desember 2008 sampai dengan 18 Februari 2010.

b. Proses Konstruksi

Proses kontruksi baru dapat dilakukan pada 20 Juni 2009 yang seharusnya dijadwalkan pada 1 Maret 2008. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pengadaan lahan. Proses konstruksi berakhir pada Desember 2012.

c. Proses Konsultasi dan Supervisi

Jasa konsultasi dan supervisi direncanakan untuk berlangsung dari 11 Mei 2004 sampai dengan 10 Februari 2008, namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala hingga mengalami keterlambatan sampai dengan 13 Oktober 2012.

Keterlambatan dalam pelaksanan jasa konsultasi dan supervise disebabkan oleh 1) terhambatnya masa pre-konstruksi karena terhentinya pasokan gas, (ii) perpanjangan negosiasi proses lelang, dan (iii) masalah pada pembebasan lahan.

d. Amandemen Kontrak

Pembiayaan proyek ini dilakukan dengan dua macam kontrak yaitu EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) contract dan *Engineering Service contract* dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 62. Pembiayaan Proyek

(dalam juta)

		Foreign Currency			Local		Foreign Currency				Local	
No Contract						Currency	Amandemen		Currency			
		USD	JPY	CHF	EUR	IDR		USD	JPY	CHF	EUR	IDR
1	EPC	49	1.544	80	50	216.848	(2) Dec 2012	49	1.863	80	-	216.848
2	E/S	-	450	-	1,9	25.577	(5) June 2012	-	770		2,4	33.991

Selama pelaksanaan proyek, terjadi 2 kali amandemen kontrak EPC yang difinalkan pada Desember 2012 dan 5 kali amandemen kontrak E/S yang difinalkan pada Juni 2013. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa *lesson learned* dari proyek ini diantaranya adalah:

- Keterlambatan dalam pelaksanaan konstruksi disebabkan oleh terlambatnya supply gas, perpanjangan negosiasi lelang, dan pembebasan lahan.
- Penggunaan lima jenis mata uang (USD, JPY, CHF, EUR, IDR) pada kontrak akan mempersulit proses pembayaran. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya banyak amandemen kontrak.

Seluruh pekerjaan dapat diselesaikan bertepatan dengan berakhirnya masa laku pinjaman pada 31 Desember 2012. Secara umum, kinerja pelaksanaan proyek *Muara Tawar Gas Fired Power Plant Extension Project* dapat dikatakan memuaskan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman luar negeri edisi Triwulan II TA 2013, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total nilai pinjaman luar negeri pada Triwulan II Tahun Anggaran 2013 sebesar ekuivalen USD 16.994,20 juta termasuk 5 proyek yang efektif dan dipantau pada Triwulan II tahun 2013.
- 2. Penyerapan pinjaman pada periode Januari Juni TA 2013 sebesar ekuivalen USD 1.203,27 juta dari target yang direncanakan sebesar ekuivalen USD 4.200,11 juta. Secara kumulatif, penyerapan pinjaman proyek mencapai ekuivalen USD 6.384,72 juta atau 37,63%.
- 3. Beberapa proyek menunjukan angka progress varian ≤ -30 yang berarti proyek tersebut sangat terlambat dalam pelaksanaannya (*serious delay*) yang disebabkan oleh beberapa permasalahan dan kendala diantaranyaadalah masalah adminsitratif pada tahap persiapan, pencairan dana maupun teknis pelaksanaan dilapangan, pengadaan barang dan jasa.
- 4. Pemantauan terhadap hibah masih terbatas pada hibah luar negeri dengan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). Pemantauan masih dilakukan secara deskriptif, sehingga belum dapat menunjukkan kinerja hibah luar negeri secara keseluruhan.
- 5. Lesson learned dari proyek-proyek yang telah selesai sebagaimana tertuang laporan akhir proyek (*Project Completion Report*) dan hasil kunjungan lapangan, antara lain bahwa dana pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang menjadi prioritas utama masyarakat dan dapat disinergikan secara optimal dengan program lain yang dananya berasal dari APBN maupun APBD sehingga menumbuhkan komitmen dan rasa kepemilikan.
- 6. Dalam pelaksanaannya beberapa proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN berhubungan dengan kawasan konservasi/hutan. Sulitnya proses dan jangka waktu yang terlalu lama dalam pembebasan lahan berdampak pada berbagai aspek dalam proyek maupun di luar proyek seperti kontraktor dan masyarakat sekitar. Akibatnya, proyek sulit untuk diselesaikan dan mengalami perpanjangan. Bappenas sebagai lembaga yang terlibat mulai dari perencanaan, pemantauan hingga evaluasi proyek pinjaman luar negeri berupaya untuk mengurai permasalahan yang sistemik tersebut dengan meningkatkan koordinasi dan negosiasi dengan K/L terkait, dan tentunya juga dengan partisipasi aktif dari PT.PLN.

Tindak Lanjut

Upaya dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan pinjaman luar negeri yang rendah dan progress varian yang rendah, serta permasalahan-permasalahan yang muncul selama proyek berjalan perlu dilakukan perbaikan dengan melakukan peningkatan kualitas persiapan pada proyek-proyek baru, sedangkan untuk proyek yang sedang berjalan perlu dilakukan pengingkatan pengelolaan melalui koordinasi yang lebih intensif baik antar lembaga maupun dengan mitra pembangunan,

- penyelarasan prosedur pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, peningkatan kapasitas pengelolaan proyek utamanya mengenai proses pengadaan barang/jasa.
- 2. Perlu dilakukan peningkatkan kerjasama dengan negara mitra pembangunan melalui monitoring bersama baik dilapangan maupun dalam pertemuan dengan turut melibatkan instansi penanggung jawab proyek serta kontraktor pelaksana, agar tercipta harmonisasi dalam keberlangsungan proyek. Selain itu diperlukan pula sosialiasai dan peran serta masyarakat agar proyek dapat berjalan lancar, berkesinambungan dan tepat guna.
- 3. Pembelajaran penting dari proyek yang telah berjalan adalah dalam hal perencanaan, meskipun pelaksanaan proyek dinilai berhasil, namun sebagian komponen kegiatan sudah ada dan sudah dibiayai oleh sumber lain, hal ini menyebabkan dana pinjaman tidak terserap seluruhnya dan dilakukan pembatalan sebagian, oleh karena itu dalam perencanaan proyek selanjutnya perlu lebih berhati-hati dalam memasukkan komponen kegiatan yang akan didanai dari pinjaman luar negeri.
- 4. Sebagai bentuk perbaikan perencanaan kedepan, untuk proyek-proyek yang terkait dengan pembebasan lahan terutama kawasan hutan, sebelum efektif diupayakan untuk memastikan mengenai pembebasan lahan terlebih dahulu, meskipun tidak mungkin dilakukan pembebasan lahan secara keseluruhan namun setidaknya ada spot-spot tertentu yang pasti sudah dapat dilakukan pembebasan.
- 5. Perlunya pemahaman bahwa proyek tidak semata-mata dinilai pada penyerapan yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Yang harus diperhatikan adalah *committed funding* yang sudah ditetapkan untuk proyek serta apakah proyek ini memiliki masa waktu tertentu untuk memayarkan *tuition fee*.
- 6. Dengan melihat permasalahan pada proses administrasi DIPA, diperlukan adanya kebijakan yang memungkinkan proses pengesahan DIPA (termasuk DIPA Luncuran) dan revisi DIPA dapat dilakukan untuk tiap kegiatan yang telah siap atau tiap Satuan Kerja sehingga tidak menghambat pelaksanaan proyek yang telah siap.